

SEJARAH KOTA BANJARMASIN

Tim Penulis :

H. Ramli Nawawi

Tamny Ruslan

Yustan Aziddin

834.23

AM

S

ONS

11/1989

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA

Milik Depdikbud
Tidak diperdagangkan

SEJARAH KOTA BANJARMASIN

**PERPUSTAKAAN
DIREKTORAT SEJARAH &
NILAI TRADISIONAL**

Tim Penulis :

H. Ramli Nawawi
Tamny Ruslan
Yustan Aziddin

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA
1986

REPUBLICAN
NATIONAL COMMITTEE
1912

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN) yang berada pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, telah berhasil menerbitkan seri buku biografi dan kesejarahan. Saya menyambut dengan gembira hasil penerbitan tersebut.

Buku-buku tersebut dapat diselesaikan berkat adanya kerjasama antara para penulis dengan tenaga-tenaga di dalam Proyek. Karena baru merupakan langkah pertama, maka dalam buku-buku hasil Proyek IDSN itu masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Diharapkan hal itu dapat disempurnakan pada masa yang mendatang.

Usaha penulisan buku-buku kesejarahan wajib kita tingkatkan untuk memupuk, memperkaya dan memberi corak pada kebudayaan nasional dengan tetap memelihara dan membina tradisi dan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebanggaan serta kemanfaatan nasional.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku-buku ini dapat ditambah sarana penelitian dan kepustakaan yang diperlukan

untuk pembangunan bangsa dan negara, khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan ini.

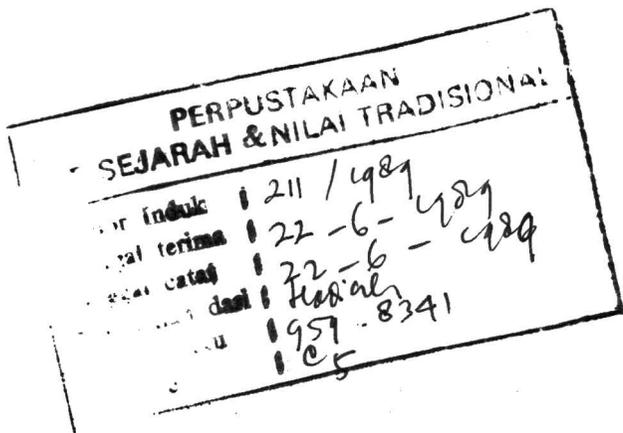
Jakarta, Juli 1986

Direktur Jenderal Kebudayaan



Prof. Dr. Haryati Soebadio

NIP. 130119123.



KATA PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional adalah salah satu proyek yang berada pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang antara lain menggarap penulisan kesejarahan perihal "Sejarah Kota" di seluruh Indonesia.

Pengertian "Sejarah Kota" dalam hal ini ialah sejarah pertumbuhan dan perkembangan kota-kota besar di Indonesia ditinjau dari segi politik, ekonomi dan sosial-budaya pada periode tertentu (1950 - 1979).

Dengan tersusunnya "Sejarah Kota" tiap-tiap daerah di wilayah Indonesia, diharapkan masyarakat luas akan memperoleh bahan-bahan informasi mengenai pertumbuhan dan perkembangan suatu kota. Adanya informasi yang disajikan kepada masyarakat dalam bentuk tulisan sejarah akan membuka kemungkinan tercapainya suasana dinamis serta dapat memancing partisipasi masyarakat dalam usaha-usaha pembangunan.

Dalam kerangka yang lebih luas, penulisan "Sejarah Kota-kota Besar" akan memberikan kesadaran terbinanya jiwa ke-

bangsaan terutama bagi generasi muda demi kesinambungan sejarah dan pembinaan bangsa.

Jakarta, Juli 1986

**Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi
Sejarah Nasional,**

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN.....	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Masalah dan Ruang Lingkup	1
1.2 Tujuan dan Sasaran Penelitian.....	2
1.3 Pertanggungjawaban Ilmiah.....	2
Bab II Lintasan Sejarah Kota Banjarmasin	
Sampai Dengan Tahun 1950	6
2.1 Geografi.....	6
2.2 Asal-usul Kota Banjarmasin.....	9
2.3 Perkembangan Administrasi Pemerintahan.....	15
2.4 Komposisi dan Mobilitas Penduduk. . .	20

BAB III	Kota dan Lingkungan Sesudah Tahun 1950 – 1979	28
3.1	Pemekaran Kota	28
3.2	Pertumbuhan Pemukiman-pemukiman dan Perbaikan Perkampungan	36
3.3	Penduduk dan Mobilitas Penduduk	39
BAB IV	Politik dan Pemerintahan	49
4.1	Perkembangan Administrasi Kota	49
4.2	Kekuatan-kekuatan Sosial dan Politik.	55
4.3	Pemilu Tahun 1955, 1971, dan 1977 .	59
BAB V	Sosial dan Kebudayaan	68
5.1	Perubahan Sosial	68
5.2	Agama dan Adat-istiadat	72
5.3	Seni Budaya	82
5.4	Pendidikan	84
5.5	Pelacuran	93
5.6	Kebakaran	99
5.7	Rekreasi	100
BAB VI	Peranan Ekonomi Kota	107
6.1	Peranan Kota Banjarmasin sebagai Pusat Sirkulasi dan Distribusi Barang ke Daerah, ke Luar Daerah, dan ke Luar Negeri	107
6.1.1	Banjarmasin sebagai Pusat Distribusi ke Luar Daerah (ekspor) tahun 1950-1965	107
6.1.2	Banjarmasin sebagai Pusat Distribusi ke Dalam Daerah (impor) tahun 1950-1965	113
6.2.	Pusat Kegiatan Ekonomi Kota	125
6.2.1	Pasar, Pusat-pusat Pertokoan dan Pusat Perbelanjaan	125

6.2.2	Pemukiman Penduduk di Pertokoan dan Kedai-kedai	133
6.3	Pusat Kegiatan Ekonomi Kota	135
6.3.1	Pasar, Pusat-pusat Pertokoan dan Pusat Perbelanjaan	136
6.3.2	Pemukiman Penduduk di Pertokoan dan Kedai-kedai	136
6.4	Pedagang Kaki Lima	137
BAB VII	Perhubungan	143
7.1	Jalan Raya di Kotamadya Banjarmasin	143
7.2	Jembatan	143
7.3	Terminal Kota sebagai Urat Nadi Lalu-lintas Darat di Kota dan di Luar Kota.	
7.4	Dermaga Merupakan Urat Nadi Lalu-lintas Sungai di Kota Banjarmasin	157
BAB VIII	Penutup	167
	DAFTAR BACAAN	170
	LAMPIRAN	175

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Masalah dan Ruang Lingkup

Banjarmasin sebagai salah satu kota dagang yang sudah dikenal sejak berdirinya pada abad ke 16, kemudian menjadi bertambah penting pada abad ke 17 ketika Sultan Agung dari Mataram menyerang dan menghancurkan pelabuhan-pelabuhan dagang di pantai utara Jawa pada abad ke-17.

Di samping sebagai kota dagang, Banjarmasin merupakan pintu gerbang perekonomian tidak hanya bagi daerah Kalimantan Selatan sendiri, tetapi juga merupakan pintu gerbang perekonomian daerah Kalimantan Tengah. Bahkan tidak dapat dilupakan bahwa kota Banjarmasin selama perkembangannya lebih-lebih sejak kemerdekaan besar perannya sebagai pusat kekuasaan dan percaturan politik di daerah ini.

Melihat kedudukan dan peranan kota Banjarmasin, seperti disebutkan di atas, maka masalah yang terkait di dalamnya banyak pula jenisnya. Namun demikian sebagai permasalahan yang akan diuraikan di dalam penulisan sejarah kota besar Banjarmasin ini menyangkut pertumbuhan ekonomi kota, peranan politis, dan pertumbuhan sosial politiknya. Namun penentuan

permasalahan di atas tidak menutup kemungkinan diuraikannya pula masalah lainnya.

Adapun periodenya antara tahun 1950–1979. Penentuan periode ini sesuai dengan pertumbuhan kota-kota besar yang terjadi pada tahun 1950 tersebut.

1.2 Tujuan dan Sasaran Penelitian

Pemahaman arti dan peranan kota besar diperlukan dalam rangka usaha memahami pertumbuhan negara Indonesia ini. Demikian pula penulisan ini dapat dipakai sebagai bahan-bahan untuk informasi kepada masyarakat. Sedangkan dipandang dari sudut sejarah, maka penulisan ini dapat menyumbangkan arti bagi perkembangan penulisan sejarah di kemudian hari, sehingga penulisan ini juga bermaksud menjangkau tujuan yang lebih jauh, yakni sehubungan dengan pertumbuhan penulisan sejarah secara ilmiah.

1.3 Pertanggungjawaban Ilmiah

Dalam pengumpulan data dan penyusunan naskah ini, tim berusaha meneliti dan memanfaatkan berbagai sumber yang ada. Metode yang dipakai adalah metode kepustakaan, wawancara dan pengumpulan data-data di lapangan. Setelah data terkumpul tim mengadakan kritik dan seleksi terhadap data dimaksud dan kemudian melakukan analisa serta menyusunnya menjadi cerita sejarah.

Agar dapat memberikan gambaran ini yang runtun dan bulat, maka naskah ini disusun dalam suatu rangkaian cerita sejarah yang bersifat deskriptif – analistik, maka untuk memudahkan uraian dimaksud, naskah ini dibagi menjadi tujuh bab.

Bab I Pendahuluan; di sini antara lain diuraikan tentang masalah dan ruang lingkup, tujuan dan sasaran penelitian, dan pertanggungjawaban ilmiah.

Bab II; diuraikan lintasan sejarah Kota Banjarmasin sampai dengan tahun 1950. Uraian ini meliputi latar belakang

perkembangan kota mulai tahun 1950 – 1979, yang isinya meliputi keadaan geografi secara umum, asal-usul Kota Banjarmasin, perkembangan administrasi pemerintahan, dan komposisi penduduk.

Bab III; diuraikan tentang kota dan lingkungan sesudah tahun 1950 sampai dengan tahun 1979, seperti pemekaran kota, berkembang secara perlahan dari bagian utara – selatan, timur dan barat. Pemekaran kota menurut jalur-jalur jalan, dan di belakang jalan pertumbuhan pemukiman-pemukiman dan perbaikan perkampungan telah diperhatikan oleh pemerintah pada saat ini. Akan tetapi sebelum tahun 1970 di belakang jalan atau di belakang rumah-rumah gedung, pertumbuhannya kurang baik, karena rumah-rumah ini dibangun secara tidak teratur, kecuali yang diprioritaskan pemerintah. Pertumbuhan penduduk dan mobilitas penduduk cukup tinggi, di samping belum adanya KB, juga akibat urbanisasi. Akan tetapi kenaikan itu tidak berarti, jika dibandingkan dengan luas atau rata-rata perkilometer persegi.

Bab IV; diuraikan tentang politik dan pemerintah, terutama mengenai perkembangan administrasi kota, dan yang lebih penting kekuatan-kekuatan sosial dan politik yang sebelum tahun 1966 menurut sistem banyak partai. Dalam pemilu tahun 1955, suara terbanyak adalah Nahdatul Ulama. Sedangkan pada pemilu 1971, dan 1977 suara terbanyak adalah Partai Persatuan Pembangunan untuk Kotamadya Banjarmasin. Secara Propinsi suara terbanyak Golongan Karya.

Bab V; diuraikan tentang sosial dan kebudayaan. Mengenai perubahan sosial tampak peranan kaum bangsawan turun setelah masuknya sistem pendidikan modern. Status tidak lagi berdasarkan keturunan, tetapi diukur menurut kategori pendidikan. Keberhasilan dalam pendidikan akan ada kecenderungan menduduki elite birokrasi. Agama tidak kalah pentingnya dalam segala segi kehidupan masyarakat Banjar. Tampak kemajuan dalam bidang keagamaan tercermin dengan bertambahnya

mesjid dan meningkatnya jumlah jemaah haji. Di samping itu agama dan adat saling berdampingan, misalnya upacara perkawinan berpola pada cara Islam, kelahiran, memperingati lahirnya Nabi Muhammas pada bulan Maulud, dan membaca Isra dan Mi'raj pada bulan Rajab.

Dalam bidang seni budaya pun dikembangkan dan dilestarikan terutama seni tradisional Banjar, baik tari, nyanyi, ukir, hias, sastra dan lain-lain. Hal ini erat kaitannya dengan pendidikan yang memacu pada anak-anak muda untuk berkreasi dalam bidang seni. Selain itu pendidikan memberi arah baru dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya.

Perkembangan pendidikan itu tampak dari tahun 1950—1979 dengan makin bertambahnya SDN dan Swasta, SLTP Negeri dan Swasta, SLTA Negeri dan Swasta sampai perguruan tinggi. Tidak kalah pentingnya masalah-masalah sosial seperti pelacuran, kebakaran, dan rekreasi.

Bab VI; diuraikan peranan ekonomi kota, yang meliputi peranan kota Banjarmasin sebagai pusat sirkulasi dan distribusi barang ke daerah pedalaman, dan ke luar daerah serta ke luar negeri. Terutama mengenai barang ke luar daerah dan ke luar negeri merupakan ekspor Kalimantan Selatan, dan impor ke Banjarmasin melalui pelabuhan Banjarmasin, tampak ekspor lebih tinggi daripada impor. Karena itu Kalimantan Selatan, terutama Banjarmasin dapat memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri. Yang menjadi pokok utama Kotamadya Banjarmasin bertitik tolak pada pasar, pusat-pusat pertokoan, perbelanjaan sebagai kegiatan ekonomi kota. Dan yang lebih penting lagi dalam ikut menyemarakkan kesibukan kota adalah pedagang kaki lima.

Bab VII; diuraikan tentang perhubungan yang meliputi perkembangan jalan-jalan, jembatan-jembatan, terminal, dan dermaga kota sebagai urat nadi lalu lintas kota dan daerah pedalaman.

Dengan mudahnya perhubungan, membuat orang dapat bepergian ke mana-mana melalui jalan raya. Perhubungan yang makin ramai dapat pula menyebabkan terjadinya penyebaran penduduk dan tempat tinggal, karena adanya sarana dan prasarana yang cermat, aman dan relatif murah. Hubungan ke daerah pedalaman mudah, sehingga arus barang-barang dari luar dan dari pedalaman itu sendiri makin lancar.

Bab VIII adalah bagian penutup.



BAB II LINTASAN SEJARAH KOTA BANJARMASIN SAMPAI TAHUN 1950

2.1 *Geografi*

Sejak awal abad ke-16, ibu kota Kerajaan Banjar berpusat di Banjarmasin, tepatnya di Kampung Kuin. Sesudah tahun 1860, ketika kekuasaan diambil alih oleh Pemerintah Belanda hingga Perang Dunia II, kedudukan Banjarmasin menjadi ibu kota Keresidenan Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.¹⁾ Propinsi Kalimantan Selatan sekarang ini meliputi kabupaten/kotamadya: Kotamadya Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tabalong.²⁾ Dalam naskah ini pembahasan hanya berkisar tentang Kotamadya Banjarmasin.

Ibu kota Kalimantan Selatan adalah Banjarmasin. Sebuah kota dagang yang berkembang sejak abad ke-16. Banjarmasin sebagai pintu gerbang utama Kalimantan Selatan dan Kaliman-

tan Tengah yang dahulu dikenal karena lada dan hasil hutan lainnya, maka sekarang hasil ekspor kayu dan rotan yang makin bertambah ramai. Sekitar tahun enam puluhan, ada gagasan pemerintah daerah untuk memindahkan ibu kota propinsi Kalimantan Selatan ke sebelah Utara jaraknya 35 km dari Kota Banjarmasin. Kota yang dibangun ini bernama Banjarbaru. Sekarang kota Banjarbaru berstatus sebagai kota administratif.³⁾

Secara geografis Kotamadya Banjarmasin terletak di antara $3^{\circ} 15' LS$ sampai dengan $3^{\circ} 22'$ Lintang Selatan dan $114^{\circ} 98'$ Bujur Timur, pada ketinggian rata-rata 0,16 M, di bawah permukaan laut. Karena itu pada waktu terang bulan air laut bagian selatan naik ke sungai, pantai, dan menggenangi jalan-jalan yang rendah permukaannya di Kotamadya Banjarmasin. Air laut yang naik ini disebut "banyu pasang". Jika banyu pasang teramat dalam disebut pasang ramban, dan kalau pasang terjadi dua kali sehari semalam disebut "pasang pindua". Pada waktu musim kemarau panjang air pasang ini naik membawa air asin, yang diucapkan oleh orang Banjar muara atau kuala sebagai "masin". Hal ini pula menurut versi penduduk setempat melahirkannya nama Banjarmasin.⁴⁾

Sebagaimana daerah lain yang letaknya dekat dengan daerah garis khatulistiwa, Banjarmasin termasuk daerah yang berudara panas, iklim tropis, lembab dan umumnya banyak turun hujan, rata-rata tiap bulan 6–15 hari dengan curah hujan rata-rata 2000–2700 mm., terbesar dalam bulan Desember/Januari dan terkecil dalam bulan-bulan Juli/Agustus. Menurut Smith dan Ferguson tipe iklim adalah B dan C.⁵⁾ Mempunyai dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Masing-masing dapat disebut musim timur yang menghembuskan angin yang membawa hawa panas dan musim barat yang membawa hawa dingin dan mengandung basah. Keadaan suhu rata-rata di antara $26^{\circ} C$ hingga $34^{\circ} C$. Sesuai dengan keadaan alamnya Banjarmasin dialiri oleh banyak sungai besar dan kecil yang kesemu-

nya dimanfaatkan untuk sarana perhubungan antar kota, desa dan daerah. Di antaranya adalah Sungai Barito yang terbesar, Sungai Martapura dan sungai-sungai kecil lainnya.

Dekat muara Sungai Barito terdapat pulau-pulau yaitu Pulau Bakut, Pulau Kembang, Pulau Tempurung, Pulau Tamban, Pulau Alalak dan Pulau Kaget. Di antara pulau-pulau itu Pulau Kambang yang terkenal dipandang keramat oleh sebagian orang Tionghoa di Kalimantan Selatan. Pulau ini seluruhnya didiami oleh kera-kera yang juga dipandang keramat, diberi sesaji, kemenyan, makanan dan buah-buahan. Kotamadya Banjarmasin sendiri terletak pada sebuah pulau atau delta yang disebut Pulau Tatas, letaknya tidak jauh dari Muara Barito.

Kotamadya Banjarmasin sekarang ini disebelah Utara berbatasan dengan Daerah Tingkat II Kabupaten Barito Kuala, di sebelah Selatan dengan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanah Laut, di sebelah Timur dengan Daerah Tingkat II Kabupaten Banjar, dan di sebelah Barat dengan Sungai Barito wilayah Kabupaten Barito Kuala.

Kotamadya Banjarmasin mempunyai luas lebih-kurang 72.0776 km² atau 7.207,76 ha, dengan rincian sebagai berikut: tanah bangunan = 1.861,85 ha (25,8%), tanah perkebunan = 1.980,20 ha (27,5%), tanah persawahan = 2.746,81 ha (38,1%), jalan/sungai = 426,26 ha (5,9%), dan rawa/tanah kosong = 192,54 ha (2,7%). Pusat kota terletak di suatu dataran delta di muara cabang Sungai Barito dan keadaan tanahnya hampir seluruhnya merupakan rawa-rawa dan kadang-kadang digenangi air.

Hoone, seorang ahli geologi yang melakukan penelitian tentang Kota Banjarmasin, berkesimpulan bahwa pada kedalaman 4,5 sampai dengan 11 meter, jenis batuanannya empuk, hitam, lumpur, dan tanah liat dengan batang pohon rapuh. Pada kedalaman 26 meter sampai dengan 33 meter, ditemukan tanah merah. Tanah liat warna kelabu sampai kedalaman itu

merupakan bentuk batas-batas geologis. Sampai kedalaman 50 meter terdapat *oligoceenlogen* di atas Zaman kuartair. Untuk menentukan batas alluvial dan diluvial menemui kesulitan, karena kekurangan bukti-bukti konkret.⁶⁾ Keadaan penggunaan tanah akan selalu berubah sesuai dengan perkembangan kota. Dengan bertambahnya jumlah penduduk di masa mendatang akan menunjukkan, bahwa penggunaan tanah perkebunan, persawahan dan tanah kosong lainnya akan berangsur-angsur berkurang dan sebaliknya tanah-tanah bangunan akan bertambah.

Suatu lokasi tanah yang sempit yang dihuni dengan sangat padat, mengakibatkan perumahan tidak teratur letaknya dan berdesakan serta tidak memenuhi syarat perkampungan, misalnya daerah Kelayan, Kampung Melayu/Seberang Mesjid, Pekapuran dan lain-lain, sehingga sering ditimpa bencana kebakaran yang sukar diatasi. Sedangkan di lain tempat masih banyak tanah-tanah kosong yang kurang/tidak dimanfaatkan, meskipun sebenarnya dapat dijadikan daerah perumahan. Daerah-daerah yang banyak dihuni biasanya di tepi-tepi sungai, sebab memudahkan perhubungan. Daerah-daerah kosong baru dapat menjadi ramai, apabila sudah dibuatkan jalan.⁷⁾ Untuk pengembangan dan pemekaran daerah perkampungan harus dibuatkan jalan-jalan baru yang menembus daerah-daerah yang masih kosong dimaksud. Dalam Outline Plan telah dicantumkan dan disusun peruntukan dan penggunaan tanah untuk keperluan sosial, pasar-pasar dan pertokoan kantor-kantor dan daerah industri.⁸⁾

2.2 Asal-usul Kota Banjarmasin

Untuk mengungkapkan asal-usul Kotamadya Banjarmasin harus ditelusuri sejarah pertumbuhan dan perkembangannya. Kota Banjarmasin menurut beberapa catatan seiring berdirinya dengan kerajaan Banjar di daerah pantai yang merupakan proses kelanjutan dari kerajaan pedalaman yang hidrolis dan beragama

Jawa – Hindu ke pola kehidupan masyarakat tradisional baru yang bercorak maritim di daerah pantai yang komersial dengan agama Islam sebagai identitasnya. Sekaligus juga merupakan kebangkitan kelompok-kelompok sosial di Barito Hilir untuk memegang kekuasaan politik dan membina suatu sistem sosial kultural baru yang disebut Banjar⁹). Dalam Hikayat Banjar, jelas kata Banjar menunjukkan nama desa tertentu di sekitar Cerucuk sekarang di samping desa Sarapat, Balandean, Tamban, Belitung dan Kuin. Desa Banjar ini disebut pula Banjarmasin, karena tetuha desa disebut Patih Masih. Pada permulaannya Banjar di Muara Cerucuk ini adalah sebuah kampung orang Melayu atau kampung Oloh Masih¹⁰).

Setelah Pangeran Samudera menjadi raja di Banjarmasin, maka kampung orang Melayu ini berfungsi pula sebagai bandar, lengkapnya "Bandar Masih, kemudian menjadi ibu kota kerajaan yang baru di desa Kuin. Pada tahun 1526 berdirilah Kota Banjarmasin, sekaligus menandai kemenangan Pangeran Samudera terhadap kerajaan Pedalaman. Perdagangan makin meningkat yang memungkinkan terjadinya kontak kultural dengan dunia luar dan tumbuhnya ekonomi komersial, maka kota Banjarmasin, yang kemudian berubah sebutannya menjadi Banjarmasin menjadi kota dagang yang amat ramai dikunjungi oleh berbagai suku dan bangsa.

Banjarmasin sudah menghasilkan Jung-Jung untuk pelayaran interinsuler dan interkontinental, terutama bagi pelayaran Jawa¹¹). Pelayaran perdagangan dan pembajakan laut meningkatkan kekayaan suatu kerajaan laut. Semua dasar-dasar politis dan ekonomis kerajaan Banjar tumbuh dan berkembang dengan pesat. Pada abad ini yang memerintah adalah Sunan Batu Habang, Penambahan Batu Putih, dan Panambahan Batu Hiran¹²).

Banjarmasin menjadi salah satu pusat migrasi suku-suku bangsa, baik Melayu maupun Jawa, yang datang ke Banjarmasin akibat pergolakan politik dan peperangan di Indonesia Timur di abad ke-17. Sebagai pusat kebudayaan yang utama daerah mari-

tim Kalimantan Selatan merupakan hasil proses akulturasi kebudayaan yang dipengaruhi oleh unsur-unsur budaya Melayu, Jawa, Bugis dan lain-lain, dengan lapisan-lapisan bawah unsur-unsur kebudayaan Dayak dan orang-Bukit^{1 3}).

Pada awal abad ke-17 VOC berusaha mengadakan kontak dagang dengan Banjarmasin. J.W. Verschoor mengirim Koopman Gillis Michiels-Zoon ke Banjarmasin. Pada tanggal 7 Juni 1607 ia tiba di Banjarmasin, dan diundang ke darat bersama anak buahnya, tetapi mereka dibunuh semuanya dan barang-barangnya dirampas. Lima tahun kemudian, tahun 1612, Belanda melakukan pembalasan, yang berakibat Banjarmasin hancur terbakar oleh tembakan-tembakan meriam dari kapal Belanda. Mustainullah, yakni Raja Banjarmasin keempat, ibu kotanya dipindahkan, ke Kayu Tangi Martapura. Alasannya tanahnya bertuah, tempatnya jauh di pedalaman, sehingga orang asing sulit untuk menyerang^{1 4}). Di Banjar Baru atau Banjar Hanyar mereka membuat benteng-benteng pertahanan terhadap serangan musuh. Hubungan dengan Belanda ini baru menjadi baik kembali setelah dalam tahun 1635 dibuat kontrak yang pertama dengan Belanda. Hubungan baik ini tidak berlangsung lama.

Pertengahan abad ke-17 pemerintahan terbagi dua yaitu Pangeran Ratu tetap bertahta di Martapura dan Pangeran Surianata bertahta di Banjarmasin^{1 5}). Banjarmasin menjadi pusat pemerintahan Pangeran Surianata yang menyebut dirinya Sultan Agung, mengawasi ramainya perdagangan, tambang-tambang emas di pedalaman, hasil kebun lada dan sebagainya, sehingga pelabuhan Banjarmasin amat ramai^{1 6}).

Pada awal abad ke-18 daerah Kuin pusat pemerintahan dibakar oleh rakyat sendiri untuk mengusir orang Inggeris yang ingin tetap bertahan di Banjarmasin. Karena itu pusat kegiatan kota dipindahkan 6 mil ke hulu yakni ke pulau Tatas. Dalam kontrak tahun 1747, Belanda kembali ke Banjarmasin membuat

loji di pulau Tatas. Belanda berhasil mendapat tanah untuk membuat Fort Tatas.

Dalam abad ke-19, wilayah kekuasaan pemerintahan Banjarmasin dipersempit oleh Sultan Adam dalam perjanjian tambahannya dengan pihak Belanda pada tahun 1854¹⁷). Wilayah kerajaan dibatasi oleh Sungai Banjar (anak sungai Barito) di sebelah Barat, sebelah timur oleh pegunungan Meratus dan sebelah Selatan oleh Gunung Pematon. Kekuasaan Sultan ini terbatas sejak tahun 1826. Menurut ketetapan itu pengangkatan Sultan dan Mangkubumi harus disetujui pihak Belanda dan perkara-perkara pengadilan di daerah yang dikuasai Belanda diputuskan oleh pihak Belanda¹⁸). Dalam daerah-daerah yang telah diserahkan pada pihak Belanda dibentuk suatu pemerintahan yang pada pertengahan abad ke-19 digabung menjadi "Gouvernement van Borneo" yang berpusat di kota Banjarmasin sebagai ibu kotanya. Sekalipun demikian dalam wilayah yang dikuasai Sultan sistem pemerintahan tradisional masih tetap berlaku dan merupakan patokan terpenting dalam kerajaan Banjar¹⁹).

Pada akhir hidup kerajaan Banjar, Sultan Tamjidillah diangkat sebagai raja oleh Belanda, tetapi bertentangan dengan wasiat Sultan Adam yang menetapkan Pangeran Hidayatullah sebagai penggantinya. Peristiwa itu membangkitkan semangat rakyat untuk mengangkat senjata mengusir Belanda dari kerajaan Banjar. Di bawah pimpinan Pangeran Antasari Perang Banjar berlangsung dari tahun 1859 sampai dengan 1905²⁰).

Untuk mengatasi dan menghadapi Perang Banjar ini pihak Belanda bertindak menurunkan Sultan Tamjidillah sebagai raja pada tanggal 25 Juni 1859, karena Sultan Tamjidillah dianggap penyebab Perang Banjar berlangsung dan memberikan kesempatan pada Pangeran Hidayatullah untuk menjadi raja. Akan tetapi Hidayatullah tidak menampakkan diri. Maka pada tanggal 11 Juni 1869, kerajaan Banjar dinyatakan telah hapus melalui pengumuman Nieuwenhyzen di Banjarmasin. Semua bekas wi-

layah kerajaan Banjar disatukan menjadi wilayah Hindia Belanda yang disebut *Zuider en Oosterafdeeling van Borneo*.

Kota Banjarmasin makin terkenal, karena kota ini menjadi ibu kota distrik Banjarmasin, sekaligus menjadi ibu kota onderafdeeling Banjarmasin, dan menjadi ibu kota "Resedentie nider en oosterafdeeling van Borneo" sampai tahun 1937^{2 1}). Pada tahun 1938 menjadi ibu kota "Gouvernement Borneo" tempat kedudukan seorang Gubernur Belanda dengan dr. J. Haga sebagai Gubernur Belanda yang pertama dan terakhir sampai dengan tahun 1942.

Selain itu Banjarmasin menjadi penting dalam arus lalu-lintas pelayaran dan perdagangan di Indonesia Tengah^{2 2}). Kapal-kapal layar dan api masuk dan ke luar sampai ke pelabuhan Banjarmasin. Jika air surut kapal-kapal agak sulit memasuki pelabuhan di dalam kota, kecuali air pasang naik kapal-kapal dan perahu-perahu layar dapat dengan mudah ke luar dan masuk pelabuhan Banjarmasin. Pelabuhan Banjarmasin terletak di sungai Martapura, yaitu sebuah anak sungai Barito. Untuk memasuki sungai Martapura menuju pelabuhan dan kota Banjarmasin harus melalui beberapa tikungan dan rintangan, kira-kira 20 km panjangnya dari muara sungai Barito. Masuk arah ke kota Banjarmasin, akan menemui Kampung Mantuil dan Basirih tempat pasar terapung di atas air. Dalam periode ini jalan-jalan darat masih kurang, sehingga jalan air besar peranannya^{2 3}).

Pusat-pusat kota dari pelabuhan, memanjang sampai sungai Martapura, Pasar Baru, Kediaman orang-orang Belanda, Fort Tatas, dan Pasar Lama. Di daerah pelabuhan berderet kantor-kantor dinas duane dan bangunan pangkalan pelabuhan yang letaknya membelakangi sungai Martapura. Kapal-kapal terletak pada sisi barat dan perahu-perahu terletak pada sisi timur. Pelabuhan ini mengadakan hubungan tiap 14 hari sekali dengan kapal dinas KPM Jakarta – Surabaya – Banjarmasin yang bermuatan 200 ton, dan seminggu sekali dari Singapura – Ujung Pandang Surabaya melalui Banjarmasin ke Samarinda.

Firma milik orang Cina mempunyai kapal yang digerakkan dengan tenaga uap berkekuatan 800 ton bruto yang mengadakan hubungan tiap 14 hari sekali antara Banjarmasin – Singapura – Banjarmasin^{2 4}). Pelabuhan Banjarmasin menjadi pusat transit dagang ke Barito daerah dusun dan hulu sungai. Hubungan dagang langsung diadakan dengan Singapura, Jawa dan Sumatera. Keadaan ekonomi pun makin maju, karena tiap kapal yang datang membawa barang-barang impor, sedangkan kapal yang berangkat mengangkut barang-barang ekspor^{2 5}). Di Mantuil ada "seimport" dihubungkan teleponis dengan pelabuhan Banjarmasin, ditempatkan garnizoon batalyon yang memelihara keamanan untuk Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, di samping sebuah detasemen. Di Fort Tatas dibangun sebuah rumah sakit modern. Industri hanya meliputi pabrik es, bengkel dan dok untuk kapal-kapal kecil yang dikuasai oleh Borneo Industri Maatschappij. Sedangkan firma-firma yang ada terdiri dari: *Borneo Sumatera Handels Maatschappij*, *Henneman & Co*, *Agen Javasche Bank* dan *Agen Factory*.

Pada masa kekuasaan Jepang, tampaknya tidak ada perubahan, karena sebelum Jepang memasuki kota Banjarmasin Belanda telah melakukan pembumihangusan. Pasar Baru menjadi lautan api, Fort Tatas dihancurkan, Pelabuhan, gedung-gedung pabrik dan ANIEM listrik hanya tinggal fondasi. Jembatan Coen diledakkan oleh Belanda, yang kemudian diperbaiki kembali oleh Jepang dengan penggantian nama Jembatan Jamat.

Dalam tahun 1943, saluran Air Minum diresmikan di Banjarmasin, yang selama pemerintahan Belanda tidak terlaksana, terkenal dengan sebutan Coerdo. Demikian pula rumah sakit umum di Fort Tatas dipindahkan ke jalan Ulin km 1 pada tahun 1944^{2 6}). Tanggal 9 November 1945 meletuslah pertempuran pertama di Banjarmasin. Kota Banjarmasin mengalami kerusakan akibat sabotase, seperti pembakaran pelabuhan Banjarmasin dan Landasan Ulin, Kemudian pada tahun 1946–1949 Belanda membangun kembali pelabuhan lama, Fort Tatas dan Landasan Ulin.

2.3 *Perkembangan Administrasi Pemerintahan*

Sejak berdirinya Kerajaan Dipa yang berpusat di pedalaman, kemudian berpindah ke daerah pantai daerah Kuin Cerucuk atau Kerajaan Banjar (1526), sampai akhir kerajaan Banjar yang dipimpin oleh Sultan Tamjidillah (1860) sistem kepemimpinan berlangsung secara tradisional. Hubungan kekeluargaan memegang peranan penting. Raja sebagai penguasa mempunyai fungsi yang memberikan ketenangan pada rakyatnya, artinya rakyat mengikatkan dirinya pada tradisi, tetapi mereka juga menyesuaikan dengan perubahan-perubahan masyarakat²⁷). Perubahan-perubahan itu mereka terima tanpa mengganggu keserasian susunan masyarakat. Karena itu pengaruh asing dalam perubahan yang drastis secara ekstrim mereka menolaknya.

Susunan pemerintahan Kerajaan Banjar pada abad ke-16 adalah sebagai berikut. Raja menduduki hirarki yang tertinggi. Di bawahnya terdapat Mangkubumi dengan tanda-tanda upacara, 2 awinan tumbak, 1 payung bawat, 1 kendaga, 1 lampir, 1 tempat roko. Di bawah Mangkubumi terdapat: Panganan, Pangiwa, Mantri Bumi dan 30 orang Mantri Sikap. Seorang Mantri Sikap ada mempunyai 100 orang pegawai. Lalawangan, kedudukan kurang lebih seperti Kepala Distrik masa penjajahan. *Sarawasa, sarabuna, sarabraja, Kuala diseluruh padalaman keraton.* x) Mandung, Paksayuda, Kepala Balai Rongsari dan Bangsal. Mamagarsari adalah pengapit raja disiti luhur. Pariwala, Singatana, Singataka dan Singapati. Kuasa dalam urusan dagang dan pasar. Sarageni dan Saradipa, kuasa dalam urusan alat senjata. Puspawana, kuasa dalam urusan tanaman, hutan, perikanan, ternak dan berburu. Pamarakan, dan Rasajiwa. Pengurus umum tentang keperluan-keperluan Padalaman dan padudusan. Kadang Aji dan Nanang, Ketua Balai petani. Wargasari, pengurus besar tentang persediaan bahan makanan, terutama lumbung padi. Anggamarta dan Astaprana, Juru Bandar dan Juru tabuhan. Kaum Mangumbara adalah Kepala Pengurus Upacara.

Wiramartas adalah Mantri dagang Bujangga. Kepala urusan bangunan rumah, Agama dan Candi. Singabana adalah kepala ketenteraman umum²⁸).

Pada masa pemerintahan Sultan Adam, tahun 1825–1857 berlaku sistem pemerintahan yang lebih maju. Perubahan-perubahan seperti dalam hirarki berikut ini:

Pada tingkat pusat pemerintahan Kerajaan Banjar, raja adalah pimpinan tertinggi. Sultan Muda, sebagai pewaris yang duduk dalam tahta kerajaan. Dewan Mahkota, badan legislatif atau juga dewan penasihat. Mangkubumi, sebagai orang yang berkuasa dalam menjalankan pemerintahan. Dalam menjalankan pemerintahan dibantu oleh Syahbandar, Kejaksaan, Mantri Bumi, Pangiwa, Panganan, Mantri Sikap bidang Keagamaan.

Pada tingkat daerah dan desa susunannya disesuaikan dengan struktur birokrasi yang ada. Kiai Adipati sebagai Gubernur Kepala Daerah seperti sekarang ini. Lalawangan, semacam Bupati Kepala Daerah Tingkat II seperti sekarang. Lurah, semacam Camat seperti sekarang. Pambakal, semacam Kepala Desa. Pangerak, Kepala Urusan Tetangga. Tatuha Kampung, orang yang terkemuka di dalam kampung²⁹).

Pada tanggal 4 Mei 1826 antara kerajaan Banjar dengan Belanda diadakan kontrak³⁰). Perjanjian ini membagi daerah kota Banjar ini menjadi dua. Daerah Pacinan Laut menyeberang ke Sungai Miai terus ke Kuin, sebagian lagi menyusur sungai Kelayan, Pemurus terus ke gunung Meratus. Pada bagian daerah kerajaan Banjar Kampung yang terpenting adalah kampung Keraton, yang kemudian disebut kampung Sungai Mesa. Di sekitar ini terdapat kediaman Menteri Besar Kiai MESA JALADRI, istana Sultan dan Balai Kaca, dan istana Sultan Tamjid. Beseberangan dengan istana Sultan Tamjid terletak rumah Residen Belanda di kampung Amerongan dan ke hilirnya benteng Tatas, sebuah kampung yang terbesar di seberang kampung Cina. Daerah Tatas inilah sampai menjelang akhir abad ke-19,

berkembang menjadi pusat kegiatan kekuasaan dan administrasi Hindia Belanda baik sipil maupun militer^{3 1}).

Susunan pemerintahan di Banjarmasin, sebelum Kerajaan Banjar dihapus dan berdampingan dengan pemerintah Belanda adalah sebagai berikut: Residen (A. Van der Ven), Mangkubumi (Tamjidillah), Sekretaris Residensi, Penerima pemasukan penjualan garam dan kepala gudang, pengawas kelas I pekerjaan umum, Jaksa Kepala, Penghulu, Pjs Kepala orang Bugis, Kapten Cina, Letnan Cina penerima, Kepala lelang, notaris, Kepala Pelabuhan, Perwakilan Pengurus Harta Warisan, Komis Pos, dan Pengadilan^{3 1}).

Tampak dalam susunan ini adanya legitimasi rasional yang sesuai dengan rasionalitas, dan bersifat hukum, sehingga tampak lebih unggul dari legitimasi tradisional dan kharismatis^{3 2}). Terdapatnya unsur Pamong Praja dan Pengadilan Negeri yang terdiri dari orang-orang terdidik dan berbagai suku bangsa, sesuai dengan jenis penduduk yang ada. Oleh karena itu sesudah Kerajaan Banjar dihapus dan Komisaris Gubernur F.N. Nieuwenhuyzen diganti oleh Letnan Kolonel G.M. Verspijck sebagai Residen, maka pemerintahan legal rasional berlaku seperti di barat. Residen, Sekretaris Residensi, Komis, Komis Pos, Jaksa Kepala, Penghulu Kepala, Kepala orang Bugis, Kepala orang Arab, Kapten Cina, Notaris, Kepala Lelang, penerima umum, dan pencatat kematian serta kelahiran, pegawai luar biasa kota-kota, Kepala Pelabuhan, Pengurus Harta Warisan, Kepala Gudang Batu bara, Sipir, pegawai sementara ditugaskan, dan Pengadilan Perdata dan Pidana.

Dalam tahun 1864 daerah Kuin dijadikan daerah istimewa, dengan pemerintahan: Controleur, Ronggo, Mufti, Penghulu, dan penjaga kas^{3 3}).

Pada tahun 1910, Pemerintah Hindia Belanda melaksanakan politik liberal dengan pengekstensifan tanah seberang maka membuka kemungkinan bertambahnya jumlah penguasa Belanda yang menghuni kota di Indonesia, sehingga timbul pula ke-

butuhan untuk menerapkan pembentukan pemerintahan kotapraja seperti yang berlaku di negeri Belanda. Kebutuhan itu nampak dalam peraturan desentralisasi tahun 1903 yang memungkinkan dibentuknya kotapraja (*gemeente*) setelah tahun 1905. Realisasi dari keinginan pembentukan pemerintahan kotapraja itu akhirnya berhasil diwujudkan^{3 4}).

Berdasarkan Surat Keputusan yang dicantumkan dalam *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* tahun 1919 Nomor 252, dibentuk *Gemeenteraad Bandjermasin*. Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 28 Mei 1919 nomor 6 ini berlaku mulai 1 Juli 1919, menyatakan beberapa hal antara lain:

- 1) Ibu kota keresidenan "Zuider en Doster afdeeling van Borneo", kota Banjarmasin dijadikan "Gemeente - Bandjermasin".
- 2) "Gemeente-Bandjermasin" diberi bantuan khusus uang f.43.500 tiap tahun.
- 3) Diberi tugas pemeliharaan, perbaikan pembaharuan, pembuatan jalan baru, penerangan jalan, pemadam kebakaran, kuburan dan sebagainya.
- 4) Untuk "Gemeente-Bandjermasin" dibentuk Dewan Gemeente dengan anggota-anggota 13 orang, yaitu terdiri atas golongan Indonesia mendapat kursi 4 orang, golongan Timur Asing mendapat kursi 2 orang, dan golongan Belanda mendapat kursi 7 orang. Anggota-anggota ditunjuk melalui pemilihan sesuai dengan situasi politik pada saat itu.

Dalam tahun 1930 perimbangan anggota-anggota *gemeente Raad* ini diubah menjadi 5 orang Eropah, 5 orang Bumi Putera, dan 3 orang Timur Asing^{3 5}).

Perkembangan kota Banjarmasin sejak tahun 1919 makin meningkat dari segala aspek, baik ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan. Akan tetapi perkembangan pembangunan kota

berlaku hanya bagi penduduk yang berada di wilayah pemukiman orang Eropa. Bangunan-bangunan mereka nampak teratur dan permanent. Pelayanan jalur jalan berkembang baik di daerah pemukiman orang Eropa, seperti jalan-jalan bersih, bioskop ramai, penerangan cukup untuk pusat keramaian orang kulit putih, dan ada tanda-tanda "Verboden toegang Voor Inlanders en Honden"³⁶). Bagi penduduk yang bermukim di luar pemukiman orang Eropa, daerah pemukiman penduduk bumi putera nampak tidak terkena peraturan itu, bangunan-bangunan Bumi Putera umumnya darurat, jalan-jalan tidak teratur dan terawat. Dalam bidang hukum berfungsi menyelesaikan masalah-masalah hukum orang Eropa, dan pengadilan bumi putera yang menata hukum adat, dan lainnya menyangkut penduduk bumi putera. Dalam berbagai hal adanya pemisahan antara Belanda (termasuk orang Jepang) Timur Asing dan Bumi Putera.

Dalam *gemeente* juga terjadi pembaharuan pemerintahan. Gemeente Banjarmasin ditingkatkan menjadi Stadsgemeente (Balai Kota) Banjarmasin, sesuai dengan putusan Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indie tanggal 17 Juni 1938 dan dimasukkan dalam lembaran negara Hindia Belanda dengan nomor 359, 1938. Anggota-anggota Dewan Gemeente tetap 13 orang. Kantor *Stads-Gemeente* masih menjadi satu dengan kantor Asisten Residen. Rencana pembangunan kota Banjarmasin yang disusun Ir. Karsten cukup ideal untuk modernisasi kota, tapi terhambat oleh birokrasi dan anggaran belanja yang kurang dan adanya tekanan lebih kepada "Vester-interestnya" golongan berkuasa.

Bentuk pemerintahan kota seperti di atas berlangsung terus hingga tahun 1942. Pada waktu daerah ini harus berpindah kekuasaan kepada Tentara Pendudukan Jepang, penataan pemerintahan kota belum dapat diketahui karena tidak dijumpai sumber yang dapat menceriterakannya. Dalam periode kemer-

dekaan tahun 1949, melalui bermacam-macam bentuk undang-undang dan peraturan serta Keputusan Presiden dan lain-lain, maka disebutkan dalam wilayah hukum Republik Indonesia melalui Undang-Undang No. 22 tahun 1948 – Yogyakarta Banjarmasin tetap menjadi ibu kota propinsi (daerah kota Besar) dan dibentuknya Badan Legislatif (DPRDS) dan eksekutif Kota Besar Banjarmasin.

2.4 Komposisi dan Mobilitas Penduduk

Pada awal abad ke-17 Banjarmasin memiliki kekuasaan militer 80.000 jiwa. Banjarmasin merupakan negara yang terkuat dan ditakuti. Karena itu Banjarmasin berhasil membendung pengaruh Tuban, Arosbaya dan Mataram, di samping mempunyai kekuasaan di daerah Kalimantan Timur, Tenggara, Tengah dan Barat serta penghasilan upetinya^{3 7}). Dari besarnya jumlah militer ini, diperkirakan militer banyak yang bermukim di pusat kerajaan yang pada waktu itu di Kuin Banjarmasin, karena penduduk Banjarmasin ditambah dengan anggota militer tidak kurang 18.000 jiwa. Perkembangan selanjutnya penduduk kota Banjarmasin tahun 1824 berjumlah 20.000 jiwa^{3 8}). Makin meningkat lagi sesudah 1865 penduduk kota Banjarmasin berjumlah 32.154 jiwa, dengan perincian jumlah orang Banjar sebesar 30.477 jiwa, sedang orang asing yang bermukim di Banjarmasin sebesar 1.677 jiwa.

Jika ketiga keterangan di atas dibandingkan, menunjukkan bahwa selama beberapa tahun (tahun 1670–1824–1865) terjadi pertambahan secara bertahap dengan perlahan yaitu pertambahan penduduk dari tahun 1670–1824 sebesar 2.000 jiwa atau 11,11% selama 54 tahun, rata-rata pertahunnya 37 jiwa, atau 0,20%. Pertambahan penduduk kota Banjarmasin dari tahun 1824–1865 sebesar 12.154 jiwa, atau 60,78%, rata-rata pertahunnya pertambahan penduduk kota Banjarmasin selama 41 tahun berturut-turut 296 jiwa atau 1,48%^{3 9}). Tentu saja angka ini tidak berdasarkan data yang konkrit, karena pada

masa itu sistem pencacahan penduduk masih sangat sederhana sekali (lihat tabel berikut).

**PERBANDINGAN PENDUDUK SEBELUM ABAD KE-20:
TAHUN 1670 – 1824 – 1965**

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Pertambahan Penduduk	Persen (%)	Persen (%) Pertahun
1.	1670-1824	18.000-20.000	2.000	11,11	0,20
2.	1824-1865	20.000-32.154	12.154	60,78	1,48

Pada awal abad ke-20, tahun 1905 tampak terjadi penurunan yang sangat tajam. Dari penduduk tahun 1865 yang berjumlah 32.154 jiwa, turun menjadi 16.708 jiwa, dengan perincian sebagai berikut: Bumi putera sebesar 12.684 jiwa, Eropa sebesar 455 jiwa, Cina sebesar 2.581 jiwa, Arab sebesar 910 jiwa, dan Timur Asing lainnya 78 jiwa^{4 0}).

Penduduk kota Banjarmasin tahun 1865-1905 cenderung turun sebesar 15.446 jiwa, atau 48,04%. Penurunan angka ini adalah akibat Perang Banjar 1859-1905, karena pengikut Antasari banyak yang ke luar kota mengikuti jejak pemimpinnya untuk melawan Belanda. Di samping itu adanya imigrasi, ekstern dan intern, terutama penduduk Banjar banyak yang pindah dan bermukim di Sumatera dan Malaysia^{4 1}).

Kemudian pada tahun 1919 penduduk kota Banjarmasin tercatat: Bumi Putera sebesar 41.661 jiwa, Arab dan India sebesar 1.373 jiwa, Cina sebesar 3.207 jiwa dan Eropa sebesar 752 jiwa. Jumlah penduduk kota Banjarmasin seluruhnya 46.993 jiwa. Pertambahan penduduk kota Banjarmasin antara tahun 1905-1919 sebesar 30.285 jiwa, atau 181,26%. Pertambahan ini menunjukkan pada suatu angka yang sangat drastis selama

14 tahun. Angka rata-rata pertambahan pertahunnya 2163 jiwa, atau 12,95%^{4 2}).

Pertambahan penduduk dalam kurun waktu tersebut, karena adanya kelahiran yang cukup tinggi dan juga disebabkan oleh urbanisasi saat itu. Banyak pendatang dari pedalaman masuk kota, ada karena tujuan mencari nafkah, menambah pendidikan, dan ada pula meninggalkan kampung halamannya karena masalah keamanan dan lain-lain.

Pada tahun 1930 telah diadakan pencacahan penduduk yang lebih cermat sesuai dengan teknologi modern pada saat itu penduduk kota Banjarmasin meningkat menjadi 56.346. Dalam tahun 1919-1930 terjadi pertambahan penduduk sebesar 9.353, atau 19,90%. Angka pertambahan penduduk pertahunnya selama 11 tahun 850 jiwa^{4 3}).

Kemudian pada tahun 1935 terjadi lagi peningkatan jumlah penduduk Gemeente Banjarmasin menjadi 75.050 jiwa, yang terdiri dari Bumi Putera sebesar 65.250 jiwa; Eropa sebesar 1.100 jiwa; Cina sebesar 5.920 jiwa; Timur Asing lainnya sebesar 1.730 jiwa.

Pertambahan penduduk dalam Gemeente Banjarmasin, yang terdaftar sebagai pembayar pajak perkepala keluarga ditujukan kepada Bumi Putera, sedangkan orang Eropa, Cina dan Timur Asing lainnya mempunyai ketentuan tersendiri. Karena itu sering dicantumkan oleh pencatat pajak dan pencacahan penduduk hanya orang Bumi Putera secara keseluruhan pertambahan penduduk Gemeente Bandjermasin antara tahun 1930-1935 sebesar 18.704 jiwa, atau 33,19% selama 5 tahun. Angka rata-rata pertahunnya penduduk Gemeente Bandjermasin 3.741 jiwa atau 6,64%^{4 4}).

Angka pertambahan penduduk pada abad ke 20, atau pada masa pemerintahan kolonial Belanda dari tahun 1905 sampai dengan 1935 atau selama 30 tahun lebih kurang sebesar 58.342 jiwa, atau persentase pertambahan penduduk Gemeente Banjar-

masin secara keseluruhan 349,19%. Angka rata-rata pertahunnya 1.945 jiwa, atau 11,64%. Angka ini menunjukkan pertambahan penduduk yang sangat luar biasa pada saat sekarang ini^{4 5}). Akan tetapi jika dilihat pada masa itu merupakan hal yang lumrah, sesuai pula dengan perbandingan luas Gemeente Banjarmasin lebih kurang 94.345 km².

Angka kepadatan penduduk. Gemeente Bandjermasin tiap kilometer persegi 0,80 orang (1 orang). Angka ini berarti suatu angka yang sangat rendah sekali jika dibandingkan dengan kota di pulau Jawa dan Bali.

CATATAN

- 1) EB. Masthoff "Aanteekeningan Omtrent de onderafdeeling Tabalong en Kloewa van Zuid en Ooster afd. van Borneo", *Indische Gids I* (1812), hal. 232.
- 2) H. Ramli Nawawi & Tamny Roeslan, *et.al.* (Tim), *Sejarah Sosial Daerah Kal-Sel*. Depdikbud, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek IDSN, Jakarta, 1984, hal. 2.
- 3) Yustan Aziddin *et.al.* (Tim), *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme Di Kalimantan Selatan*. Depdikbud. Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek IDSN, Jakarta, 1983/84. hal. 6.
- 4) H. Ramli Nawawi & Tamny Roeslan (Tim), *op.cit.* hal. 10.
- 5) Kalimantan Selatan dalam angka 1978, Kantor Sensus dan Statistik Propinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin, 1978. hal. 2
- 6) GLL. Kemmerling, *Topografische en Geologische Beschrijving van het Gebied van de Barito*, Tijdschrift, E.J. Brill, heiden, 1915, hal. 718.

- 7) Deppen, *Mengenal Kota Banjarmasin*. Kantor Deppen Kodya Banjarmasin, Banjarmasin, Tanpa tahun, hal. 5.
- 8) *Rencana Pembangunan Lima Tahun Kodya Banjarmasin*. Pemda Kodya Banjarmasin, Banjarmasin, tahun 1974, hal. 7.
- 9) Soeri Sairoto, "Berdirinya Kerajaan Banjarmasin suatu Tujuan Sosial Kultural", dalam *lembaran sejarah No. 6 Faksasdaya UGM*, Yogyakarta, 1978, hal. 127.
- 10) J.J. Ras., *Hikayat Banjar*. A. Study in Malay Historiography. s-Gravenhage. N.V. De Nederlandsche Bock en Steendrukkerij v/h. It. L. Smits, 1968, hal. 192.
- 11) Schrieke. B. *Indonesia Sociological Study*. part one, Van Hoeve Ltd, The Hage, Bandung, 1955, hal. 23.
- 12) M. Idwar Saleh, *Banjarmasih*. Depdikbud Museum Negeri Lambung Mangkurat Prop. Kal-Sel, Banjarbaru, 1982. hal. 30.
- 13) *Ibid.* hal. 31.
- 14) A.A. Bijuri, "Dinasti Surianata – Lambung Mangkurat", *Harian Utama*, Banjarmasin, 30 Agustus 1972, hal. 3.
- 15) M. Idwar Saleh, *Banjarmasin*. Balai Pendidikan Guru, Bandung, 1958, hal. 76.
- 16) *ibid.* hal. 97.
- 17) Arsip Nasional R.I., *Surat-Surat Perjanjian* antara Kesultanan Banjarmasin dengan pemerintah V.O.C. Bataafse Republik, Inggeris dan Hindia Belanda, 1635–1860, Jakarta, 1965. hal. 250.
- 18) *ibid.* hal. 228.
- 19) Soeri Soeroto, "Pergerakan Sosial dan Perang Banjarmasin", Seminar Sejarah Nasional II, Yogyakarta, 26–29 Agustus 1970. Lihat pula. Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia*, Depdikbud, Jakarta, 1983, hal. 48.

- 20) H. Ramli Nawawi dan Tamny Roeslan, et.al. (Tim), *Peta Sejarah*. Depdikbud, Banjarmasin, 1984 hal. 6.
- 21) M. Idwar Saleh, Banjarmasin, *op.cit.* hal. 34.
- 22) Encyclopaedie van Nederlandsche-Indie, 1917. hal. 374.
- 23) H. Ramli Nawawi dan Tamny Roeslan, et. al. (Tim), *Sejarah Sosial*, *op.cit.*, hal. 80.
- 24) *ibid.* hal. 81.
- 25) R. Broersma, *Handel en Bedrijf in Nuid en Oost Borneo*, G. NAEFF, s-Gravenhage, 1927. hal. 23.
- 26) M. Idwar Saleh, *Banjarmasih*, *op.cit.* hal. 60.
- 27) Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. U.I., Jakarta, 1970. hal. 174.
- 28) Amir Hasan Kiai Bondan, *Suluh Sejarah*. Percetakan Fajar, Banjarmasin, tanpa tahun, hal. 149.
- 29) Tamny Roeslan, Gerakan Muning, Sebuah Gerakan Sosial di dalam Perang Banjar (Thesis), Fakultas Sastra Budaya UGM, Yogyakarta, 1981. hal. 35–37;
- 30) ARSIP NASIONAL R.I., *op.cit.*, hal. 228.
- 31) M. Idwar Saleh, *op.cit.* hal. 43.
- 31) *ibid.* hal. 44.
- 32) Soerjono Soekanto, *Struktur Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta, 1983, hal. 138.
- 33) M. Idwar Saleh, *op.cit.* hal. 46.
- 34) Muh. Nur Baso, et.al. (Tim), *Sejarah Kota Besar Makassar/ Kodya Ujung Pandang, 1950–1979*. Depdikbud, Jakarta, 1984/1985, hal. 39.
- 35) M. Idwar Saleh, *op.cit.* hal. 36.
- 36) *ibid.* hal. 37.

- 37) L.C.D. van Dijk, *Nederlands Vruégste betrekkingen met Borneo, den Solo Archipel, Combidja, Siamen Cochinchina*. Tanpa penerbit. Amsterdam, 1862., hal. 7–8. Lihat pula M. Idwar Saleh, *op.cit.* hal. 31.
- 38) *Tijdschrift voor Nederlands Indie* I, 2. 1838, hal. 18.
- 39) Amir Hasan Kiai Bondan, *Suluh Sejarah Kalimantan*, Fajar, Banjarmasin, tanpa tahun, hal. 33.
- 40) R. Broersma, *Handel en Bedrijf in zuid en Oost Borneo*. Gravenhage 1927. hal. 15.
- 41) H. Ramli Nawawi dan Tamny Roeslan, *et.al. op.cit.*, hal. 13.
- 42) M. Idwar Saleh, Banjarmasin, *op.cit.* hal. 37.
- 43) J. Eisenberger, "Algemeene Memorie Betreffende de Onder Afdeeling Bandjermasin – Marabahan in de Afdeeling Bandjermasin der Residentil Zuider en Ooster Afdeeling van Borneo", *ARSIP NASIONAL R.I.*, 15 Juni 1936, hal. 44.
- 44) *ibid.*, hal. 45.
- 45) Ny. MAFTUCHAN YUSUF, *Pengaruh Timbal Balik Antara Kependudukan Dengan Berbagai Aspek Kehidupan Manusia*. Fak. Pasca Sarjana IKIP Jakarta Bekerja Sama Dengan BKKBN, Jakarta, 1985. hal. 17–18.

BAB III KOTA DAN LINGKUNGAN

3.1 Pemekaran Kota Sesudah Tahun 1950–1979

Secara geografis, Kota Banjarmasin makin berkembang sesuai dengan keadaan zaman. Kota Banjarmasin, pada awalnya berpusat di Kuin Cerucuk, dengan hadirnya bangsa Belanda dalam bidang perdagangan, lambat laun pusat kota dan pemerintahan berpindah ke Pulau Tatas. Tentunya sejalan dengan politik kolonisasi pemerintah Belanda. Di pulau ini Belanda membangun sebuah benteng yang disebut Fort Tatas. Pulau Tatas terletak di sebuah delta Sungai Barito sekarang dibatasi oleh Sungai Barito, Sungai Martapura, Sungai Antasan Kecil dan Sungai Kuin.

Pulau Tatas mula-mula disewakan kepada Belanda pada tahun 1747. Di atas pulau ini didirikanlah perkantoran atau loji. Pada tahun 1756 didirikan benteng kayu. Benteng menjadi penting sekali sesudah tahun 1787. Benteng ini menjadi pusat pemerintahan dan kekuasaan Belanda di daerah yang diserahkan oleh Sultan yang memegang kekuasaan Kerajaan Banjar. Fort Tatas menjadi simbol kekuasaan dan berkembangnya penjajahan Belanda atas Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan

Kalimantan Tengah sampai dengan 29 Desember 1942, dan NICA sampai tahun 1949. Sebagai bangunan bersejarah di daerah Kalimantan Selatan, benteng ini telah dihancurkan untuk digantikan dengan Masjid Raya Sabilal Muhtadin, dan lenyap dari pengamatan generasi yang akan datang¹).

Sebagai titik sentral Fort Tatas dikelilingi oleh bangunan-bangunan perumahan-perumahan, gedung-gedung, pusat-pusat perbelanjaan, pertokoan, kantor-kantor, museum, bar dan restaurant, hotel-hotel, bioskop, teater, dan balai kotapraja. Jaringan lalu lintas juga berpusat pada titik tersebut dan menyebar ke segala arah.

Sesudah tahun 1950-an, pemekaran kota Banjarmasin makin meningkat, seiring dengan padatnya pemukiman di pusat kota. Angka kelahiran meningkat, sedangkan angka kematian menurun sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan pegawai kesehatan dan pengertian masyarakat. Di samping itu gelombang urbanisasi mengalir terus masuk ke kota dari pedalaman, karena gangguan gerombolan Ibnu Hajar (1900–1961), sedang sebagian lagi untuk mencari nafkah dan melanjutkan studi.

Pertambahan penduduk dengan areal pemukiman yang tidak berimbang, mengakibatkan timbulnya distribusi wilayah ke luar titik sentral. Penyebaran penduduk, maka terjadi pada aktivitas-aktivitas khusus yang kemudian menempati wilayah-wilayah tertentu²).

Pemekaran kota Banjarmasin sebelum Repelita pertama tidak serasi, karena pemerintah belum menangani secara serius terhadap perumahan dan pembangunan kota. Kondisi politik dan keamanan di Kota Banjarmasin pada saat itu belum stabil.

Pada tahun 1950–1969 di pinggiran kota sebelah Utara terbentang jalan Belitung ± 400 meter arah ke sungai Barito dan terhenti. Pada tikungan arah ke Utara lagi bertemu jalan Kuin. Pada tikungan ini dibangun Pertamina sebagai persediaan minyak untuk Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Jalan Kuin ini terbagi dua oleh Sungai Kuin sendiri, karena itu disebut Kuin Utara dan Kuin Selatan. Pada bagian lain terdapat pula Kampung Alalak yaitu Alalak Utara dan Alalak Selatan. Keduanya adalah perkampungan rakyat yang penempatan rumahnya tidak teratur.

Pada tahun 1970–1979 makin berkembang lagi pembangunan terutama pemukiman dan seiring dengan itu jalan-jalan diperlebar dan diperpanjang arah ke Barito Kuala. Di sini ditemukan jalan Kayu Tangi yang sekarang diganti namanya menjadi Jalan Brigjen H. Hassan Basri. Di kiri dan kanannya dibangun pemukiman Kayu tangi I dan II sebagai realisasi dari proyek perumahan rakyat. Gedung-gedung juga dibangun pada jalan ini seperti gedung Universitas Lambung Mangkurat, Rumah Sakit Jiwa dan SPSA.

Ke sebelah selatan berkembang pembangunan rumah-rumah rakyat yang umumnya tidak teratur dan berdempet-dempet seperti daerah Kelayan, dan Pemurus. Arah ke Hilir Sungai Martapura ditemukan Kampung Mantuil di pertemuan Sungai Barito dan Martapura. Antara Mantuil dan Banjarmasin ada dibangun beberapa industri kayu lapis, industri kapal layar dan dok-dok kapal terutama di tepian Sungai Martapuranya³).

Di sebelah timur, daerah ini termasuk padat penduduknya. Bagian ini termasuk pusat kota pada masa Kerajaan Banjar, dan berseberangan dengan pusat pemerintahan Kalimantan Selatan. Pembangunan tidak banyak, tetapi penambahan perumahan penduduk makin padat. Tetapi bangunan pemerintah bertambah dengan perumahan ABRI di Kompleks A. Yani dan bertambahnya pasar di kompleks ini. Demikian pula adanya jalan tembus antara Jalan Veteran dan Jalan A. Yani sebagai jalan protokol yaitu Jalan Gatot Subroto. Pembangunan pada jalan Gatot Subroto berhubung dengan pusat, karena di tepi jalan dibangun rumah-rumah gedung dan gedung-gedung kantor. Arah ke dalamnya baik kiri dan kanan perumahan elite baru pada masyarakat Banjar.

Di sebelah barat banyak berkembang perumahan rakyat dan buruh-buruh yang tidak teratur. Di samping itu dibangun beberapa gedung dan tower, pelabuhan Tri Sakti dan industri-industri kayu.

Pemekaran kota berbarengan dengan pengkaplingan dan pembagian pemilikan tanah. Tanah-tanah pinggiran kota di desa berproses ke tanah kota, terdapat pemisahan hak, dan sekali tercapai, pola-pola pemisahan tanah di wilayah kota timbul secara menyolok.⁴⁾ Dalam proses ini pemilikan tanah yang besar di Banjarmasin menjadi merosot dan pemilik tanah kecil menjadi meningkat. Ketika pemekaran kota ke arah pinggiran, mulanya terjadi pengkaplingan tanah. Karena itu pembagian tanah selalu mendahului pemekaran kota.⁵⁾

Pemekaran Kota Banjarmasin jika kita tinjau dari sudut sosial, politik, dan ekonomi maka sangat erat kaitannya dengan unsur-unsur keperluan hidup masyarakatnya sehari-hari dan juga dengan mata pencaharian penduduknya.

Dari segi sosial, dapat kita hubungkan dengan kegiatan kota yang merupakan tempat yang serba majemuk, seperti: Tempat hiburan, bioskop, pasar, pertokoan, pabrik, industri, jalanan yang penuh dengan mobil, pendidikan dan lain-lain sebagainya.

Dengan adanya pemekaran kota, maka jadilah kota sebagai tempat untuk mencari usaha-usaha bagi kehidupan sehari-hari. Hal ini tentunya meningkatkan tarap hidup masyarakatnya. Kota menyediakan sarana hiburan seperti Arjuna Plaza, bioskop dan lain-lain.⁶⁾ Kotamadya Banjarmasin yang semakin mekar, membawa akibat yang sudah tentu mempunyai dampak, baik positif maupun negatif.

Adapun pengaruh yang positif jika ditinjau dari sudut sosial, yaitu:

- 1) Kota semakin semarak oleh kemegahan gedung-gedung dan semakin ramai.

- 2) Pendidikan masyarakat semakin tinggi tarafnya, dengan adanya Universitas Lambung Mangkurat, sebagai satu-satunya perguruan tinggi negeri di daerah ini.
- 3) Dengan mekarnya Kota Banjarmasin, maka taraf hidup rakyat semakin tinggi, sebab mudah mencari usaha sebagai hasil dari pembangunan yang kian meningkat.
- 4) Sarana jalan atau perhubungan semakin banyak untuk keperluan distribusi, dan lain-lain.

Semua kebaikan dari sudut sosial di atas, akan berlawanan sekali jika diungkapkan segi negatifnya, yaitu:

- 1) Dengan majunya Kota Banjarmasin yang dimekarkan, maka tingkat kebutuhan masyarakat semakin bertambah, sehingga memerlukan biaya hidup yang tinggi, sedangkan pemekaran kota tidak menjamin bahwa usaha dan kesempatan kerja selalu ada, sehingga akibatnya timbul berbagai penyimpangan hukum dan moral seperti: penodongan, perampokan, Wanita Tuna Susila, dan lain-lain sebagainya.
- 2) Dengan banyaknya hiburan di Kota Banjarmasin, maka sedikit banyaknya menggeser nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat. Jika dulu sebelum tahun 1950, sifat kegoongroyongan masih banyak dijumpai, namun sesudah itu ada gejala kian menipis.

Kota Banjarmasin semakin padat, dan rumah-rumah penduduk semakin sesak. Ditinjau dari sudut sosial, hal ini sangat rawan jika terjadi kebakaran yang memang sering melanda kota ini. Tidak terlepas dari padatnya penduduk adalah masalah sampah dan bekas barang-barang keperluan penduduk. Tapi yang sangat meresahkan adalah banyaknya WTS, baik yang nyata ataupun terselubung. Padahal penduduk kota Banjarmasin dikenal sebagai orang yang taat beragama Islam. Masalah yang lebih rumit lagi adalah banyaknya angkatan kerja yang me-

nganggur, sebab lowongan kerja yang tadinya kosong telah terisi oleh pencari kerja lainnya.

Jelaslah bahwa jika dilaksanakan pemekaran kota, di samping ada kebaikannya berarti pula ada keburukannya. Sedangkan yang menerima akibatnya adalah masyarakat juga.

Jika kita tinjau dari sudut politik, pemekaran kota Banjarmasin ada juga dampaknya. Dengan adanya berbagai golongan masyarakat dan suku bangsa menjadi warga kota ini, maka secara tidak langsung akan memudahkan terjadinya pembauran, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa yang kita kehendaki akan lebih kokoh. Di samping itu pula, dengan adanya pembauran sedikit banyaknya menimbulkan akulturasi kebudayaan daerah masing-masing.

Aspek lainnya dari pemekaran kota Banjarmasin dapat diartikan sebagai usaha pemerintah untuk meningkatkan kemajuan yang merata di seluruh wilayah Indonesia, yang mempunyai 27 propinsi, yang berarti juga 27 ibu kota propinsi, dan salah satunya ialah propinsi Kalimantan Selatan dengan ibu kotanya Banjarmasin.⁷⁾

Kota Banjarmasin merupakan tempat pusat kegiatan administrasi pemerintahan, sehingga dengan adanya pemekaran akan dapat menyusun struktur kota, sebagaimana dalam tahun 1961-1962, maka pembangunan diarahkan pada pertokoan.⁸⁾ Dengan adanya usaha ini, maka secara politik suasana kota yang dulunya semraut dan tidak teratur, akan mudah ditata baik bentuk maupun letaknya, sehingga kota akan kelihatan teratur, bersih dan nyaman.

Dari segi ekonomi letak yang strategis menjadikan kota Banjarmasin memegang peranan penting dalam pembangunan perekonomian dan kelancaran roda pemerintahan dari daerah-daerah hinterlandnya.

Adanya dua pelabuhan dalam daerah Tingkat II Banjarmasin yakni pelabuhan pantai yang terletak di sungai Marta-

pura dan pelabuhan Samudera/pelabuhan ekspor yang terletak di Sungai Barito, menjadikan kota Banjarmasin sebagai pusat perdagangan dan kota pelabuhan utama bagi daerah-daerah Kalimantan Selatan dan sekaligus pula sebagai pelabuhan transit untuk daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Prospek pembangunan ekonomi Kalimantan Selatan akan menjadikan kota Banjarmasin sebagai sentral ekonomi yang utama.

Daerah-daerah produsen yang menunjang kota Banjarmasin dalam kedudukannya sebagai sentral ekonomi utama adalah Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala dan kabupaten-kabupaten di Hulu Sungai. Hubungan kota Banjarmasin sebagai daerah sentral ekonomi utama dengan daerah penunjangnya dapat dilakukan baik melalui darat maupun melalui sungai yang kondisinya memadai.

Adanya kota Banjarmasin sebagai pusat perdagangan seperti disebutkan di atas adalah pengaruh dari pemekaran kota, sehingga perekonomian di kota ini semakin berkembang dengan pesat dari tahun ke tahun.⁹)

Mata pencaharian penduduk umumnya adalah berdagang, jadi pegawai, memburuh, sebagian petani dan nelayan. Karena itu pemekaran kota Banjarmasin jika ditinjau dari sudut ekonomi sangat tepat sekali, karena akan menambah sarana bagi kepentingan masyarakat.

Jika kita tinjau dari sudut ekonomi pemekaran kota Banjarmasin sangat erat kaitannya dengan segi sosial dan politik. Dampak negatif dari segi sosial sebenarnya merupakan akibat dari faktor ekonomi.¹⁰) Segi-segi yang berhubungan antara pemekaran kota Banjarmasin dengan ekonomi adalah:

1) Pertokoan

Toko-toko yang teratur mempermudah para pembeli untuk mencari barang keperluannya, dengan demikian akan menguntungkan bagi pedagang.

2) Pasar

Dengan semakin bertambahnya lokasi pasar, akan membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin berusaha atau bekerja dengan berdagang. Hal ini merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya.

3) Distribusi

Dengan adanya ketertiban hasil pemekaran kota di Banjarmasin ini, maka hal itu mempermudah pemerintah untuk mengawasi barang-barang yang akan disalurkan oleh produsen, sehingga tidak terjadi apa yang dikenal istilah "Barang Selundupan". Adapun kaitannya dengan perhubungan ialah agar saluran lalu lintas penyampaian barang dari produsen ke konsumen dapat sampai dengan lancar. Hal ini erat kaitannya dengan sarana transportasi.

4) Tempat hiburan dan bioskop

Tempat hiburan dan bioskop juga berkaitan erat dengan lajunya pembangunan di daerah Kotamadya Banjarmasin, khususnya di bidang ekonomi, karena keduanya dapat dijadikan usaha.

5) Perumahan

Karena tingkat ekonomi masyarakat terlalu rendah, sehingga banyak rumah-rumah penduduk yang layak disebut gubuk, tidak teratur dan berlapis-lapis, sehingga mempersulit tujuan pemekaran kota yang diharapkan, yakni kota bersih, indah, teratur dan nyaman.

6) Terminal taksi kota dan parkir sepeda motor

Taksi kota sangat diperlukan oleh masyarakat, sehingga merupakan usaha yang baik bagi para sopir, maka agar ada keteraturan sepantasnyalah terminal taksi kota tersebut dibangun. Sedangkan parkir sepeda motor juga tidak kalah pentingnya untuk kepentingan pengendara sepeda motor.¹¹⁾

Kesemua segi di atas dapat menambah pendapatan masyarakat yang dengan sendirinya juga menguntungkan Pemerintah

Daerah, melalui pajak atau iuran yang diedarkan, baik yang sifatnya bulanan ataupun juga mingguan dan harian.

Pemekaran kota Banjarmasin ini sangat erat kaitannya dengan kepentingan pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dan masyarakat merupakan dua komponen yang tak terpisahkan dalam melaksanakan pemekaran kota Banjarmasin ini. Sudah sewajarnya pemerintah menetapkan peraturan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat, sehingga tidak menggelisahkan ataupun meresahkan masyarakat tersebut. Berkaitan dengan itu pula masyarakat sudah sepantasnya menaati dengan penuh kesadaran atas peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintahnya. Dengan bekerjasamanya dua komponen tersebut, maka pemekaran kota Banjarmasin dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga gedung-gedung, baik untuk pemerintahan ataupun hiburan serta pertokoan dapat dibangun, dan juga sarana jalan untuk kepentingan perhubungan semakin teratur.

3.2 *Pertumbuhan Pemukiman-pemukiman dan Perbaikan Perkampungan*

Sampai tahun 1979 penduduk Banjarmasin berjumlah: 381.286. Luas per Km² 72. Kepadatan penduduk Banjarmasin per Km² 5.296. Dari kenyataan-kenyataan jumlah penduduk di Banjarmasin yang banyak itu, maka setelah rumah penduduk disusun, mereka menempati rumah yang terdiri dari:

Rumah tunggal	: - Tak bertingkat	: 46.975	
	- Tingkat	: 2.247	
			+ -----
			49.222
Rumah Kopel	: - Tak bertingkat	: 3.787	
	- Tingkat	: 291	
			+ -----
			4.078

Rumah gandeng berjumlah 4.286 dan jumlah keseluruhan rumah adalah 57.586. ¹²⁾

Pertumbuhan pemukiman penduduk di Kotamadya Banjarmasin antara tahun 1965 sampai 1979 sudah sangat pesat dan menimbulkan permasalahan yang rumit yang dihadapi oleh pihak Pemerintah Daerah dan bagi kita semua yang menyadari akan pentingnya lingkungan yang sehat, indah dan teratur.

Pemukiman penduduk di Kotamadya Banjarmasin kalau kita amati dalam peta pemukiman sekitar tahun 1965 masih sangat jarang sekali dan belum menjadi masalah yang serius bagi Pemerintah yang mengaturnya dan bagi keindahan kota ini.

Penduduk Kotamadya Banjarmasin sekitar tahun 1965 masih sangat sedikit dan hal ini tidak menjadi masalah dalam memukimkan penduduknya. Di Banjarmasin wilayah-wilayah yang dijadikan penduduk sebagai tempat tinggal sekitar tahun 1960-an terutama daerah-daerah yang dekat dengan jalan raya dan masih banyak sawah-sawah pasang surut di luar kotamadya Banjarmasin. ¹³⁾

Kita lihat saja misalnya, di sekitar jalan Sutoyo dan Pembangunan, sekitar tahun 60-an masih jarang sekali rumah-rumah penduduk dan di sana-sini masih leluasa untuk melepaskan pandangan baik ke kiri maupun ke kanan. Tetapi sekarang keadaannya sudah sangat jauh berbeda. Rumah-rumah yang satu saling berhimpitan dengan yang lain, dan ini karena jumlah penduduk yang meningkat dengan drastis tanpa diimbangi dengan pemukiman yang layak dan memadai.

Mereka yang datang ke Banjarmasin tidak hanya orang dari Hulu Sungai dan Kalimantan Tengah, tetapi juga orang-orang dari Jawa yang bermigrasi ke sini dengan membawa keluarganya. Hal inilah yang menimbulkan problem kependudukan, terutama masalah rumah sebagai tempat tinggal.

Kalau dahulu satu rumah hanya ditempati satu keluarga, tetapi sekarang satu rumah kemungkinan bisa ditempati dua

atau bahkan tiga kepala keluarga. Mereka tidak memperhitungkan apakah rumah mereka memenuhi syarat untuk didiami oleh sekian banyak orang atau faktor lain yang menjadi masalahnya, misalnya orang Banjar kebanyakan tinggal di rumah yang besar yang didiami oleh beberapa kepala keluarga dan ini karena menuruti adat orang Banjar yaitu bubuhan yang menjadi ciri khas dari mereka.¹⁴⁾

Kita ambil contoh lagi, misalnya di sekitar Banjar Raya yang dulunya belum banyak didiami oleh penduduk, sekarang penuh dengan bangunan-bangunan liar dan semrawut yang saling berhimpitan satu sama lainnya. Hal ini disebabkan meningkatnya jumlah penduduk akibat migrasi atau urbanisasi.

Di daerah sekitar Plimer atau Tri Sakti pun sekarang juga penuh dengan berjejal-jejalnya rumah. Secara tidak sengaja mereka mendirikan rumah-rumah karena mengikuti kawan-kawannya, karena ingin rumah yang mempunyai tetangga, padahal daerah itu daerah yang kurang sehat bila dipandang dari segi kesehatan.

Daerah lain yang menjadi tempat pemukiman penduduk yang berjubel adalah daerah Kelayan. Dahulu tidak begitu banyak perumahan yang didirikan di situ, tapi tahun 70-an ke atas rumah-rumah di sekitar Kelayan sudah mulai agak rapat antara yang satu dengan yang lain.¹⁵⁾

Penduduk mendirikan rumah-rumah di sini memilih daerah mudah transportasinya, yaitu di pinggir sungai Martapura dan anak cabangnya. Penduduk Kotamadya Banjarmasin kian tahun kian bertambah banyak dan sejalan dengan itu maka kebutuhan akan perumahan bertambah meningkat. Mereka yang tidak memiliki tanah untuk mendirikan rumah terpaksa mendirikan rumah di daerah-daerah yang seharusnya tidak boleh didirikan bangunan apa pun karena daerah itu dijadikan alur lalu lintas air, yaitu untuk jukung dan klotok. Setelah sebagian daerah sungai tadi dijadikan perumahan oleh penduduk, maka alur lalu lintas air otomatis terganggu.

Seperti telah kita ketahui bahwa baik wilayah yang ada di Kecamatan Banjar Barat, Timur, Selatan dan Utara sekarang ini banyak daerahnya yang dijadikan areal perumahan oleh Pemerintah Daerah guna memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi warganya. Di antara empat kecamatan yang ada di Banjarmasin paling banyak dan paling padat penduduknya adalah Kecamatan Banjar Barat, namun kecamatan ini wilayahnya paling sempit bila dibandingkan dengan tiga kecamatan lainnya. Hal ini berarti tanah yang dijadikan tempat perumahan sangat sempit dengan penduduk yang padat.¹⁶⁾

Dalam mengusahakan perumahan bagi warganya, pihak Pemerintah Daerah Banjarmasin sedikit demi sedikit membangun beberapa proyek perumahan, misalnya membangun perumahan yang sehat dan sederhana untuk mereka yang belum mempunyai sendiri. Bagi penduduk yang belum mempunyai rumah mereka menyewa rumah dengan sistem kontrakan atau membeli secara kredit. Hal ini menambah beban mereka sehingga bertambah berat.

3.3 Penduduk dan Mobilitas Penduduk

Dari tahun 1935 sampai tahun 1950 Penduduk Kotamadya Banjarmasin sebesar 75.050 sampai tahun 1950, tapi tahun 1960 belum diketahui pasti, karena pada masa itu sensus penduduk belum diadakan. Kemudian tahun 1961 sensus penduduk telah dilakukan secara teliti.¹⁷⁾ Secara keseluruhan tahun 1935–1961, atau selama 26 tahun meningkat dari 75.050 menjadi 214.096 jiwa, yang berarti kenaikan 139.046 jiwa atau 185,27%. Rata-rata per tahunnya penduduk Kotamadya Banjarmasin sebesar 5.348 jiwa, atau 7,13%. Kenaikan penduduk yang amat tinggi ini disebabkan oleh karena urbanisasi dari pedalaman/desa ke kota, dengan tujuan mencari nafkah, menambah pendidikan, dan ada pula yang meninggalkan kampung halamannya karena gangguan keamanan dari KRJT dengan Ibnu Hajarnya.

Pada tahun 1935, jumlah penduduk Kotamadya Banjarmasin 235.553 jiwa. Ini berarti jumlah penduduk kota Banjarmasin meningkat 21.475 jiwa, atau sebesar 9,11% selama 5 tahun. Angka rata-rata setiap tahunnya berjumlah 4.291 jiwa, atau sebesar 1,83%.¹⁸⁾ Jumlah ini menunjukkan bahwa penelitian atau sensus penduduk pada tahun 1961-1965 dilakukan dengan cermat. Sedangkan periode sebelumnya pencatatan belum ada dan yang ada pada zaman kolonial tahun 1935-an adalah merupakan pencatatan yang sepihak, karena obyeknya diutamakan untuk bumi putera yang nantinya dipergunakan sebagai ukuran pajak kepala. Bagi mereka, bangsa Belanda, Jepang, dan Timur Asing lain hal ini tidak mereka berlakukan. Di samping itu arus urbanisasi berkurang karena keamanan di daerah juga stabil dan petani aktif kembali mengerjakan lahan-lahannya di pertanian. Pada saat itu sudah diperkenalkan tentang Keluarga Berencana.

Dalam tahun 1968, penduduk Kotamadya Banjarmasin berjumlah 252.288 jiwa.¹⁹⁾ Antara tahun 1965 sampai tahun 1968 terjadi kenaikan penduduk sebesar 16.735 atau sebesar 7,72% selama 3 tahun, angka rata-rata pertahunnya sebesar 5.578 atau sebesar 2,21%. Angka menunjukkan naik dari 1% berarti rata-rata tahun sebelumnya sebesar 0,38%. Kenaikan ini terjadi karena arus urbanisasi dan pemekaran kota, dan yang utama bertambahnya angka kelahiran, dan berkurangnya angka kematian.

Angka ini dapat dipertahankan tanpa mengalami kenaikan yang menyolok, pada tahun 1973. Pada tahun 1973 penduduk Kotamadya Banjarmasin meningkat menjadi 293.801 jiwa.²⁰⁾ Dengan demikian kenaikan jumlah penduduk dari tahun 1968 sampai dengan 1973 atau selama 5 tahun sebesar 41.513 atau sebesar 14,12%. Angka rata-rata pertahunnya sebesar 8.303 jiwa, atau 2,82%. Kenaikan rata-rata selama 5 tahun sebesar 0,61% dari tahun sebelumnya.

Kenaikan jumlah penduduk tersebut selain karena faktor-faktor di atas, penyebabnya yang dominan adalah karena ber-

tambahnya pemukiman-pemukiman baru, baik yang swasta yang telah direncanakan oleh pemerintah, usaha masyarakat sendiri, maupun dari pemerintah sendiri. Dari fasilitas ini banyak yang mulanya berasal dari daerah mengambil rumah kredit pada pemukiman baru di Kotamadya Banjarmasin. Walaupun demikian kenaikan itu masih relatif rendah.

Pada tahun 1978, penduduk Kotamadya Banjarmasin berjumlah 325.305. Berarti kenaikan penduduk selama 5 tahun besarnya 31.504, atau sebesar 9,68%. Angka rata-rata pertahunnya 6.301, atau sebesar 1,94%.^{2 1)}

Di sini tampak terjadi penurunan dari rata-rata 2,82%, turun menjadi 1,94%. Berarti angka rata-rata penurunan penduduk Kotamadya Banjarmasin sebesar 0,88%.

Penurunan jumlah kenaikan penduduk tersebut selain sebab-sebab seperti disebutkan di atas, juga karena keberhasilan pemerintah yang pada tahun 1977/1978 mengintensifkan pengelolaan program Keluarga Berencana Nasional di Kalimantan Selatan, khususnya Kotamadya Banjarmasin. Dengan meningkatnya peserta KB aktif dan KB baru, maka angka kenaikan penduduk dapat ditekan. Tentu saja terjadi pula migrasi intern dan ekstern, yang menyebabkan persentasi kenaikan dan penurunan itu dapat bervariasi (lihat tabel berikut).

**PENDUDUK KOTAMADYA BANJARMASIN
TAHUN 1935 – 1978**

No.	Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Kenaikan Penduduk	%	Tahun	Jumlah Rata-rata Pertahun	% Rata-rata Pertahun
1.	1935	75.050	—	—	—	—	—
2.	1961	214.096	139.046	185,27	26	5348	7,13
3.	1965	235.553	21.457	9,11	5	4297	1,83
4.	1968	232.288	16.735	7,72	3	5578	2,21
5.	1973	293.801	41.513	14,12	5	8303	2,82
6.	1978	325.305	31.504	9,68	5	6301	1,94

Perkembangan kota dengan arus urbanisasi sangat erat sekali kaitannya. Semakin banyak sarana yang dibangun oleh pemerintah atau dari pihak swasta, baik berupa sarana hiburan maupun lapangan pekerjaan, semakin banyak pula arus urbanisasinya.

Salah satu sebab dari timbulnya urbanisasi ini, ialah adanya tekanan penduduk yang terjadi di daerah asal yang mengakibatkan sejumlah penduduk mengalir ke kota, yang dipandang oleh mereka memungkinkan untuk dapat memberi kesempatan sosial ekonomi yang lebih baik. Dengan demikian arus urbanisasi akan mempengaruhi pertumbuhan kota secara langsung. Yang kami maksud dengan tekanan penduduk di atas tadi adalah suatu keadaan di mana sumber-sumber penghidupan yang ada di suatu tempat sudah mulai sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari secara wajar.

Arus urbanisasi yang terbanyak mengalir ke Kota Banjarmasin adalah dari Hulu Sungai^{2 2}). Penyebabnya adalah sebagai berikut:

- 1) Karena sebagian tanah pertanian di sana tidak memungkinkan untuk mencapai kehidupan yang diinginkan.
- 2) Karena lalu lintas cukup baik, meskipun sekitar tahun limapuluhan sarana angkutannya, terutama angkutan daratnya sedikit sekali. Baru sekitar tahun 1965 ke atas sarana angkutannya semakin maju.
- 3) Disebabkan oleh tingkat pertumbuhan penduduk di daerah itu cukup tinggi, sehingga untuk mencari lapangan pekerjaan yang cukup sulit. Akibatnya pembangunan untuk perkembangan kota Banjarmasin harus berpacu dengan mobilitas penduduk kota yang kian melaju, agar dapat menyediakan sarana-sarana kebutuhan penduduk kota yang selaras dengan pertumbuhan penduduk kota yang ada.

Namun pada kenyataannya pembangunan sarana-sarana kota yang selalu tidak dapat mengimbangi pertumbuhan pen-

duduk akibat arus urbanisasi yang cukup tinggi, sekalipun pemerintah daerah bersama-sama pihak swasta masih mampu menyediakan sarana-sarana kebutuhan untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk tersebut. Tetapi hal ini nampaknya hanya akan memancing arus urbanisasi yang lebih deras lagi.

Pada prinsipnya ada dua faktor yang menyebabkan urbanisasi, yaitu:

1) Push Faktor (daya pendorong)

Pada umumnya yang menyebabkan timbulnya urbanisasi adalah terdorong oleh keadaan sosial seseorang di tempat asalnya. Misalnya: sempitnya lapangan kerja di daerah asal seseorang itu, untuk mencari lapangan pekerjaan terpaksa pergi ke kota yang dianggap mempunyai banyak kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang cukup baik. Dan juga pendidikan yang terbatas di daerah asal menyebabkan seseorang harus pindah ke kota untuk dapat menuntut ilmu yang lebih tinggi dan lebih baik.

2) Pull Faktor (daya penarik)

Perpindahan penduduk ke kota karena adanya gambaran kehidupan yang lebih menarik. Misalnya: Kota dianggap lebih menarik karena adanya fasilitas transportasi, pendidikan, penerangan, tempat-tempat rekreasi, kesempatan kerja yang bagus dan hasil yang baik.

Akibat mengalirnya urbanisasi dari pedesaan ke kota maka penduduk Kotamadya Banjarmasin menjadi padat. Bagi mereka yang tidak beruntung mengadu nasib di kota akan tergelincir ke dalam kehidupan miskin sedangkan kembali ke desa mata pencaharian susah.

Akibat dari hal ini pulalah di kota akan bertambah kelompok orang-orang yang tidak mempunyai mata pencaharian tetap sehingga menimbulkan atau menambah pengangguran, pengemis, tunawisma,^{2,3}) Hal tersebut terutama terlihat pada

pengangguran dan kehidupan tidak menentu atau tidak.punya penghasilan akan mendorong kepada tindak kejahatan.

Perumahan adalah salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang oleh pemerintah dengan dukungan pengusaha Real Estate telah berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap perumahan ini. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk menikmati perumahan yang memenuhi norma sosial, dan kesehatan. Untuk memenuhi keperluan ini maka perlu diatur perpindahkn penduduk ke pemukiman baru dan dengan harga rumah yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Dasar dari landasan pembangunan Kotamadya Banjarmasin adalah rencana Garis Besar (Out Line Plan) yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kotamadya Banjarmasin Tanggal 17 Agustus 1973 No. 9/DPRD – KPTS/1973.^{2 4}) Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Daerah Kotamadya Banjarmasin pada tahun 1978 bekerjasama dengan Universitas Gajahmada Yigyakarta menyusun rencana induk Kotamadya Banjarmasin yang dalam pelaksanaannya mengalami hambatan, sehingga dalam penyusunannya rencana induk Kotamadya Banjarmasin tersebut masih belum selesai.^{2 5}) Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah sekarang sangat pesat melaksanakan pembangunan perumahan rakyat, yang didukuñg pula oleh masyarakat pengusaha baik secara terorganisasi atau perorangan.

Faktor-faktor utama yang menyebabkan timbulnya masalah perumahan di Kotamadya Banjarmasin antara lain:

- 1) Prosentasi pertambahan penduduk yang cukup tinggi.
- 2) Mahalnya biaya pembangunan perumahan, satu dan lain hal berhubungan dengan kondisi daerah yang banyak rawa.
- 3) Kemampuan penduduk yang relatif rendah, untuk memahami biaya kehidupan kota yang cukup tinggi.

Usaha-usaha dalam rangka pengadaan fasilitas perumahan yang memenuhi kebutuhan rumah sehat bagi warga kota oleh

pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin antara lain meliputi:

- 1) Penyediaan fasilitas untuk pemenuhan kebutuhan rumah sehat bagi warga kota.
- 2) Penertiban dan pembinaan usaha Real Estates.
- 3) Mengefektifkan pelaksanaan peraturan daerah di bidang bangunan perumahan.

Hal ini terutama dititikberatkan pada usaha pemekaran kota dan penertiban penyebaran penduduk serta penertiban dan pengendalian perkembangan penduduk dan penyempurnaan sistem registrasi dan pengolahan data statistik penduduk. Dalam hubungan ini perlu usaha mengintensifkan pengendalian dan pengawasan penduduk tiap-tiap wilayah serta meningkatkan hubungan kerja sama dengan instansi pemerintah lainnya.²⁶⁾

Penyebaran penduduk ke pemukiman baru di Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin adalah suatu pengembangan yang mengatur tata ruang fisik kampung dengan memperhatikan tata masyarakatnya, sehingga tercapai tingkat perkembangan kota/kampung yang optimal, efisien, tertib dan aman.²⁷⁾ Tata ruang fisik kota/kampung harus mampu mengarahkan perkembangan kehidupan masyarakat untuk bermukim, berusaha, beribadat dan berekreasi dengan pelayanan yang seoptimal mungkin. Kesemuanya itu harus memperhatikan keseimbangan ekologi perkampungan, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dalam jangka waktu yang cukup lama. Usaha dan pelaksanaan pembangunan penyebaran penduduk ke pemukiman baru akan tercapai dengan baik, apabila semua pihak telah dapat meresapi dan menghayati arti dan tujuan pembangunan itu. Adanya saling pengertian akan hak-hak dan kewajiban yang harus dipikul oleh masyarakat akan merupakan kunci sukses bagi pencapaian kesejahteraan. Dengan demikian bisa diharapkan saling menunjang antara pemerintah

dan masyarakat dalam membina lingkungan pemukiman dan pelestariannya. Kondisi seperti ini merupakan pengalaman bersama yang harus dipelihara sebaik-baiknya.

CATATAN

- 1) M. Idwar Saleh, *Banjarmasin*. Depdikbud Museum Lambung Mangkurat, Banjarbaru, 1981/1982 hal. 129.
- 2) Soejono Soekanto, *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta, 1983 hal. 82.
- 3) Wawancara dengan As'ari, hari Sabtu, tanggal 25 Oktober 1985.
- 4) Hans-Dieter Evers, *Sosiologi Perkotaan*, LP3ES, Jakarta, 1982, hal. 23.
- 5) *ibid*, hal. 24.
- 6) Repelita, Kotamadya Banjarmasin Tahun 1974–1979, hal. 80.
- 7) Monografi, *Propinsi Kalimantan Selatan*, BKKBN Prop. Kalsel, 1977, hal. 28.
- 8) Repelita, *op.cit.*, hal. 81.
- 9) Departemen Penerangan Kodya Banjarmasin, *Mengenal Kotamadya Banjarmasin*, 1982, hal. 9.
- 10) *ibid*, hal. 10.
- 11) *ibid*, hal. 12.
- 12) *ibid*, hal.

- 13) *ibid*, hal.
- 14) *ibid*, hal. 6.
- 15) Hasil wawancara dengan Bapak Tuhalus, tanggal 5 November 1985.
- 16) *ibid*.
- 17) Team Penyusun Pemda Kalsel, *Kalimantan Selatan 1963–1968*, Pemda Kalsel, Banjarmasin, 1968, hal. 3.
- 18) *ibid*, hal. 4.
- 19) *Loc Cit*.
- 20) Sensus Statistik, *Kalimantan Selatan Dalam Angka 1974* Kantor Sensus dan Statistik Prop. Kalsel, Banjarmasin 1974, hal. 7.
- 21) Sensus dan Statistik, *Registrasi Penduduk Kalsel Tahun 1978*, Kantor Sensus dan Statistik, Banjarmasin, 1978, hal. 14.
- 22) Wawancara dengan Bapak Abdurachman, Staf Kotamadya Banjarmasin, tanggal 19 Agustus 1985.
- 23) Ny. Pudjiwati Sajagyo, *Sosiologi Pembangunan*, Fakultas Pasca Sarjana IKIP Jakarta, Jakarta, 1985, hal. 74.
- 24) Surat Keputusan DPRD Tingkat II Kodya Banjarmasin, tanggal 17 Agustus 1973, No. 9/DPRD-KPTS/73.
- 25) BAPPEDA, MONOGRAFI KOTA BANJARMASIN, Bappeda Kodya Daerah Tingkat II, Banjarmasin, 1975, hal. 20.
- 26) *ibid*, hal. 21.
- 27) *ibid*, hal. 22.

BAB IV POLITIK DAN PEMERINTAHAN

4.1 *Perkembangan Administrasi Kota*

Setelah penyerahan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949 Kotapraja Banjarmasin dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS), baru pada bulan April 1950 masuk pemerintahan Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 3/1953 tentang pembentukan Kota Besar Banjarmasin dengan disertai pemberian kewenangan mengatur rumah tangga sendiri, urusan medebewind dan Otonomi Daerah, dengan Walikota pertama ditunjuk oleh Pemerintah Pusat adalah AIDAN SINAGA.

Setelah dikeluarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1957, maka terpisahlah urusan pusat dan daerah yang pada waktu ada pejabat Walikota dan ada pula Kepala Daerah:

1. H. Horman sebagai P.D. Walikota dan,
2. Burhan Afhani sebagai Kepala Daerah.

Dengan adanya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, maka dilakukan penyempurnaan Sistem Pemerintahan di Daerah dengan dikeluarkannya Pen Pres No. 16 tahun 1956 dan Pen Pres No. 5 tahun 1960 (sete-

lah disempurnakan), dibentuk Lembaga Legislatif DPRD Gotong Royong terdiri dari wakil-wakil Golongan Karya.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1957 Daerah Indonesia dibagi atas Daerah Swatantra tingkat I dan tingkat II¹). Akan tetapi sesudah berlakunya Undang-Undang No. 18 tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan yang baru, maka nama Daswati I berubah menjadi Propinsi dan Daswati II menjadi Kabupaten/Kotamadya²).

Berhubung Walikota Kotamadya Banjarmasin H. Horman mengundurkan diri beserta sekretarisnya Apipudin (1959–1965) dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan tanggal 28 April 1965 No. 1–2–19–247 dan dengan surat keputusan Gubernur tanggal 2 Oktober 1965 No. Sekr-BB- 3–26–474 ditunjuk Kapten Quderah H. Adenan (anggota BPH) sebagai Pj. Walikota. Kemudian dengan surat keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 13–9–1965 No. UP/15/5/18 – 1358, M. Hanafiah sesuai dengan diantara calon yang diajukan oleh DPRD Kotapraja Banjarmasin, diangkat menjadi Walikota Kotapraja Banjarmasin³).

Perkembangan administrasi pemerintahan Kotamadya Banjarmasin menurut sensus penduduk tahun 1961 dari segi jumlah desa kotapraja dan kecamatan adalah sebagai berikut:

NO. KECAMATAN

D E S A

- | | | |
|----------------|---------------------|---------------------|
| 1. Banjarmasin | 1. Kertak Baru | 10. Sungai Baru |
| | 2. Telawang | 11. Kelayan Timur |
| | 3. Teluk Dalam | 12. Kelayan Barat |
| | 4. Pasar Lama | 13. Seberang Mesjid |
| | 5. Sungai Jingah | 14. Melayu |
| | 6. Ant. Kecil Timur | 15. Mantuil |
| | 7. Sungai Miai | 16. Alalak Besar |
| | 8. Kween Selatan | 17. Pemurus |
| | 9. Kween Utara | 18. Pengambangan |

Jumlah	Desa	= 18
Jumlah seluruh	Kecamatan	= 1
Kotapraja	Desa	= 18

Pada tahun 1974–1979 luas Kotamadya Banjarmasin ± 72.0776 Km². Secara Hukum dan Administrasi, Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin dibagi atas 4 (empat) wilayah kecamatan dengan 20 kampung dan 779 rukun tetangga (RT), perinciannya sebagai berikut:

KECAMATAN	BANYAKNYA KAMPUNG	BANYAKNYA RT
Banjar Barat	4	223
Banjar Timur	4	211
Banjar Selatan	5	222
Banjar Utara	7	123
Jumlah	20	779

Untuk meningkatkan kelancaran pelayanan, penghimpunan data kependudukan yang lebih sempurna dan segi-segi administrasi kampung lainnya, yang banyak tergantung pada luas dan jumlah penduduk kampung, maka dianggap perlu untuk segera mengadakan pemekaran kampung di Daerah Kotamadya Banjarmasin dari 20 kampung menjadi 49 kelurahan⁴).

KECAMATAN	KELURAHAN	L U A S
Banjar Barat	12	7,89 ha
Banjar Timur	13	11,58 ha
Banjar Selatan	13	31,55 ha
Banjar Utara	11	20,98 ha
Jumlah	49	72,00 ha

Kemudian pada tahun 1984 menjadi 50 Kelurahan (lihat lampiran).

**DAFTAR NAMA-NAMA KELURAHAN DALAM
KOTAMADYA BANJARMASIN**

No.	Kecamatan	Desa Sebehum Dimekarkan	Desa Sesudah Dimekarkan	Ket.
1	2	3	4	5
I.	Banjar Barat	1. Teluk Dalam 2. Kertak Baru 3. Pasar Lama 4. Telawang	1. Teluk Dalam 2. Telaga Biru 3. Pelambuan 4. Antasan Besar 1. Kertak Baru Ulu 2. Kertak Baru Ilir 1. Pasar Lama 2. Belitung Utara 3. Belitung Selatan 1. Telawang 2. Teluk Tiram 3. Mawa	
II.	Banjar Utara	1. Sungai Jingah 2. Antasan Kecil Timur 3. Sungai Miai 4. Kuin Selatan 5. Kuin Utara 6. Alalak Selatan 7. Alalak Utara	1. Sungai Jingah 2. Surgi Mufti 1. Antasan Kecil Timur 1. Sungai Miai 2. Pangeran 1. Kuin Selatan 2. Kuin Cerucuk 1. Kuin Utara 1. Alalak Selatan 1. Alalak Utara 2. Alalak Tengah	
III.	Banjar Timur	1. Kampung Melayu 2. Pengambangan	1. Kampung Melayu 2. Kuripan 3. Sungai Bilu 4. Kebun Bunga 1. Pengambangan 2. Benua Anyar 3. Sungai Lutut	

1	2	3	4	5
		3. Sungai Baru	1. Sungai Baru 2. Pekapuran Laut 3. Pekapuran Raya 4. Karang Mekar	
		4. Seberang Mesjid	1. Seberang Mesjid 2. Kampung Gedang	
IV.	Banjar Selatan	1. Kelayan Barat I	1. Kelayan Luar 2. Kelayan Barat 3. Kelayan Dalam 4. Kelayan Tengah	
		2. Kelayan Barat II	1. Kelayan Selatan 2. Pekauman	
		3. Kelayan Timur	1. Kelayan Timur 2. Tanjung Pagar 3. Murung Raya	
		4. Pemurus	1. Pemurus Dalam + Pemurus Baru '84 2. Pemurus Luar	
		5. Mantuil	1. Basirih 2. Mantuil	

Banjarmasin, 8 Oktober 1982

Kepala Kantor Bangdes

Kodya Banjarmasin,

ttd.

AS'ARIE SYACHMINAN

NIP 010044253

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 5 tahun 1974 dan surat keputusan Menteri Dalam Negeri No. 130 tahun 1978 telah ditetapkan struktur organisasi pemerintahan dan tata kerja Sekretaris Wilayah Daerah dan Sekretaris Dewan Pemerintahan Kodya Dati II Banjarmasin⁵). Kemudian dituangkan lagi ke dalam peraturan daerah No. 2 tahun 1979, terdiri atas:

- 1) Sekretaris Wilayah, terdiri atas 9 bagian yaitu:
 - a) Bagian Pemerintahan
 - b) Bagian Hukum Organisasi dan Tata Laksana

- c) Bagian Pembangunan
 - d) Bagian Keuangan
 - e) Bagian Perekonomian
 - f) Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - g) Bagian Umum Humas dan Protokol
 - h) Bagian Kepegawaian
 - i) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah⁶)
- 2) Dinas-Dinas Daerah, terdiri atas:
- a) Dinas PU Daerah, Perda No. 11 tahun 1974
 - b) Dinas Kepermaian Kota, Perda, No. 11 tahun 1974
 - c) Dinas Kesehatan, Perda No. 11 tahun 1974
 - d) Perusahaan Daerah Air Minum, Perda No. 12 tahun 1976
 - e) Kantor Urusan Perumahan
 - f) Mawil Hansip
 - g) IPEDA

Di samping dinas-dinas terdapat pula beberapa unit kerja yaitu: Kantor Sosial Politik, Kantor Agraria, Kantor Pembangunan Desa, Kantor Keluarga Berencana, dan Kantor Perpustakaan Umum.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 1973, Struktur Pemerintahan Kecamatan dimekarkan dari 1 (satu) Kecamatan menjadi 4 (empat) kecamatan yaitu: Kecamatan Banjar Timur, Kecamatan Banjar Barat, Kecamatan Banjar Utara, dan Kecamatan Banjar Selatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, struktur pemerintahan kelurahan atau semua perangkat kelurahan telah diangkat dengan status Pegawai Negeri Sipil.

Pemerintah kelurahan ini, dari tahun 1961 berjumlah 18 (delapan belas) kelurahan, naik pada tahun 1974, menjadi 20 (duapuluh) kelurahan, atau naik 11,11 persen, dan pada tahun 1979 jumlah kelurahan dimekarkan lagi menjadi 49 Kelurahan, atau naik 29 buah kelurahan atau sebesar 161,11%.

Sebagai Pembantu Pemerintahan pada tingkat kelurahan, dibentuk Rukun Tetangga (RT). Jumlah RT dalam Wilayah Kotamadya Banjarmasin, adalah:

- 1) Kecamatan Banjar Timur 13 Kelurahan dan 291 RT,
 - 2) Kecamatan Banjar Barat 12 Kelurahan dan 286 RT,
 - 3) Kecamatan Banjar Selatan 11 Kelurahan dan 171 RT,
 - 4) Kecamatan Banjar Utara 13 Kelurahan dan 302 RT.
- Jadi jumlah seluruhnya 49 Kelurahan dan 1050 RT (Rukun Tetangga).

Lembaga legieslatif (DPRD) Tingkat II Banjarmasin, sebagai patnership Pemerintah selalu bekerjasama dalam mengemban tugas Otonomi Daerah⁷). Dewasa ini dalam lembaga DPRD Kotamadya Banjarmasin, terdapat 3 Fraksi yakni: Fraksi ABRI (4 orang), Fraksi Karya Pembangunan (12 orang), dan Fraksi Persatuan Pembangunan (16 orang)⁸). Di samping itu dibagi atas 4 komisi DPRD, masing-masing adalah: Komisi A bidang Pemerintahan, Komisi B bidang Ekonomi/Keuangan, Komisi C bidang Pembangunan, dan Komisi D bidang Sosial.

4.2 Kekuatan-kekuatan Sosial dan Politik

Tanda-tanda permulaan pertumbuhan pergerakan nasional di Kodya Banjarmasin, dimulai dengan lahirnya sebuah perkumpulan yang bernama Seri Budiman⁹). Hal ini atas inisiatif Kiai Bondan. Anggota-anggotanya berasal dari golongan pangreh praja dan golongan pedagang, yaitu golongan masyarakat yang telah mendapatkan pendidikan secara Barat.

Walaupun perkumpulan ini lebih nampak sifat sosialnya daripada aspek politiknya, namun organisasi ini dapatlah kita pandang sebagai organisasi perintis di daerah ini yang menjadi pembuka jalan bagi timbulnya organisasi modern di kemudian hari. Sebagaimana dengan organisasi-organisasi moderen lainnya, maka perkumpulan inipun memakai cara dan metode moderen, misalnya anggaran dasar, anggaran rumah tangga serta tujuan tertentu yang hendak dicapai.

Sesuai dengan penonjolan watak sosialnya dari pada watak politiknya, maka perkumpulan ini bertujuan untuk mempererat hubungan sesama anggotanya. Perkumpulan ini tidak dapat hidup lama antara lain karena anggota-anggotanya yang penting dan yang menjadi motor pendorong organisasi pindah tempat. Setahun kemudian setelah bubarnya Seri Budiman, timbul pula organisasi lain yang mempunyai tujuan sama dengan perkumpulan yang mendahului itu¹⁰). Perkumpulan tersebut diberi nama "Budi Sempurna" dengan tokohnya Kiai Muhammad Djamdjam.

Setelah 2 tahun perkumpulan ini berjalan, atas persetujuan pengurus dan anggota-anggotanya perkumpulan ini berganti nama "Budi Buana"¹¹). Diperkirakan orang masuknya organisasi sosial politik di Kotamadya Banjarmasin, sekitar tahun 1943. Dan terus berkembang hingga setelah kemerdekaan. Namun hanya sebagian saja yang bisa bertahan sampai sekarang. Dalam waktu-waktu selanjutnya setelah bubar organisasi tersebut, timbullah pergerakan dengan corak baru dalam semangat dan cita-cita yang akan dicapai yaitu perkumpulan yang bersifat perjuangan politik dengan tujuan mencapai persatuan, kecintaan kepada tanah air dan kemerdekaan. Dengan kata lain muncullah organisasi-organisasi yang lebih menonjolkan aspek nasional politik. Perkumpulan-perkumpulan yang memiliki semangat dan cita-cita seperti itu antara lain: Sarikat Islam, persatuan pemuda yang terdapat di daerah ini dan yang dalam proses perkembangan pergerakan selanjutnya akan nampak dalam organisasi-organisasi politik dan sosial yang ada di daerah ini.

4.2.1 *Perkembangan Sosial-Politik Tahun 1950-1961*

Setelah Indra Buana dibubarkan muncullah organisasi-organisasi baru yang dibawa dari Jawa yaitu Serikat Islam yang kemudian diikuti oleh Muhammadiyah dan selanjutnya Nahdatul Ulama. Pertikaian antara Muhammadiyah dengan Nahdatul Ulama mengakibatkan munculnya kelompok lokal moderat,

Musyawaratutthalibin dan Persatuan Perguruan Islam. Perluasan Sarikat Islam yang begitu cepat di Kotamadya Banjarmasin agaknya disebabkan oleh ide-ide yang dibawanya langsung dapat diterima oleh rakyat banyak yang beragama Islam. Semboyan mereka "Berani karena benar, takut karena salah", selalu didengung-dengungkan oleh para anggota Sarikat Islam di masyarakat.

Organisasi yang bersifat nasional berikutnya yang lahir di Kotamadya Banjarmasin sesudah Sarikat Islam adalah Muhammadiyah dengan pramotornya seorang ulama, yaitu Haji M. Japri. Gerakan ini walaupun pada mulanya mendapat tantangan hebat di kalangan penduduk, akhirnya mendapat posisi yang penting di daerah ini, karena kesungguhan para penganjurnya. Muhammadiyah seperti halnya Sarikat Islam adalah organisasi berdasar Islam. Tujuan terpenting dari Muhammadiyah ialah memurnikan paham-paham agama Islam yang dianggapnya telah banyak menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad saw, dengan semboynannya yang terkenal "Kembali kepada Qur'an dan Hadist"^{1 2}). Pada dasarnya organisasi-organisasi yang ada di daerah Kotamadya Banjarmasin adalah organisasi Islam. Ini dapat kita lihat dari masyarakat Banjar itu sendiri yang merupakan masyarakat agamis mayoritas Islam, sehingga pada menjelang PEMILU, (lihat tentang Pemilu) masing-masing partai sosial politik saling bersaing terutama sekali partai yang berdasarkan agama Islam. Namun tidak semua condong kepada partai-partai Islam tersebut, karena ada pula yang bernaung di bawah partai-partai politik yang mendukung pendidikan.

4.2.2 Partai-partai Politik Tahun 1961, Menjelang Orde Baru Sampai Dengan 1974

Jumlah dan organisasi partai-partai politik mempunyai pengaruh bagi para calon akan duduk di pemerintahan, sebagaimana akan terlihat apabila menganalisis pemerintah yang demokratis. Tetapi barangkali lebih besar lagi pengaruh ini atas

susunan intern organ-organ pemerintahan. Adanya pemerintahan, pengaruh ini mudah difahami kalau diingat bahwa partai-partai tidak saja menguasai pengumpulan para pemilih dan calon, tetapi juga penentuan para utusan¹³). Dalam masa orde baru keadaan partai-partai lebih tertib lagi, karena adanya peraturan-peraturan yang memuat penyelenggaraan PEMILU, tapi tak terlepas dari reaksi masyarakat apabila menjelang PEMILU. Perasaan dan kondisi masyarakat semakin hangat, sedang suhu politik pun makin meninggi. Rakyat amat peka bila golongan dan partainya disinggung, sehingga kadang-kadang timbul hal-hal yang tidak wajar di kelompok masyarakat yang sengaja mengambil kesempatan untuk mengacaukan masyarakat, baik secara membonceng pada suatu partai atau membuat issue yang memfitnah dan mengadu domba antara pihak yang satu dengan lainnya. Cara-cara pengacauan itu berupa pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan permainan yang telah diatur di dalam Undang-Undang, baik secara halus maupun secara kekerasan memaksa pihak-pihak lain untuk menggunakan hak pilihnya pada tempat yang tidak dikehendakinya.¹⁴).

Menjelang PEMILU tahun 1971, pemerintah perlu menyatukan partai. Karena terlalu banyak, maka dijadikan tiga partai¹⁵), yaitu: Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (GOLKAR), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Partai Persatuan Pembangunan yang berasal dari gabungan partai-partai Islam, di Kotamadya Banjarmasin selalu banyak pendukungnya dan tidak jarang sekali terjadi kekacauan karena bersemangatnya dalam berkampanye untuk partai yang didukungnya.

Dalam Repelita II (1974-1979) Pemda Kotamadya Banjarmasin juga memberikan suatu program yang diarahkan pada usaha-usaha menanamkan keyakinan tentang kemampuan Pancasila dan UUD 1945 melalui proyek-proyek khusus yang diselenggarakan dan diselaraskan dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada masa-masa tertentu. Pada sektor politik

pemerintah meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap haluan Negara dan perundang-undangan/peraturan-peraturan yang berlaku, di samping terus meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya subversi serta golongan ekstrim lainnya yang akan mengganggu stabilitas dan keamanan Negara. Rencana Pemerintah Daerah Kotamadya Banjarmasin dalam bidang Sosial Politik dapat kita lihat pada tabel di bawah ini.

4.3 *Pemilu Tahun 1955, 1971, dan 1977*

Dalam membahas Partai Politik di Daerah Swatantra Tingkat II Banjarmasin (1955), maka kita mau tidak mau harus membahas pula mengenai Pemilihan Umum. Hal ini disebabkan adanya kaitan yang erat antara Partai Politik dan Pemilihan Umum, karena partai politik dan pemilihan umum merupakan dua realitas yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Bahkan kadang-kadang sulit untuk memisahkan guna keperluan analisis. Sebaliknya Partai-partai Politik itu menganut faham demokrasi untuk memperoleh kekuasaan.

Pemilihan Umum adalah suatu proses kegiatan yang diselenggarakan untuk memilih wakil rakyat yang pada gilirannya akan mengendalikan jalannya roda pemerintahan.

Tahap-tahap dalam kegiatan Pemilihan Umum 1955 di Kalimantan Selatan, terutama di Kotamadya Banjarmasin:

- 1) Pendaftaran Pemilih
- 2) Penetapan jumlah anggota yang dipilih untuk tiap daerah pemilihan.
- 3) Pengajuan nama dan tanda gambar organisasi.
- 4) Pengajuan nama calon
- 5) Penelitian calon-calon
- 6) Penetapan calon
- 7) Pengumuman daftar calon
- 8) Kampanye pemilihan
- 9) Pemungutan suara

BIDANG : SOSIAL POLITIK
SEKTOR : KESEJAHTERAAN SOSIAL
SUB SEKTOR :
PASAL :

1974 – 1975	1975 – 1976	1976 – 1977	1977 – 1978	1978 – 1979
<p>A. Bantuan untuk Panti-Panti Asuhan</p> <p>B. Bantuan untuk: 1. Parpol/Golkar 2. Ormas-ormas</p> <p>C. Peningkatan Lembaga Sosial Desa (LSD)</p> <p>D. Mengefektifkan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) (PKK)</p>	<p>A. Bantuan untuk Panti-Panti Asuhan</p> <p>B. Bantuan untuk: 1. Parpol/Golkar 2. Ormas-ormas</p> <p>C. Peningkatan Lembaga Sosial Desa (LSD)</p> <p>D. Mengefektifkan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) (PKK)</p>	<p>A. Bantuan untuk Panti-Panti Asuhan</p> <p>B. Bantuan untuk: 1. Parpol/Golkar 2. Ormas-ormas</p> <p>C. Peningkatan Lembaga Sosial Desa (LSD)</p> <p>D. Mengefektifkan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) (PKK)</p>	<p>A. Bantuan untuk Panti-Panti Asuhan</p> <p>B. Bantuan untuk: 1. Parpol/Golkar 2. Ormas-ormas</p> <p>C. Peningkatan Lembaga Sosial Desa (LSD)</p> <p>D. Mengefektifkan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) (PKK)</p>	<p>A. Bantuan untuk Panti-Panti Asuhan.</p> <p>B. Bantuan untuk: 1. Parpol/Golkar 2. Ormas-ormas</p> <p>C. Peningkatan Lembaga Sosial Desa (LSD)</p> <p>D. Mengefektifkan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) (PKK)</p>

- 10) Perhitungan suara
- 11) Penetapan hasil Pemilu:
 - a. pembagian kursi
 - b. penetapan terpilih
 - c. peresmian anggota
- 12) Pengambilan Sumpah.

Partai-partai yang ikut Pemilihan Umum 1955 di Daerah Swatantra Tingkat II Banjarmasin pada waktu itu lebih kurang 11 buah dan ikut menjadi kontestan antara lain:

- 1) Ikatan Serikat Kerakyatan Indonesia (ISKI)
- 2) Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi)
- 3) Partai Indonesia Raya (Parindra)
- 4) Partai Serikat Islam Indonesia (PSII)
- 5) Partai Sosialis Indonesia (PSI)
- 6) Partai Nasional Indonesia (PNI)
- 7) Partai Nahdatul Ulama (NU)
- 8) Partai Tarbiyah Islam Indonesia
- 9) Partai Daya (PD)
- 10) Partai Keluarga Marabahan
- 11) Partai yang sifatnya perseorangan yaitu Zafri Zamzam dan M. Adriana¹⁶).

Adanya demikian banyak partai dalam sistem pemerintahan parlemen telah mengakibatkan tidak stabilnya pemerintahan. Kabinet sering berganti dalam waktu yang relatif singkat. Banyak di antara partai-partai tersebut kemudian telah dilarang atau tidak diakui lagi oleh pemerintah.

Pada Pemilihan Umum 1955 di Daerah Swatantra Tingkat II Banjarmasin yang menang adalah Partai Nahdatul Ulama.

Sebelum terjadinya peristiwa G.30.S/PKI, serta pembekuan Partai Murba tahun 1965, maka di Kotamadya Banjarmasin terdapat partai-partai politik antara lain: Partai NU, PNI, PSII, PKI, Partai Islam Perti, Partai Ikatan Pendukung Kemer-

dekaan Indonesia, Partai Kristen Indonesia (PARKINDO), Partai Katholik, dan Partai Indonesia (PARTINDO).

Pada tanggal 1 Oktober 1965 setelah mendengar siaran RRI yang mengumumkan Pembentukan Dewan Revolusi, Gubernur Kalimantan Selatan tanpa ragu-ragu menilai bahwa tindakan tersebut adalah *coup*, atas prakarsa Gubernur dan Pangdam X/LM Amir Machmud pada hari itu juga diadakan rapat dengan Panca Tunggal Propinsi Kalimantan Selatan, guna mengambil langkah-langkah yang segera agar dapat menjaga keselamatan Negara, dan daerah Kalimantan Selatan, terhadap tindakan destruktif.

Ternyata *coup* terjadi pada tanggal 30 September, sedang pelakunya adalah PKI dan ormas-ormasnya. Segera dilakukan penangkapan terhadap mereka. Suasana tahun 1965 diliputi oleh kegiatan untuk mengikis habis unsur-unsur PKI dari aparat eksekutif dan legislatif. Termasuk Kotamadya Banjarmasin ikut mendukung seluruh aparat, parpol dan ormas serta rakyat membantu sepenuhnya¹⁷⁾.

Pada tanggal 19 Januari 1964 PKI mengadakan sidang Pleno comite PKI se-Kalimantan Selatan dan telah membahas dengan secara mendalam laporan politik C.C. PKI yang disampaikan pada sidang Pleno ke II C.C. PKI di Jakarta akhir Desember 1963 sebagai dukungan PKI terhadap Tri Program Pemerintah¹⁸⁾.

Resolusi Pemuda Rakyat Banjarbaru No. R/65/2 yang dikeluarkan dalam tahun 1965 sebelum peristiwa G-30-S/PKI tanggal 25 Juli 1965, berbunyi sebagai berikut:

- 1) Menuntut kepada pemerintah, segera membubarkan Partai Murba karena ternyata Partai Murba pemecah belah kekuatan Nasional dan nyata-nyata menjadi antek kaum revisionis.
- 2) Laksanakan Pemilu, yang pelaksanaannya dengan cara yang mudah dan murah, yakni: dengan cara suara yang

diperoleh dari masing-masing partai dan golongan itu menjadi dasar untuk membaharui DPRD, BPH, DPRDGR, MPRS.

- 3) Mendukung adanya musyawarah Besar Tani, karena Mubes Tani akan melancarkan pelaksanaan UUPA dan UUPBH, sekaligus akan menaikkan produksi khusus di bidang pangan.

Sebelum dikeluarkan Supersemar 11 Maret 1966 yang terkenal itu, suasana politik di Kodya Banjarmasin diliputi oleh kabut tebal yang membawa keraguan bagi masyarakat yang progresif revolusioner, karena sebegitu jauh terhadap PKI dan ormasnya belum juga diambil sesuatu tindakan yang tegas oleh pemerintah pusat, padahal mereka melakukan coup, yang mengakibatkan jatuhnya korban beberapa orang pahlawan revolusi kita.

Beberapa demonstrasi telah dilancarkan, baik oleh parpol ormas yang diorganisasi oleh KAPAK, maupun mahasiswa dan pelajar yang tergabung dalam KAMI/KAPPI, untuk menuntut dibubarkan dengan segera PKI beserta ormasnya. Sangat disesalkan bahwa dalam salah satu peristiwa demonstrasi ini telah jatuh korban seorang mahasiswa yang bernama: Hassanuddin Majedi pada tanggal 10 Pebruari 1966.

Dengan diterimanya Supersemar oleh Presiden Suharto merupakan penawar dingin dalam suasana negara yang serba sulit dan tidak memuaskan. Suasana politik mulai cerah kembali setelah ditangkapnya beberapa orang menteri dari kabinet 100 menteri, yang banyak membawa malapetaka dan kesengsaraan kepada rakyat dan negara. Ormas yang bernaung di bawah PKI yaitu: Barisan Tani Indonesia (BTI), Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), Pemuda Rakyat, CGMI (Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia), GERWANI (Gerakan Wanita Indonesia), LEKRA (Lembaga Kebudayaan Rakyat), dan HSI (Himpunan Sarjana Indonesia).

Partai Kristen Indonesia kurang menunjukkan kegiatan keluar¹⁹). Hal ini mungkin disebabkan kurang begitu banyak anggota sehingga memungkinkan titik berat daripada kegiatannya ditujukan untuk memperbanyak anggota dengan cara:

- 1) Mengadakan kegiatan dalam bidang pendidikan
- 2) Kebaktian di gereja dan lain-lain.

Anggota partai ini umumnya terdiri atas orang pendatang yang beragama Kristen. Jarang melahirkan gerakan-gerakan politik, tetapi hanya menanggapi dan menilai situasi politik yang tumbuh atau sedang berkembang.

Menjelang Pemilu 1971, sistem banyak partai itu telah disederhanakan menjadi 3 (tiga) partai yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia. Masing-masing menarik peserta sebanyak mungkin, dengan kampanye Luber dan tiap organisasi kekuatan sosial politik diberi kedudukan, kebebasan, kesempatan dan perlakuan yang sama²⁰).

Dari hasil pemilu yang telah dilaksanakan di Kotamadya Banjarmasin pada tahun 1971, dengan jumlah suara yang masuk 119.857 suara Partai Persatuan Pembangunan menduduki ranking teratas. Partai Persatuan Pembangunan 70.488 suara, atau sebesar 58%; Golongan Karya menduduki ranking kedua berjumlah 46.690 suara, atau sebesar 39%; dan Partai Demokrasi Indonesia menduduki ranking terbawah berjumlah 2.679 suara, atau hanya sebesar 3%. Pemilu pada tahun ini berjalan lancar dan aman.

Berdasarkan Pemilu 1977, untuk DPRD Tingkat II Kotamadya Banjarmasin jumlah suara seluruhnya 171.088 suara²¹). Dari jumlah itu direbut oleh Partai Persatuan Pembangunan berjumlah 86.986 suara, atau sebesar 60,61%. Berarti kenaikan jumlah suara Partai Persatuan Pembangunan pada pemilu 1977 sebesar 16.498 suara, atau sebesar 2,61%; Golongan Karya berjumlah 53.516 suara, atau sebesar 37,29%. Penurunan jumlah

suara Golongan Karya sebesar 1,71%; dan Partai Demokrasi Indonesia berjumlah 3.022 suara, atau sebesar 2,10%, yang berarti penurunan jumlah suara sebesar 0,90%. Jadi Kotamadya Banjarmasin masih didominasi oleh Partai Persatuan Pembangunan dan tahun 1955 dimenangkan oleh Partai Nahdatul Ulama^{2 2}).

PERPUSTAKAAN
DIREKTORAT SEJARAH &
NILAI TRADISIONAL

CATATAN

- 1) Undang-Undang No. 1 tahun 1957.
- 2) Undang-Undang No. 18 tahun 1965.
- 3) Team Penyusun Pemda, *Kalimantan Selatan 1963-1968*. Pemda Tingkat I Kalimantan Selatan, Banjarmasin, 1968. hal. 25.
- 4) Sensus dan Statistik, *Kalimantan Selatan Dalam Angka Tahun 1980*, Kantor Sensus dan Statistik, Banjarmasin, 1980, hal. 14.
- 5) Undang-Undang No. 5 Tahun 1974. Lihat pula SK Menteri Dalam Negeri No. 130 Tahun 1978.
- 6) Pemda Kodya Banjarmasin, *Repelita 1974-1979*. Pemda Tingkat II Banjarmasin, 1979. hal. 15.
- 7) *ibid.* hal. 16.
- 8) *ibid.* hal. 17.
- 9) Amir Hasan Kiai Bondan, *Suluh Sejarah Kalimantan*. Per-cetakan Fajar Banjarmasin, tanpa tahun. hal. 82.
- 10) *ibid.* hal. 83.
- 11) Artum Artha, *Sejarah Kota Banjarmasin*. Museum Lam-bung Mangkurat, Banjarmasin, 1970. hal. 18.

- 12) M. Idwar Saleh, et.al., *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan*. Depdikbud, Jakarta, 1977/1978. hal. 148.
- 13) Haryanto, *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*. Liberty, Yogyakarta, 1984. hal. 28.
- 14) *ibid.* hal. 31.
- 15) *ibid.* hal. 45.
- 16) Wawancara dengan Riduan Imam Bekas Walikotaamadya, pada tanggal 8 Agustus 1985.
- 17) Team Penyusun Pemda, op.cit., hal. 5.
- 18) Team Penyusun Pemda, op.cit., hal. 6.
- 19) M. Idwar Saleh, Tim, op.cit., hal. 107.
- 20) Hasil Pemilu 1971.
- 21) Hasil Pemilu 1972.
- 22) Kodya Banjarmasin Dalam Angka, op.cit., hal. 29.

BAB V SOSIAL DAN KEBUDAYAAN

5.1 *Perubahan Sosial*

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda pembangunan kota sudah berjalan, tetapi hanya untuk kepentingan pemerintah dan orang Belanda yang bermukim di kota. Perbedaan *colorline* tampak sekali dalam bidang pendidikan khusus anak-anak Belanda, tempat rekreasi orang kulit putih, perumahan sehat dan hygiene yang terjamin bagi penguasa. Jalan-jalan bersih, bioskop ramai, penerangan cukup untuk pusat keramaian orang kulit putih, di samping ada tanda-tanda tertentu "Dilarang masuk untuk orang bumiputera dan anjing"¹). Semua ini contoh berlakunya stratifikasi sosial masyarakat kolonial.

Sesudah tahun 1865 pedagang besar bumiputera semakin terdesak dan hubungan mereka dengan pedagang-pedagang dari luar makin longgar, karena pedagang bangsa Eropa (Belanda) dan timur asing berangsur-angsur menggantikan perdagangan bubuhan saudagar Banjar. Kemudian setelah ada perhubungan langsung dengan kapal KPM antara Banjarmasin dan Surabaya yang secara tetap diadakan tiap-tiap 7 hari sekali, barang-barang impor pedagang bangsa-bangsa asing bertambah banyak masuk-

nya ke Banjarmasin. Dengan demikian pedagang besar bumi-putera makin bertambah mundur sehingga tinggal sebagian kecil saja yang masih aktif dalam perdagangan²). Tetapi dengan masuknya barang-barang dari luar dan mudahnya transportasi ke Jawa, mengakibatkan timbulnya urbanisasi pedagang-pedagang kecil di pedesaan; misalnya pedagang Marabahan, Alabio dan Negara. Sebagian besar sukses dalam usaha mereka. Akibatnya kedudukan mereka naik dalam stratifikasi sosial di desa mereka. Pedagang-pedagang ini sampai sekarang merupakan saingan pedagang-pedagang Cina, Arab dan India di Banjarmasin³).

Pada dasarnya kedudukan pedagang Cina tetap menduduki ranking teratas dalam bidang perekonomian. Gengsi mereka tetap dipertahankan sejak zaman kolonial. Dari generasi kolonial orang Cina ini mengalami perkembangan hingga sekarang ini. Terutama generasi sekarang terjadi pembauran dengan kelompok-kelompok masyarakat Banjar. Mereka tidak terikat harus mendirikan rumah pada kampung Pacinan, tetapi strategi mereka di arahkan pada kepentingan dagang. Mereka mendirikan rumah pada jalan-jalan besar yang strategis, dan di sini mereka membuka toko, kedai/rumah makan. Walaupun demikian pembauran dalam pergaulan dan perkawinan cukup tinggi, jika dibanding tahun 1965 ke bawah. Tampaknya masa Orde Baru mendobrak mereka untuk ikut memacu dan kerjasama dengan masyarakat Banjar.

Pengaruh penyebaran pendidikan dan pelebaran birokrasi telah nampak dalam mobilitas sosial yang bersifat vertikal. Sekolah berfungsi sebagai alat untuk memungkinkan mobilitas yang naik ini dan lembaga birokrasi sering menjadi salurannya. Sukses dalam jabatan akan mempengaruhi nilai terhadap peranan dalam masyarakat. Dengan adanya sekolah maka calon-calon pegawai birokrasi tidak lagi semata-mata berasal dari kalangan bangsawan atau keluarga sultan yang berkuasa secara turun temurun saja. Anak-anak orang dari masyarakat biasa pun mulai dapat memasuki lingkungan yang dahulu sangat jauh dari jang-

kauan orang tua mereka. Menjadi pegawai pemerintah berarti gaji lumayan dan terlepas dari kerja kasar. Semakin memikat golongan masyarakat biasa untuk menjadi pegawai pemerintah, semakin keras pula persaingan yang harus dihadapi oleh anak-anak golongan bangsawan untuk mendapatkan kedudukan yang mereka anggap sebagai hak istimewa. Maka timbul kegelisahan di kalangan kaum bangsawan. Lambat laun kaum bangsawan yang tidak mampu menghadapi tantangan zaman dalam mobilitas vertikal turun menjadi anggota masyarakat biasa. Sebagian dari kaum bangsawan mulai menjauhkan anaknya dari kemungkinan berkariier sebagai pegawai pemerintah. Sejak bangsa Belanda memperoleh hak istimewa kekuasaan bangsawan Banjarmasin berangsur-angsur hilang. Hak apanase kaum bangsawan masing-masing diberikan dalam wilayah kekuasaan mereka, seperti: pungutan pajak barang-barang, hasil bumi hasil tambang dan pendulangan⁴). Kemudian pungutan itu diambil alih oleh Belanda.

Gelar-gelar yang dahulunya merupakan kebanggaan mereka telah dihapuskan kolonial. Sebagian dari mereka memang masih ada yang menggunakan gelar "gusti" atau gelar lain di bawahnya, tetapi gelar sultan dan pangeran dihapuskan. Gelar-gelar yang mereka pergunakan pun hanya berstatus sebagai lambang saja, tanpa ada pengaruhnya di masyarakat. Lebih-lebih setelah revolusi fisik (1945-1950), gelar dipergunakan oleh siapa saja yang ingin memakainya. Misalnya ada yang memakai gelar raden, pangeran, daeng dan lain-lain. Semua ini menunjukkan betapa merosotnya status kaum bangsawan di dalam masyarakat Banjar.

Dengan berkembangnya pendidikan Barat, kualifikasi pendidikan menjadi lambang prestise dan menjadi keharusan untuk memperoleh status yang tinggi. Lambang-lambang ini seperti garis keturunan dan tingkat kekayaan juga menjadi indikasi dari status sosial. Tetapi harus diakui bahwa bagaimanapun, pendidikan mempersiapkan orang secara lebih baik untuk mem-

peroleh kemajuan di dalam masyarakat maju di Banjar khususnya dan Indonesia umumnya⁵). Pendidikan menjadi semakin penting sebagai alat mobilitas sosial.

Semenjak berakhirnya revolusi bersenjata sudah ada kecenderungan yang kuat ke arah sekularisasi pandangan hidup masyarakat Banjar. Masalah-masalah perorangan dan sosial cenderung ditafsirkan dengan nalar yang lebih bersifat duniawi. Kecenderungan sekularisasi telah berkembang lebih kuat dalam madrasah-madrasah. Murid-murid menghendaki lebih banyak pelajaran sekuler untuk mengimbangi kurikulum dalam sekolah-sekolah dasar negeri. Jumlah murid madrasah yang juga mengikuti sekolah-sekolah umum makin meningkat. Di samping kebutuhan akan kerja lebih mudah, juga mereka merasa dapat mempergunakan ijazah itu untuk melanjutkan pada perguruan tinggi umum. Misalnya lulusan PGAN, MAN dan Aliah dapat memasuki Fakultas Sosial Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unlam. Hal-hal yang semacam inilah memacu anak-anak muda untuk memasuki sekolah Agama yang sekuler. Karena mereka tidak terikat harus memasuki IAIN saja, atau bekerja sebagai kiai atau Tuan Guru, atau terbatas hanya di Departemen Agama saja.

Pandangan mereka, bahwa pendidikan sebagai sarana utama menuju perbaikan. Dahulu perhatian dipusatkan pada alam baka, tapi sekarang tak banyak lagi yang mempunyai pandangan demikian. Pelajaran agama berangsur-angsur akan berkurang kecuali kalau disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan sekuler yang menjadi ciri umum pemuda Indonesia semenjak kemerdekaan.

Bagi mereka yang menduduki pendidikan umum dan agama banyak yang telah berhasil menjadi elite pejabat terutama eksponen '66, baik yang studinya diselesaikan di pulau Jawa ataupun di Banjarmasin sendiri. Elite '66 ini merupakan yang dominan menduduki posisi pada struktur tingkat atas ABRI/Sipil, sementara menyusul eksponen '70-an.

Dalam dunia bisnis, elite ekonomi tetap dominan dipegang oleh orang Cina, dan hanya beberapa persen dipegang oleh orang Banjar. Memang dalam realitas jumlah orang Banjar tampak lebih besar, tetapi dalam angka persentasi Cina tetap unggul. Kebiasaan mereka hidup ulet, hemat dan kerja keras tetap mereka pertahankan. Berbeda dengan pengusaha Banjar, belum modal kuat sudah membeli bermacam kebutuhan yang sebenarnya hanya kepentingan gengsi sosial saja. Itulah sebabnya pengusaha Banjar mudah bangkrut dan gulung tikar. Kecuali pedagang Alabio yang tetap bertahan sampai sekarang menjadi saingan pedagang Cina, terutama pedagang-pedagang kain. Organisasi mereka yang kuat, juga mereka umumnya adalah aliran sekuler, atau pembaharu dalam agama.

Golongan yang berikutnya seperti pedagang biasa, pedagang emas, kain, kelontongan, pancarakinan, juga pegawai negeri sipil, ABRI. Menyusul golongan yang terbesar adalah pedagang eceran, kaki lima, nelayan, buruh, buruh tani, tukang, kuli-kuli, gelandangan dan lain-lain.

5.2 Agama dan Adat-istiadat

Di atas telah dikatakan bahwa masyarakat Kalimantan Selatan setia memeluk agama Islam yang dianut mereka akan tetapi ternyata kepercayaan kuno tidaklah hapus sama sekali. Lebih-lebih hal itu akan dapat disaksikan di desa-desa dalam peristiwa-peristiwa tertentu yang menyangkut persoalan adat-istiadat, masalah tradisional dan faktor-faktor sosial hidup masyarakat. Sistem kepercayaan kuno itu bersumber dari sisa-sisa kepercayaan animisme, dinamisme dan Hinduisme yang secara sadar atau tidak sadar masih terus melekat dalam peristiwa kehidupan sehari-hari, misalnya dalam Adat Perkawinan.

Dalam menentukan pilihan jodoh misalnya, masih terdapat sistem yang disebut dengan istilah "babilangan", yakni suatu kepercayaan kuno kepada dukun untuk mengetahui apakah nanti perjodohan itu baik atau sebaliknya. Selanjutnya

diikuti dengan berbagai macam ketentuan-ketentuan dan pantangan-pantangan yang bersifat pemali bagi calon-calon pengantin itu. Kesemuanya itu merupakan ketentuan-ketentuan sangsi secara mental yang harus dipercayai begitu saja sebagai suatu warisan peninggalan kuno. Misalnya dilarangnya calon pengantin wanita untuk terlalu sering bercermin, sebab nanti wajahnya akan berkurang cantiknya disebabkan diambil oleh wajah cermin. Begitu pula pantangan terhadap makanan-makanan tertentu, perbuatan-perbuatan tertentu dan upacara-upacara tertentu menjelang hari perkawinan⁶).

5.2.1 *Pimpinan/Pemuka Agama*

Pimpinan dan pemuka agama merupakan tokoh penting dalam masyarakat di Kalimantan Selatan. Terhadap tokoh-tokoh ini masyarakat memberikan kepercayaan mereka terutama kepercayaan terhadap hal-hal yang menyangkut masalah kemasyarakatan. Pimpinan yang bukan pemuka agama seperti Kepala Kampung pada umumnya figur mereka dihormati oleh masyarakat dan dipercayai sebagai tokoh pemersatu penduduk desa. Sehingga apabila Kepala Kampung meminta kepada penduduk untuk bergotong-royong, maka hal itu ditanggapi dengan baik oleh penduduk pada umumnya. Apabila ada masalah-masalah yang timbul di kampung oleh penduduk selalu dilaporkan dan dimintakan penyelesaian kepada Kepala Kampung.

Prinsip kepercayaan masyarakat terhadap Kepala Kampung ini dalam lingkungan yang lebih kecil dapat beralih kepada Ketua Rukun Tetangga sebagai unit yang paling kecil dalam sebuah desa. Kecuali tokoh Kepala Kampung dan Ketua Rukun Tetangga kadang-kadang di suatu desa terdapat pemuka masyarakat yang disegani yang dianggap sebagai tetuha atau tokoh yang disegani.

Mereka dalam kedudukan di masyarakat selaku pedagang yang dermawan, sebagai contoh pejuang angkatan bersenjata, atau karena sifat-sifat keberaniannya ataupun karena keturunan-

nya sebagai tokoh yang disegani dalam lingkungan desa itu. Tokoh-tokoh masyarakat yang seperti digambarkan di atas masih terdapat di desa-desa di Kalimantan Selatan. Melembi tokoh-tokoh yang disebutkan di atas masih terdapat tokoh-tokoh yang lebih utama lagi, yaitu para alim ulama Islam, baik sebagai figur berilmu agama Islam seorang da'i ataupun guru mengaji Kitab Suci Al-Qur'an. Golongan alim ulama ini sering disebut dengan istilah "Tuan Guru".

Kepercayaan masyarakat Kalimantan Selatan pada umumnya terhadap tokoh para alim ulama ini cukup besar karena fatwa-fatwa mereka yang selalu dikaitkan dengan syariat agama Islam yang bersumber kepada Kitab Suci Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad s.a.w. Simpati masyarakat terhadap para alim ulama ini demikian besar, sehingga kegiatan-kegiatan masyarakat yang bersifat massal seperti tablig akbar (penerangan agama Islam), ceramah agama yang dilangsungkan di mesjid-mesjid dan langgar selalu dihadiri oleh masyarakat umum sekitarnya⁷).

Masyarakat sebagai pendengar penerangan agama selalu patuh mengikuti jalannya penerangan, patuh pada susunan acara yang secara rutin diadakan oleh kampung-kampung. Dalam gambaran ini timbul suatu kebiasaan bahwa masyarakat selalu patuh dan menurut apa saja yang difatwakan oleh seorang alim ulama. Hal itu karena masyarakat mempunyai dasar kepercayaan bahwa para alim ulama itu adalah pewaris Nabi.

Dari kenyataan yang demikian maka apabila di dalam masyarakat timbul sesuatu yang baru, maka yang terlebih dahulu memberikan reaksi ialah para alim ulama. Apabila sesuatu yang baru itu ditentang oleh seorang alim ulama maka hal itu sudah pasti pula akan ditentang oleh masyarakat pada umumnya. Sebaliknya manakala hal yang baru itu dapat diterima oleh alim ulama dalam arti menyetujui, lebih-lebih jika turut mendukungnya, maka hal itu adalah lebih mudah pula diterima oleh masyarakat pada umumnya.

Dari sini jelaslah bahwa bagaimana sikap masyarakat itu terhadap sesuatu masalah, hal itu bisa tercermin pada sikap tokoh alim ulamanya. Itu berarti bahwa suara alim ulama adalah menjadi suara masyarakat di tempat itu.

5.2.2 *Upacara Pertanian*

Upacara pertanian bagi penduduk suku bangsa Banjar tidak banyak yang dilaksanakan. Hal itu sering dihubungkan dengan syariat agama Islam dan sedikit berbaur dengan acara kebiasaan yang bersifat tradisional. Sehari sebelum masa bertanam padi di sawah, biasanya pada malam harinya dilaksanakan acara selamatan di rumah masing-masing petani dengan pembacaan doa selamat.

Kebiasaan yang bersifat tradisional ialah makanan yang disuguhkan dalam acara selamatan itu selalu dalam hidangan ketupat dengan ikan tawar yang diberi berkuah. Ketupat-ketupat itu dibikin dalam motif-motif yang disebut ketupat burung, ketupat bangsal, ketupat rasul dan bentuk-bentuk motif lainnya. Sedangkan ikan tawar yang dibikin gulai telah dikhususkan sejenis ikan gabus. Tradisi ini telah berjalan berpuluh-puluh tahun tanpa perubahan dan tanpa pertentangan, dan bahkan selalu dilaksanakan dengan meriah di desa-desa daerah pertanian sawah⁸).

Apabila tiba masa panen, maka penduduk setempat mengadakan gotong-royong untuk mengetam padi yang disebut dengan istilah "baarian". Sistem gotong-royong mengetam padi itu dilaksanakan secara ganti-berganti dalam jumlah kelompok yang sama. Misalnya pada minggu pertama bergotong-royong mengetam padi anggota yang satu, maka pada minggu berikutnya bergotong-royong mengetam padi anggota lainnya. Pemilik sawah yang bersangkutan cukup menyediakan makan siang dan kue-kue sekedarnya.

Setelah seluruh padi selesai dituai, di situlah timbul acara "ahui", yakni semacam tarian tradisional untuk melepaskan

padi dari tangkainya dengan menggilasnya dengan telapak kaki. Para pemuda dan pemudi yang melaksanakan acara ahui ini berbaris satu persatu sampai menggilas padi dari tangkainya. Kelompok lainnya melagukan beberapa pantun secara bersahut-sahutan dan setelah tiba pada baris terakhir (keempat) serempak mereka semua menyambutnya dengan "ahui" bersama-sama. Sekarang acara ahui ini disempurnakan dan dijadikan sebuah tarian yang disebut tari ahui dengan perlengkapan alat tabuhan untuk mengiringinya.

Setelah padi disimpan di lumbung, maka pada malam pertama sampai ke tiga di samping lumbung itu diletakan sebuah lampu kecil minyak tanah dan sebuah tempat sirih lengkap isinya dengan kapur, gambir, pinang, tembakau dan beberapa lembar sirih. Hal ini merupakan suatu kepercayaan yang ber-sumber dari animisme, bahwa roh padi yang baru itu perlu dihormati yang kepadanya disediakan penerangan lampu dan persediaan untuk makan sirih.

5.2.3 *Upacara Desa*

Upacara desa hanya dilaksanakan apabila desa itu mendapat serangan wabah penyakit. Misalnya pernah terjadi serangan wabah cacar yang menyebabkan setiap hari terjadi kematian beberapa orang karena mendapat serangan wabah cacar. Begitu pula pernah terjadi serangan wabah penyakit malaria, kolera dan disentri. Di samping adanya tindakan-tindakan dari Pemerintah Daerah setempat untuk menanggulangi penyakit tersebut dengan tindakan secara medis, maka penduduk setempat melakukan suatu upacara terbuka oleh beberapa orang yang membacakan mantera-mantera sambil berjalan keliling kampung dengan membawa air tawar.

Upacara ini dikenal dengan istilah upacara tolak bala yang maksudnya agar desa itu terhindar dari datangnya bala wabah penyakit tersebut. Hal yang sama juga dilakukan apabila sawah

mendapat serangga hama kupu-kupu putih (sundep atau bluk) dan hama tikus yang sering merusakkan areal persawahan.

5.2.4 *Upacara Lelehur*

Upacara lelehur bagi penduduk di Kalimantan Selatan, biasanya terdapat pada lingkungan keluarga gusti-gusti, yakni lingkungan keluarga yang mempunyai garis keturunan dengan keluarga kesultanan Banjarmasin. Lingkungan keluarga gusti-gusti banyak berpusat di Banjarmasin dan Martapura. Keturunan mereka yang berikutnya dikenal dengan lingkungan keluarga antung dan anang.

Adapun upacara lelehur yang mereka pelihara sebagai warisan keturunan ialah adat-istiadat yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan di antara keluarga mereka. Antara lain ialah pada saat akan melaksanakan persandingan mempelai, maka pengantin wanitanya harus dimandikan dengan upacara mandi pengantin. Harus dibuatkan pagar mayang dengan langit-langit kuning sebagai ciri dari lingkungan keluarga gusti-gusti. Sementara itu sebagai acara keramaian disajikan pertunjukan tari topeng dengan iringan seperangkat gamelan⁹).

Biasanya kedua acara ini tidak dapat ditinggalkan dalam melangsungkan suatu perkawinan di antara keluarga mereka. Sebab sering terjadi apabila adat lelehur ini ditinggalkan terjadilah beberapa hal yang tidak diinginkan, yakni seorang atau beberapa orang wanita di antara kegiatan acara itu akan kesurupan. Pada saat kesurupan ini sering orang yang bersangkutan menyebutkan sebab-sebab apa terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan itu. Umumnya hal-hal yang disebutkan itu ialah disebabkan karena tidak terpenuhinya ketentuan adat lelehur yang harus dilaksanakan, ataupun disebabkan pemenuhan ketentuan itu tidak sebagaimana mestinya.

Biasanya yang kesurupan itu wanita, yang kebetulan berada di sini yang fisiknya kurang kuat atau lemah mentalnya

dalam berhadapan dengan sesuatu yang gaib. Kesurupan ini bisa berlangsung lama sepanjang tuntutan-tuntutan yang dikehendaki belum dipenuhi. Dalam berhadapan dengan kenyataan-kenyataan yang seperti ini kalau pada mulanya masyarakat kurang mempercayai adanya peristiwa kesurupan itu, maka apabila berhadapan dengan kenyataan yang dapat dilihat sendiri akhirnya akan mempercayai. Dan kepercayaan akan hal itu akan menjadi suatu kekuatan untuk selalu tidak mengabaikan upacara-upacara leluhur yang kadang-kadang dirasakan sebagai beban secara ekonomis.

Kecuali pelaksanaan upacara itu, masing-masing terdapat lagi persyaratan-persyaratan lain sebagai pelengkap, misalnya keharusan untuk menyiapkan sejumlah kue-kue, meskipun jumlahnya tidak perlu terlampau banyak. Orang telah mengenal adanya jumlah 40 macam kue yang harus disajikan, meskipun bukan untuk disajikan kepada para undangan.

Selain dari pada upacara leluhur yang menyangkut lingkungan keluarga gusti-gusti, maka ada upacara lain yang disebut adat batumbang yang juga dilakukan oleh masyarakat umum. Adat batumbang ini dilakukan biasanya pada hari-hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha yang dilakukan di rumah atau di dalam mesjid. Biasanya adat batumbang ini dilaksanakan karena adanya hajat seseorang. Apabila adat batumbang itu dilaksanakan oleh keluarga gusti-gusti biasanya dengan dasar leluhur keturunan yang harus diikuti oleh keluarga mereka. Adat batumbang yang diselenggarakan di rumah biasanya lebih besar jika dibanding kalau hanya dilaksanakan di mesjid. Keluarga yang akan melaksanakan adat batumbang menyediakan lima macam kue yang terdiri dari apam putih, apam habang, cucur putih, curu habang dan ketupat. Upacara itu diselenggarakan di ruang besar dalam rumah. Di situ dihamparkan selebar tikar yang baik. Kemudian di tengah-tengahnya disusun lipatan-lipatan kain sarung sampai beberapa puluh lembar, sehingga susunan sarung itu cukup tingginya. Di puncak susunan sarung

itu ditutupi dengan selembar kain kaci putih yang kemudian di atas kain putih itu ditaruh selembar daun pisang panurun (jenis pohon pisang yang besar). Tepat di atas daun pisang tadi didirikan di situ dua potong pelepah daun nyiur yang sudah dibersihkan dari daunnya, tetapi masih ada bilah-bilah lidinya sepanjang sejengkal. Tinggi pelepah daun nyiur itu sama tingginya dengan tinggi badan orang yang melaksanakan adat batumbang tersebut. Dinamakan adat batumbang karena tinggi lepepah daun nyiur itu adalah setumbang (setinggi) badan orang yang melakukan adat batumbang tadi. Ujung kedua pelepah daun nyiur itu disandarkan pada dinding rumah dalam ruangan kamar itu agar dapat teguh berdirinya.

Potongan-potongan bilah lidi dari kedua potong pelepah daun nyiur itu, ditusukkan di tempat itu masing-masing untuk sepotong apam putih, dan apam habang barisan kiri dan kanan. Kue-kue cucur habang dan cucur putih pada barisan kiri kanan sepotong pelepah daun nyiur yang lainnya. Kemudian di puncak kedua pelepah daun nyiur itu digantungkan beberapa biji ketupat dan akhirnya di puncak sekali dipasang lilin yang menyala. Kadang-kadang juga diberi hiasan dengan beberapa jalur bunga yang dirangkai dari daun pudak. Acara adat batumbang dimulai dengan berdirinya orang yang berhajat batumbang itu di depan sajian tersebut sambil memegang kedua tumbangan (pelepah daun nyiur yang penuh dengan kue-kue) tersebut.

Ketika itu diserukan dengan nyaring ucapan selawat atas Nabi Muhammad s.a.w. sambil menaburkan beras kuning yang bercampur dengan mata uang sebagai hadiah untuk anak-anak yang berhadir di situ. Semua kue-kue yang ditusuk di pelepah daun nyiur tadi kemudian diambil kembali dan disajikan dalam piring. Para undangan yang hadir akan membacakan Surat Yasin dan doa selamat yang kemudian diakhiri dengan makan bersama untuk mengecap kue-kue adat batumbang tersebut. Adat batumbang ini hingga sekarang masih sering dilaksanakan di desa-desa pada hari-hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Untuk adat

batumbang yang diselenggarakan di mesjid, biasanya dengan mengambil tempat di mesjid-mesjid yang terkenal sebagai mesjid yang tertua. Kadang-kadang untuk menentukan mesjid itu dipilih mesjid yang cukup jauh jaraknya sampai beberapa puluh kilometer dari tempat tinggal orang yang ingin batumbang.

8.2.5 *Upacara Bulan Maulud*

Upacara bulan Maulud dilaksanakan sepanjang bulan Rabiul Awal tahun Hijriyah. Bulan ini dirayakan dengan upacara mengingat bulan itu adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad s.a.w.

Upacara Maulud ini dilaksanakan dengan tema keagamaan secara massal dengan membaca Kitab Barzanji pada bab-bab yang disebut Barzanji Natsran, Qasyidatul Burdah atau pada bab-bab lainnya. Dalam pembacaan Kitab Barzanji ini terdiri atas kelompok-kelompok pembaca utama yang terdiri dari 2 atau 3 orang yang kemudian diikuti oleh seluruh peserta yang hadir. Setelah selesai pembacaan Kitab Barzanji tersebut upacara ditutup dengan pembacaan Doa Barzanji dan makan bersama-sama.

Upacara Maulud ini lebih ramai lagi dilaksanakan di desa-desa di Kalimantan Selatan secara serempak di dalam sebuah kampung sehingga merupakan sebuah pesta massal. Seluruh desa itu dihiasi dengan kain-kain batik yang dibentangkan setinggi sepuluh meter sehingga merupakan barisan bendera-bendera yang berwarna warni. Dalam pesta Maulud itu dihadirkan bermacam-macam kue dan masakan untuk para undangan yang kadang-kadang datang dari kampung-kampung lain yang jauh jaraknya. Dalam peristiwa bulan Maulud ini terjadi pula upacara khusus bagi suatu keluarga yang karena ada hajat sesuatu atau karena adat turun temurun melaksanakan upacara Ayun Maulud.

Upacara Ayun Maulud ini adalah upacara khusus mengayun bayi dalam perayaan Maulud tersebut. Sebuah ayunan yang terdiri dari tiga lapis dari kain kuning digantungkan di tengah-tengah ruangan rumah tempat upacara maulud itu diselenggarakan dengan dihadiri oleh para undangan. Seluruh bagian dari ayunan itu digantungi dengan bermacam-macam bunga-bunga yang dikarang dari daun pudak terdiri dari bunga mawar, cempaka, kenanga, melati, kacapiring. Di situ pula digantungkan bermacam-macam kue seperti cucur, cincin, wadai gelang dan bermacam ketupat seperti ketupat rasul, ketupat bangsul, ketupat burung lepas, ketupat bujur, dan lain-lain. Diberikan pula hiasan-hiasan janur motif Banjar seperti anyaman halilipan, kambang sarai, sarang samut, kambang gagalangan, payung dan ular-ularan. Khusus untuk tali ayunan itu dipakai benang lawai dan ada pula yang mempergunakan tali belaran hutan. Sebelum acara ayun maulud dimulai, maka terlebih dulu dalam ayunan itu diisi dengan batu pipisan yang dibungkus dengan kain kuning. Di bawah ayunan itu diletakan seperangkat piduduk yang berisi beras, gula merah, nyiur, garam, telur ayam dan rempah lainnya. Di samping itu diletakkan di tempat itu sebuah perapin dan gelas berisi air tawar serta tempat sirih (Banjar: panginangan). Apabila tiba saatnya para undangan membawakan ayat Asrakal dalam Kitab Barzanji, maka seluruh hadirin akan serempak berdiri. Dan pada saat itu batu pipisan tadi dikeluarkan dan bayi diletakkan ke dalam ayunan sambil diayun oleh salah seorang keluarga^{1 0}).

Setelah habis asrakal para undangan duduk kembali dan bayi dalam ayunan diberi air tapung tawar di atas ubun-ubunya, sebagai tanda merestui akan keselamatannya. Pada saat itu dibacakan doa Barzanji dan upacara ayun maulud selesai dengan makan bersama. Menurut adat leluhur, perhiasan-perhiasan ayunan tadi, kecuali kue-kue, selama tiga hari baru dilepaskan dari ayunan itu. Sedangkan kain kuning yang dipergunakan untuk ayunan tersebut tetap dipakai untuk selama-lamanya.

5.2.6 *Upacara Bulan Rajab*

Dalam bulan Rajab tahun Hijriyah di Kalimantan Selatan terdapat upacara yang disebut Membaca Riwayat Isra Mi'raj Nabi Muhammad s.a.w. Sepanjang bulan Rajab ini pada tiap-tiap mesjid dan langgar diadakan upacara untuk menerangkan riwayat jalannya Isra dan Mi'raj yang dilakukan oleh pemuka-pemuka agama seperti alim ulama atau muballigh lainnya. Riwayat Isra dan Mi'raj yang sekalipun pada umumnya sudah dikenal dengan baik oleh penduduk Kalimantan Selatan, khususnya kaum muslimin, selalu dibacakan kembali dengan mempergunakan waktu yang cukup lama. Dalam acara tersebut biasanya selalu diselengi dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an.

5.3 *Seni Budaya*

Perkembangan seni budaya cukup pesat, seperti seni tari, seni rupa, seni musik, seni suara, seni drama, dan seni sastra. Di Kotamadya Banjarmasin memiliki 25 buah organisasi, 40 penari, 27 penabuh, jadi 67 penari dan penabuh.

Umumnya tari-tarian klasik itu diiringi dengan lagu-lagu dari perangkat gamelan yang terdiri atas: babun, gender, dau, gambang, saron, salantang kadenong, salantang besar, kenong ketek, gong besar, gong kecil, kangsi, rantai, rantani unang-unang, suling, paksur, dan rebab. Sedang lagu-lagu yang dimainkan di antaranya adalah: ayakan lima, wani-wani, pancar buang, paksi mandong, paksi muluk, kabur, sumbu gelang, mas gemitir, gunjang ganjing lima, gunjang ganjing babun, kambang muni, ketawang, kembang gayam, lagu kencang, sitru anam, dan sebagainya^{1 1}).

Di samping gamelan juga dikenal alat-alat musik lainnya seperti: kuriding, kecap Dayak dan kurung-kurung. Sedangkan orkes-orkes maupun band yang ada di daerah Kalimantan Selatan telah menggunakan alat-alat elektronis misalnya gitar, biola, organ, piano, sello, alat-alat musik tiup, dan sebagainya.

Teater yang bersifat tradisional adalah: Mamanda, wayang gong, wayang kulit, damarwulan, kuda gepang, dan topeng. Teater mamanda umumnya mementaskan cerita dari syair Abdul Muluk karangan Saleha (saudara dari Raja Ali Haji). Itulah sebabnya mamanda juga dinamai Badamuluk. Selain itu juga cerita-cerita dari Seribu Satu Malam dapat dipentaskan melalui mamanda ini. Sedang wayang kulit selalu cerita dari Mahabrata dan Ramayana. Yang lainnya umumnya mementaskan cerita panji.

Teater modern yang dikenal sebagai perkumpulan sandi-wara atau grup drama banyak muncul pada waktu akhir-akhir ini, lebih-lebih setelah terbentuknya Dewan Kesenian Daerah Kalimantan Selatan, perkembangan dari grup-grup yang ada itu makin terarah dan terbimbing^{1 2}).

Sastra Banjar yang sangat mirip dengan sastra Melayu di Sumatera dan di Malaya sejak awal abad XX sudah mulai kehilangan pendukungnya. Yang dapat bertahan hanya beberapa jenis sastra lisan, misalnya *madihin* dan *balamut*. *Madihin* karena bentuknya agak bebas sehingga ada unsur kelincahan dalam perkembangannya sesuai dengan tuntutan zaman. Sedang *balamut* yang sangat terikat dengan alur cerita dan bahasa serta lagunya yang sangat tertentu itu sudah sangat terdesak. Yang telah tenggelam adalah andi-andi. Andi-andi ini merupakan salah satu sastra lisan Banjar yang isi ceritanya sangat mirip dengan cerita panji. Cerita ini dibawakan oleh penyairnya pada saat menuai padi di tengah sawah. Karena kegiatan gotong royong menuai padi seperti dahulu itu sejak beberapa waktu yang lewat sudah tidak dilaksanakan lagi maka baandi-andi juga mulai tidak dikenal lagi. Kesukaran lain juga karena cerita yang dikisahkan itu panjang sekali.

Cerita rakyat yang melukiskan pertarungan antara buruk dan baik, tentang alam semesta, tentang binatang, sampai sekarang belum pernah dibukukan. Yang pernah diusahakan untuk mengumpulkan cerita rakyat itu adalah cerita sekitar tokoh

yang dikenal dengan nama "Palui". Tetapi isi ceritanya sudah dirombak dan disesuaikan dengan kehidupan modern sekarang, sekalipun penerbitannya masih menggunakan bahasa Banjar. Penggarapan cerita Palui ini diusahakan oleh Harian Banjarmasin Post.

Kepandaian mengukir dan memahat kayu dengan motif tumbuh-tumbuhan atau binatang untuk keperluan hiasan rumah sudah sejak lama di daerah Kalimantan Selatan tidak terdapat lagi. Kepandaian melukis di atas kanvas dengan menggunakan cat minyak, sejak awal abad XX sudah mulai dipelajari. Kepandaian mengukir logam, seperti emas, perak atau kuningan.

Yang perkembangannya agak menonjol hingga taraf nasional adalah bidang seni rupa. Hal ini berkat karya Gusti Sholihin bin Gusti Hasan yang lahir pada tahun 1925 dan mendapat bimbingan dari pelukis Jepang pada zaman Jepang yakni Kawazura dan Kusaka (1942–1945). Gusti Sholihin kemudian mengembangkan bakatnya di Jawa dan Bali bersama-sama dengan pelukis-pelukis Sudarso, Zaini, dan Wakijan. Pada tahun 1953 ia bersama dengan Affandi dan Kusnadi mewakili Indonesia dalam pameran Internasional di Sao Paolo. Kemudian mengadakan perlawatan ke Netherland dan Perancis. Dalam tahun 1957–1958 Sholihin bekerja di Banjarmasin dan mendirikan sanggar Tunas Pelukis Muda. Sholihin meninggal dalam tahun 1961 di Bali, dan sisa-sisa dari lukisan Sholihin sekarang berada di Museum Lambung Mangkurat Banjarmasin untuk dipelihara dan diabadikan¹³).

5.4 Pendidikan

Perkembangan pendidikan di Kotamadya Banjarmasin pada periode 1950–1965, menunjukkan arah yang menaik mulai Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi. Dari data yang ada dapat diuraikan perkembangan sekolah-sekolah yaitu:

- 1) Pendidikan Sekolah Dasar
- 2) Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama

- 3) Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas
- 4) Pendidikan Tinggi.

5.4.1 *Perkembangan Pendidikan Sekolah Dasar*

Pada periode 1950–1965 Pendidikan Sekolah Dasar telah menunjukkan kemajuan yang cukup memadai secara kuantitas dibanding periode sebelumnya. Beberapa kampung dalam Daerah Kotamadya Banjarmasin telah didirikan sekolah-sekolah rakyat yang pada saat itu dinamakan sekolah Rakyat Negeri VI tahun.

Pada umumnya hampir setiap SR Negeri, pendidikan yang dilaksanakan berjenjang sampai enam tahun atau kelas satu sampai dengan VI. Pada pihak lain dengan dipelopori oleh swasta bermunculan pula madrasah-madrasah dan Sekolah Rakyat swasta. Madrasah-madrasah merupakan pendidikan Dasar yang lebih berkecenderungan untuk menyajikan pelajaran agama, sedangkan penyajian mata pelajaran umum sangat rendah sekali persentasenya, seluruhnya madrasah swasta^{1 4}).

Untuk sekolah Rakyat Negeri rata-rata penerimaan murid baru dari anak-anak yang sudah berumur enam sampai dengan delapan tahun. Pemerataan kesempatan belajar belum menjadi pemikiran utama.

Dalam periode ini belum terlaksana wajib belajar pada tingkat umur tujuh - duabelas tahun. Keseimbangan antara yang bersekolah dan tidak bersekolah relatif persentasenya cukup besar. Walaupun demikian kesadaran untuk menyekolahkan anak putri sudah tidak menjadi permasalahan lagi. Hanya sebagian kecil masyarakat yang masih berpikir bahwa anak putri cukup sampai tamat sekolah dasar pendidikannya.

Pada daerah Kotapraja Banjarmasin yang kemudian berpredikat Kotamadya Banjarmasin hingga tahun 1965 sudah tercatat hampir tujuh puluh empat buah Sekolah Dasar Negeri, lima buah Sekolah Dasar Subsidi dan 9 buah Sekolah Dasar Swasta^{1 5}).

Sekolah-sekolah dasar tersebut di atas tersebar pada kecamatan-kecamatan dengan perincian sebagai berikut:

No.	Kecamatan	SD	SD	SD	Jumlah
		Negeri	Subsidi	Swasta	
1.	Banjar Barat	28	1	4	33
2.	Banjar Timur	25	2	2	29
3.	Banjar Selatan	2	2	3	7
4.	Banjar Utara	13	—	—	13
Jumlah		68	5	9	82

Beberapa catatan yang perlu diketahui bahwa sekolah Dasar yang tertua adalah Sekolah Dasar Negeri Nagasari yang sekarang terletak di kelurahan Kertak Baru Ilir, dibangun pada tahun 1927 dan sekarang masih dipertahankan bentuknya yang asli walaupun sudah mendapatkan rehabilitasi berat. Beberapa SD Negeri lainnya yang juga dibangun sebelum Indonesia merdeka berjumlah 14 buah.

5.4.2 Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama

Pada periode 1950–1965 pada daerah Kotapraja Banjarmasin dimulai awal perkembangan sekolah menengah pertama dan secara kuantitas dapat dikatakan amat kecil apabila dibandingkan dengan yang dicapai oleh Pemerintah Orde Baru pada periode 1966 sampai sekarang.

Pendirian Sekolah Menengah yang diawali sejak tahun 1950 sampai pada tahun 1965 didasarkan pada beberapa motivasi dan kepentingan sebagai berikut:

- 1) Untuk meningkatkan jumlah masyarakat yang berpendidikan melebihi pendidikan sekolah dasar.
- 2) Untuk mempersiapkan generasi muda untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi dimasa yang akan datang.

- 3) Untuk mempersiapkan tenaga kerja yang berpendidikan menengah baik secara umum maupun secara khusus. Dalam hal ini adanya tujuan tertentu dalam waktu singkat.

Dari pemikiran tersebut di atas didirikanlah oleh Pemerintah dan sebagian oleh masyarakat swasta sekolah-sekolah menengah pertama yang pengawasannya oleh Kementerian Pendidikan dan Pengajaran yang pada saat itu di Kalimantan Selatan bernama Daerah VIII.

Untuk memasuki Sekolah Menengah Pertama diperlukan ujian masuk dan sebagian mata pelajaran yang diujikan datang dari pusat (Jakarta).

Dalam periode tahun 1950–1965 tercatat di Kotamadya Banjarmasin sampai akhir tahun 1965 ada 7 (tujuh) SLTP^{1 6}). Negeri dan 8 (delapan) SLTP Swasta.

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama tersebut keadaannya sebagai berikut:

Periode	Negeri	Swasta
Tahun 1950	1	2
Tahun 1951	1	2
Tahun 1952	1	3
Tahun 1953	1	4
Tahun 1954	1	4
Tahun 1955	2	5
Tahun 1956	3	5
Tahun 1957	3	5
Tahun 1958	3	5
Tahun 1959	3	6
Tahun 1960	4	6
Tahun 1961	6	6
Tahun 1962	6	6
Tahun 1963	6	6
Tahun 1964	6	6
Tahun 1965	7	8

Apabila diperhatikan dari data-data seperti lampiran II terbaca oleh kita bahwa pendirian sekolah menengah pertama pada periode 1950–1965 kemajuan yang diprakarsai oleh swasta lebih banyak jumlahnya dari pada yang dibangun oleh Pemerintah Orde Lama. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pendidikan lanjutan pertama sudah memadai.

5.4.3 Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas

Perkembangan Sekolah Menengah Tingkat Atas pada periode 1950–1965 hampir serupa saja dengan perkembangan SMTP yaitu masih belum seimbang dengan jumlah usia sekolah menengah atas yang pada saat itu sebenarnya pemuda-pemuda cukup banyak, tetapi karena jumlah wadah belajar kurang akhirnya para lulusan sekolah menengah pertama lebih banyak yang menjadi tenaga kerja daripada yang meneruskan ke SMTA¹⁷).

Kedaaan sekolah menengah atas pada periode 1950–1965 adalah sebagai berikut:

TAHUN	NEGERI	SWASTA
1950	1	—
1951	1	—
1952	1	—
1953	1	—
1954	3	—
1955	3	—
1956	4	1
1957	5	1
1958	5	1
1959	5	2
1960	5	2
1961	5	2
1962	5	2
1963	6	2
1964	7	2
1965	8	2

Dari data-data yang dapat diketahui bahwa sekolah lanjutan tingkat atas yang ada di Kotamadya Banjarmasin adalah SGA (Sekolah Guru A). Dari Sekolah Guru Atas inilah banyak tenaga kerja yang dipergunakan menjadi pengajar pada sekolah-sekolah lanjutan pertama di Kalimantan Selatan. Sampai tahun 1965 tercatat keadaan SLTA adalah delapan buah SMTA Negeri dan 2 buah SMTA Swasta.

Sekolah-sekolah lanjutan tingkat atas yang tumbuh di Kotamadya Banjarmasin pada periode 1950–1965 adalah sebagai berikut:

1. SMEA Negeri
2. SGA Negeri
3. SGPD Negeri kemudian menjadi SMOA Negeri, lalu menjadi SGO Negeri
4. SMA Negeri
5. STM
6. SHD
7. SKKA
8. SGTK (lihat lampiran I dan II).

Perkembangan Pendidikan dari tahun 1965 sampai tahun 1979, khususnya pendidikan SMTP dan SMTA Kotamadya Banjarmasin dalam waktu kurang lebih satu setengah dasawarsa yang dimulai tahun 1965 ini berkembang cukup lambat untuk beberapa periode tertentu. Kriteria yang memberikan indikasi kelambanan perkembangan ini adalah apabila yang dijadikan tolok ukurnya perkembangan penduduk Indonesia atau di kota yang bersangkutan yang diambil patokan umum yakni perkembangan 22% (rata-rata) pertahun.

Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini bahwa ada beberapa tahun sesudah tahun 1965 itu yang mengalami nol pertumbuhan. Nol pertumbuhan dimaksud adalah bahwa dari tahun dimulai perhitungan ke tahun berikutnya tidak mengalami pertumbuhan kuantitatif seperti pada tahun permulaan

perhitungan tahun 1965 ketika jumlah sekolah SMTP dan SMTA ada 25 buah. Jumlah ini tetap bertahan sampai tahun 1966. Ini berarti dalam waktu jalan dua tahun pertumbuhan jumlah sama sekali tidak ada, atau dalam istilah lain berada dalam perkembangan nol^{1 8}).

Pada tahun 1967 ada terjadi sedikit pertumbuhan yakni pertambahan sekolah baru sebanyak dua buah. Pertambahan ini terjadi pada sekolah SMTP yang mana pada periode sebelumnya SMTP sebanyak 15 buah menjadi 17 buah. Kalau dilihat dari perkembangan skala tingkat, maka "sektor" SMTA belum ada mengalami perubahan dari 10 buah, sedang kalau dibuat prosentase maka perkembangan terjadi sekitar 8%. Kemudian tahun berikutnya (1968) terjadi lagi pertambahan sekolah. Ini juga pertambahan pada tingkat SMTP. Akan tetapi pertumbuhannya terjadi satu buah, yang apabila diprosentasekan perkembangannya kurang dari 4%.

Tahun 1969 terjadi pertambahan sekolah di dua sektor baik SMTP maupun SMTA. Pertambahan tingkat SMTP, sebanyak 1 buah, sehingga menjadi 19 buah sekolah tingkat SMTP dan tingkat SMTA sebanyak 1 buah, sehingga menjadi 11 buah sekolah tingkat SMTA sehingga jumlah keseluruhan SMTP dan SMTA pada tahun 1969 ini di Banjarmasin ada 30 buah. Apabila dibuatkan prosentase perkembangan satu tahun terakhir terjadi perkembangan sebesar kurang lebih 3,5%.

Dari tahun 1969 sampai dengan tahun 1972 yakni selama 3 tahun sama sekali tidak terjadi perkembangan. Di tahun 1972 jumlah sekolah SMTP dan SMTA tetap sebanyak 30 buah. Ini berarti selama 3 tahun setelah 1969 mengalami pertumbuhan nol. Periode pertumbuhan 1969 sampai dengan tahun 1972 ini kalau dilihat dari perkembangan persekolahan SMTP dan SMTA dari periode 1965 sampai dengan 1979 merupakan tantangan yang paling lama dalam skala nol pertumbuhan.

Berikutnya tahun 1973 terjadi perkembangan jumlah sebanyak 2 buah yakni masing-masing 1 buah pada sekolah tingkat SMTP dan 1 buah untuk sekolah SMTA, yang kalau diprosentasikan tahun 1973 ini terjadi sekitar 6,6%. Ini berarti jumlah keseluruhan sekolah tingkat SMTP dan SMTA di Kotamadya Banjarmasin sampai dengan tahun 1973 ada sebanyak 32 buah dengan perincian sekolah tingkat SMTP sebanyak 20 buah dan sekolah tingkat SMTA sebanyak 12 buah. Sampai dengan tahun 1975 perkembangan boleh dikatakan dalam tingkat sederhana yaitu perkembangan tahun 1974 hanya mengalami pertumbuhan $\pm 3\%$, sedangkan pada periode berikutnya yakni tahun 1975 sama sekali nol pertumbuhan. Perkembangan yang dapat dikatakan pesat terjadi pada tahun 1976 dan tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 1976 terjadi pertumbuhan kurang lebih 15% atau terdapat penambahan sebanyak 5 buah sekolah SMTP dan SMTA sejak periode terakhir sebelumnya.

Pada tahun 1979 jumlah SMTP dan SMTA di Kotamadya Banjarmasin sudah mencapai 61 buah dengan perincian 38 buah sekolah tingkat SMTP dan 23 buah sekolah tingkat SMTA. Kalau dibuat prosentasi perkembangan dari tahun 1976 sampai dengan 1979 terjadi perkembangan 59,8% atau 20% pertahunnya.

Perkembangan persekolahan khususnya sekolah tingkat SMTP dan SMTA sebenarnya bukanlah hanya terjadi secara kuantitatif belaka. Perkembangan juga terjadi secara kualitatif misalnya pengadaan laboratorium dan fasilitas belajar lainnya.

Kalau dilihat secara keseluruhan perkembangan pendidikan untuk tingkat SMTP dan SMTA sejak tahun 1965 sampai dengan tahun 1979 (dalam kurun waktu 15 tahun) mengalami peningkatan kurang lebih 14%. Pada tahun 1965 jumlah sekolah SMTP dan SMTA hanya 25 buah dengan perincian 15 buah SMTP dan 10 buah SMTA. Pada tahun 1979 jumlahnya meningkat menjadi 61 buah SMTP dan SMTA dengan perincian 38 buah SMTP dan 23 buah SMTA¹⁹).

Apabila dilihat dari kapasitas daya tampungnya, pada tahun 1965 SMTP dan SMTA hanya mempunyai daya tampung kurang lebih 12.000 orang. Daya tampung SMTP kurang lebih 7.200 orang, dan daya tampung SMTA kurang lebih 4.800 orang. Sedang kurang lebih 15 tahun sejak 1965 kapasitas daya tampung SMTP dan SMTA meningkat menjadi 29.000 orang lebih. Apabila diperinci maka daya tampung tingkat SMTP kurang lebih 18.000 orang dan untuk tingkat SMTA kurang lebih 11.000 orang.

Jadi perkembangan pendidikan SMTP dan SMTA Kotamadya Banjarmasin, untuk periode 1965 sampai dengan 1979 mengalami beberapa kemajuan, yang apabila diprosentasikan terdapat perkembangan 144% atau perkembangan rata-rata per-tahun 9,5% (apabila dihitung dari perkembangan permulaan). Perkembangan 144% ini terjadi dalam ruang lingkup waktu 15 tahun.

Dalam hal kesempatan belajar bagi SMTP dan SMTA pada tahun 1965 pada umumnya dapat dikatakan seimbang. Dalam hal ini maksudnya antara kapasitas daya tampung di tingkat SMTP dan SMTA masih berimbang dengan permintaan akan fasilitas belajar, sehingga sedikit kemungkinan siswa yang tidak tertampung.

Setelah memasuki era 1970-an maka pelan-pelan permintaan akan fasilitas belajar menanjak. Di sini daya tampung sudah mulai berkurang jika dibanding dengan permintaan yang mulai naik. Kurangnya daya tampung sekolah di tingkat SMTP dan SMTA jika dibanding dengan permintaan fasilitas belajar ini terus menanjak sejak periode akhir 1970-an. Ini artinya setiap tahun berjalan semakin besar kekurangan daya tampung sekolah sehingga akhirnya antara fasilitas SMTP dan SMTA yang tersedia dengan permintaan fasilitas belajar pada kedua tingkat sekolah ini tidak seimbang.

5.4.4 Pendidikan Tinggi

Di Kotamadya Banjarmasin pada periode 1950–1979 telah tumbuh pula perguruan-perguruan tinggi yang dibina oleh pemerintah maupun swasta.

Perguruan tinggi yang tertua adalah Akademi Pimpinan Perusahaan (APP). Setelah UNLAM berkembang, mahasiswanya banyak memasuki Perguruan Tinggi UNLAM. Unlam sekarang mempunyai 8 Fakultas: Fakultas Hukum, Ekonomi, Ilmu Sosial Politik, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pertanian, Kehutanan, Teknik dan Perikanan.

Pada tahun 1958 didirikan B I Pendidikan Jasmani di Banjarmasin. Tahun 1962, BI tersebut diintegrasikan ke dalam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Bandung Cabang Banjarmasin. Dengan adanya Departemen Olah Raga, maka jurusan Pendidikan Jasmani IKIP Bandung Cabang Banjarmasin dilebur menjadi STO, di bawah Direktorat Olah Raga²⁰).

IAIN Antasari dalam tahun 1975, memasuki Dies Natalisnya yang ke-11. Pada mulanya berdiri meliputi 4 Fakultas, kemudian berkembang menjadi 9 Fakultas. Tetapi diadakan integrasi yang didasarkan rasionalisasi dengan menggunakan kriteria minimal, maka Fakultas yang kurang atau tidak memenuhi syarat terkena peraturan, sehingga menjadi 6 Fakultas.

5.5 Pelacuran

5.5.1 Faktor Penyebab (Motivasi) Pelacuran

Dalam mempersoalkan sebab-sebab orang menjadi pelacur, sangatlah komplek. Akan tetapi dari data yang penulis dapatkan dari Departemen Sosial dan Binmas Kotamadya Banjarmasin, dikatakan bahwa hampir setiap wanita pelacur mengatakan faktor ekonomi yang menyebabkan dia melacurkan diri. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa ada pula pelacur yang mempunyai kondisi ekonomi baik, dan ia melacurkan diri hanya sekedar iseng. Di samping faktor tersebut masih banyak faktor-faktor

lain seperti tingkat pendidikan yang rendah, kekacauan dalam keluarga, kondisi kemampuan dan tempat tinggal yang berdesakan membuat semakin banyak wanita yang mengambil jalan pintas.

Kalau kita menengok ke belakang tentang keadaan Banjarmasin pada tahun 1965-an tidak banyak berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Kondisi ekonomi Indonesia pada tahun 1965-an sangat buruk, di mana tingkat inflasi membubung tinggi, dan harga barang-barang kebutuhan pokok meningkat sehingga kehidupan masyarakat khususnya masyarakat desa yang umumnya pendidikannya rendah dan jumlah keluarganya yang besar sangatlah memprihatinkan. Dalam keadaan demikian inilah masyarakat desa berusaha untuk dapat hidup lebih baik dan mereka mengimpikan bahwa kehidupan yang baik akan dapat diperoleh dengan mengadu nasib ke kota. Hal inilah yang merupakan faktor penyebab munculnya banyak wanita-wanita pelacur di Kotamadya Banjarmasin saat itu. Pendapat ini diperkuat oleh penjelasan yang penulis dapatkan dari seorang wanita penghuni gang Mufakat (Komplek pelacuran Tiung) yaitu Rukayah asal Barabai. Dia datang ke Banjarmasin beserta wanita-wanita lainnya dengan harapan untuk mendapatkan pekerjaan di kota ini sehingga dapat membantu beban orang tuanya. Menurut informasi dari orang tersebut dan seorang laki-laki tua yang dulunya suka pelesir di komplek Tiung dan di Rumah kuning pasar Kupu-Kupu (laki-laki tersebut tak mau disebut namanya, hanya mengatakan ia tinggal di Banjarmasin sejak tahun 1927) bahwa komplek Tiung dan pasar Kupu-Kupu dihuni oleh wanita-wanita yang datang dari desa-desa antara lain dari desa Pandahan, Parigi wilayah kabupaten Tapin dan desa-desa lainnya daerah Hulu Sungai²¹). Wanita-wanita yang datang dari desa Pandahan, sering disebut wanita yang berprofesi Gandut (wanita yang pandai menyanyi seperti pantun untuk menghibur laki-laki dan otomatis bisa menemani tidur laki-laki yang dihibur tersebut).

Komplek-komplek tersebut pada umumnya dihuni oleh wanita-wanita desa yang berlatar belakang pendidikan rendah dan kondisi yang rendah pula.

Di desa, apalagi di kota tidak mudah bagi wanita yang berpendidikan rendah untuk memperoleh pekerjaan. Hal itu menyebabkan mereka mengambil jalan pintas demi mencapai berbagai hal yang diinginkan, terlepas dari soal baik buruknya pekerjaan yang dipilih. Kehidupan kota banyak menjerat wanita-wanita desa sehingga dia bernasib malang. Wanita desa sering terpengaruh oleh wanita lain sederahnya yang tampak berhasil meningkatkan taraf hidupnya di kota, dan hal ini akan membahayakan bagi mereka yang berpendidikan rendah. Wanita desa sering tertipu oleh kehidupan kota, sehingga dalam kekecewaan ini sangat mudah masuknya janji-janji palsu atau kebohongan yang dilancarkan oleh orang-orang yang ingin mencari untungnya sendiri, misalnya dengan menjanjikan pekerjaan tertentu dengan gaji besar. Tapi kenyataannya lain. Wanita-wanita itu diperjual-belikan. Banyak wanita melacur karena kehilangan tempat bergantung. Laki-laki yang semula menjanjikan berbagai hal ternyata menghilang sehingga meninggalkan kekecewaan yang mendalam, mengakibatkan wanita mengambil jalan pendek yang paling mudah untuk dilewatinya.

5.5.2 Tempat-Tempat Operasi Pelacuran Liar Di Kotamadya Banjarmasin

Pada tahun 1965 tempat pelacuran liar terdapat sekitar Pelabuhan Lama (sekarang jalan Laksamana R.E. Martadinata). Di malam hari tuna susila berkeliparan mencari mangsanya. Tempat ini sangat strategis, karena awak-awak kapal, dan awak-awak perahu layar sangat memerlukan hiburan-hiburan dari wanita-wanita tuna susila, setelah beberapa lama mengarungi lautan yang ganas dan kehidupan di laut yang keras. Di sekitar pasar Kupu-Kupu (Jalan Pos), di bawah jembatan Coen, (Jembatan Jenderal A. Yani KM 1) di sekitar jalan Kertak Baru juga

ada rumah-rumah tempat pelacuran liar, yang dimiliki germono-germo, WTS-nya ada yang menetap di rumah-rumah tersebut dan ada pula yang datang pada malam hari atau datang pada waktu-waktu tertentu saja.

Setelah tahun 1965, yaitu tahun 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, dan 1979 tempat-tempat pelacuran liar masih tetap seperti tempat-tempat tersebut di atas, bahkan tempat operasi tuna susila mencari mangsanya makin bertambah sesuai dengan perkembangan kotamadya Banjarmasin. Seperti di sekitar pasar Antasari, pelabuhan Tri Sakti dan lain-lain^{2 2}). Di samping itu di tempat-tempat hiburan, bioskop-bioskop dan night club-night club sering terjadi transaksi pelacuran liar. Misalnya seorang hostes dari sebuah night club yang tugasnya menemani tamu-tamu minimum dapat melacurkan diri, dengan jalan bersedia diboking laki-laki iseng untuk di bawa ke hotel-hotel, penginapan-penginapan atau tempat-tempat lain yang memungkinkan terjadinya praktek pelacuran liar, yang tentu saja mendapat imbalan yang lumayan. Pelacuran liar ini mungkin saja terjadi di tempat mana pun, manakala WTS masih menjalankan praktek pelacuran liar.

5.5.3 *Pelacuran Liar di Kotamadya Banjarmasin dan Masalahnya*

Pelacuran liar di Kotamadya Banjarmasin mempunyai latar belakang yang bermacam-macam. Tetapi yang paling dominan adalah sebab tekanan ekonomi dan sikap materialistis serta terlalu memandang keduniawian. Di samping itu ditunjang oleh adanya tempat-tempat hiburan, bioskop-bioskop, restoran-restoran, night club-night club, penginapan-penginapan, hotel-hotel dan lain-lain. Sehingga memberi kemungkinan dan kesempatan kepada tuna susila mengadakan praktek pelacuran liar.

Pelacuran liar membawa dampak negatif yang sangat luas terhadap semua bidang kehidupan masyarakat, khususnya

mengakibatkan kemerosotan moral, bukan saja terhadap laki-laki dewasa, tetapi yang lebih fatal terhadap pemuda-pemuda dan remaja-remaja yang merupakan harapan bangsa. Di samping itu membawa pengaruh juga terhadap ketertiban umum, tradisi dan lain-lain.

Pelacuran liar merupakan suatu penyakit masyarakat, yang harus ditanggulangi secara khusus. Walaupun untuk membasmi secara tuntas itu tidak mungkin, tetapi untuk menghentikan kegiatannya mungkin saja dengan memakan waktu yang sangat lama.

Kebanyakan dari WTS yang mengadakan pelacuran liar adalah wanita-wanita ibu rumah tangga yang mempunyai suami dan anak, karena tekanan ekonomi atau keluarga yang tidak harmonis, atau janda yang kesepian, bahkan gadis yang masih mempunyai orang tua dan saudara, melacurkan diri pada malam hari tetapi pada siang hari dapat bersikap wajar sebagai wanita-wanita baik-baik dalam masyarakat^{2,3}). Hal ini dapat terjadi karena pengaruh sikap kota yaitu masyarakat yang menjurus kepada sikap acuh tak acuh pada tetangga. Pelacuran liar sukar ditanggulangi, karena operasinya sembunyi-sembunyi dan liar.

Dari dinas-dinas dan jawatan pemerintah sudah ada usaha untuk menanggulangi pelacuran liar di kotamadya Banjarmasin, seperti seringnya diadakan razia-razia terhadap tempat-tempat yang diperkirakan tempat operasi pelacuran liar. Dalam razia sering juga ada WTS yang terjaring petugas. Namun jumlahnya sangat kecil, karena tuna susila seolah mengetahui akan adanya razia dan bersembunyi serta menghentikan kegiatannya sementara dilakukan razia.

WTS yang terjaring petugas dan dibawa ke tahanan sementara untuk dikirimkan ke tempat rehabilitasi wanita-wanita tuna susila yang dikelola Departemen Sosial, sering mencururkan air mata minta dikasihani kepada petugas-petugas, dengan mengatakan bahwa dia melakukan pelacuran karena terpaksa, dengan

alasan untuk mencari sesuap nasi. Oleh sebab itu dia minta dilepaskan disertai dengan janji bahwa mereka tidak akan melakukan pelacuran lagi. Tapi para petugas tidak menghiraukan, karena janji tersebut tidak dapat dipercaya.

Di lain pihak petugas-petugas Departemen Sosial yang bertugas di panti rehabilitasi wanita tuna susila sering juga mengalami hambatan-hambatan, yakni wanita-wanita tuna susila yang sedang direhabilitasi di panti ada saja yang dapat melarikan diri, kemudian kembali menjalankan praktek pelacuran liar.

Padahal di panti rehabilitasi wanita-wanita tuna susila diberi pendidikan, seperti pendidikan agana, dan bahkan diberi bermacam-macam keterampilan wanita, yang diharapkan dapat menjadi bekalnya kembali dalam masyarakat dan kembali menjadi wanita baik-baik. Sehingga sebagian dari wanita-wanita tuna susila yang telah direhabilitasi itu dapat benar-benar sadar dan insaf. Dan ternyata memang ada sebagian yang dapat sadar dan insaf kembali ke dalam masyarakat menjadi wanita baik-baik, dan tidak melakukan pelacuran liar lagi. Mereka dapat mandiri dengan modal keterampilan yang diperoleh di panti rehabilitasi wanita tuna susila tersebut.

5.5.4 Pelacuran Pemukiman

Pada tahun 1960–1970, bahwa lokasi perumahan yang mula-mula adalah di Tiung. Tiung adalah pekuburan Cina yang terdapat di jalan Jati. Di sekitar tempat pekuburan ini terdapat dua gang yaitu: gang Sepakat dan gang Sempurna. Di gang-gang inilah dibangun perumahan-perumahan yang berjumlah tidak kurang dari 200 buah. Lokasi ini bukan tempat pelacuran yang terlokalisasi secara resmi melainkan pelacuran gelap yang berada di rumah-rumah dan lama kelamaan tempat ini menjadi ramai sehingga menarik bagi laki-laki iseng yang sering pelesir di sana dan juga menarik juga bagi wanita-wanita yang datang dari daerah maupun dari sekitar Banjarmasin sendiri untuk men-cebur ke lembah ini sebagai wanita penghibur.

Karena lokasi ini musnah terbakar maka pemerintah daerah memindahkan pemukiman di Jalan Jati Gang Sederhana dan Gang Sempurna ini ke lokasi baru yaitu di Begao, yang sekarang tumbuh menjadi tempat pelacuran yang terlokalisasi secara resmi dengan penghuni yang cukup banyak^{2 4}).

Di samping lokasi pelacuran Tiung, terdapat lokasi yang cukup besar yaitu di Pasar Kupu-Kupu, belakang RRI lama jalan Lambung Mangkurat. Lokasi ini pernah jaya di tahun 1965–1970-an. Sebenarnya masih ada lokasi-lokasi lain.

5.6 *Kebakaran*

Kotamadya Banjarmasin merupakan kota yang terlalu banyak menderita kerugian akibat bencana kebakaran. Sebagai faktor penyebabnya antara lain:

- 1) rumah yang berdempet-dempet tidak teratur dan terbuat dari dinding kayu atap daun nifah atau rumbia.
- 2) ketidakteraturan itu membawa pada pola tingkah laku yang tidak hati-hati terhadap api di dapur, lebih-lebih pada bulan puasa angka kebakaran cukup tinggi.
- 3) kemungkinan tindakan disengaja oleh salah satu oknum untuk kepentingan tertentu.

Pada tahun 1965, terjadi enam kali kebakaran. Jumlah itu turun pada tahun 1966 hanya 3 kali, turun lagi 1967 hanya 2 kali, tahun 1968 juga hanya 2 kali dan tahun 1969 1 kali serta tahun 1970 hanya 1 kali. Hal ini disebabkan kerja sama masyarakat terutama di surau-surau, mesjid-mesjid, radio dan radio-radio amatir ikut membantu memperingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap bahaya kebakaran^{2 5}).

Angka itu naik lagi pada tahun 1971 sebesar 2 kali, naik lagi tahun 1972 sebesar 6 kali, kemudian turun tahun 1973 sebesar 4 kali, dan naik pada tahun 1974 sebesar 5 kali. Kemudian masyarakat makin sadar, maka kebakaran turun menjadi

2 kali tahun 1975 dan tahun 1976 dua kali. Tetapi anehnya kenaikan jumlah kebakaran makin meningkat tahun 1977 sebesar 21 kali, dan tahun 1978 turun menjadi 10 kali, sedang pada tahun 1979 naik lagi secara drastis sebesar 20 kali²⁶).

Secara keseluruhan jumlah kebakaran dari tahun 1965 sampai dengan tahun 1979 sebesar 87 kali. (lihat lampiran IV sampai dengan VIII).

Pemerintah daerah tingkat II Kotamadya Banjarmasin melihat jumlah kebakaran yang cukup tinggi di Banjarmasin, berusaha mengatasi dengan cara menambah jumlah pemadam baik pemerintah maupun swasta, memberikan penerangan-penerangan agar berhati-hati menyalakan api di dapur dan kompor serta instalasi listrik. Yang utama pemerintah memberikan fasilitas rumah kredit yang nyaman dan teratur.

5.7 *Rekreasi*

Berbagai usaha pengembangan dan pembinaan aneka wisata telah dilakukan di Banjarmasin:

1) **Wisata Remaja**

Pembinaan terhadap kegiatan wisata remaja, berpedoman pada buku "Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Wisata Remaja" yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Parawisata. Agar aktivitas wisata remaja dapat berhasil guna dan berdaya guna sehingga dapat membawa dampak positif kepada wisatawan remaja, maka telah diadakan kerjasama dengan organisasi pecinta alam (Kompas Borneo, Repala, Jakawana, Bantaz, Banjarmasin Rescue). Di samping itu telah dilaksanakan pula koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yang berkaitan.

2) **Wisata Budaya**

Obyek wisata budaya adalah perwujudan dari pada ciptaan manusia yang berupa karya budaya, karya seni, dan benda-benda purbakala yang kesemuanya punya daya tarik bagi wisatawan untuk mengunjunginya. Untuk melestarikannya, maka

diadakan hubungan kerja sama dengan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tingkat I Kalimantan Selatan. Oleh Bidang Permuseuman, serta Kepurbakalaan Kalimantan Selatan telah diadakan penggalian dan penelitian yang lebih seksama terutama pada: bekas Candi Agung di Amuntai dan rumah-rumah Banjar yang punya ciri khas "Bubungan Tinggi" di Martapura. Wisata budaya semakin menarik bagi wisatawan setelah diresmikan Museum Lambung Mangkurat di Banjarbaru tahun 1979 sebagai pusat informasi budaya dan kepurbakalaan daerah Kalimantan Selatan dan diresmikannya Mesjid Raya Sabial Muhtadin pada tahun 1981 di Banjarmasin dengan fungsinya selain tempat ibadah juga sebagai pusat kegiatan Islam. Khususnya kedua obyek tersebut di atas, sangat banyak mendapat perhatian dan kunjungan para wisatawan asing maupun domestik.

3) Wisata Alam/Rimba

Dimungkinkan oleh keadaan alam Kalimantan Selatan yang kaya dengan hutan belantara dengan pepohonan tropis, dan menghiril riam dengan menggunakan rakit bambu. Keadaan hutan yang masih dianggap perawan tersebut ternyata mengundang banyak minat bagi wisatawan asing maupun domestik/lokal, khususnya bagi grup pecinta alam untuk mengadakan "Adventure Tour". Misalnya ke daerah terpencil Datar Alai, dan Suku Terasing Loksado yang sudah populer. Kini tengah diadakan suatu perencanaan untuk membuat route wisata alam yang benar-benar adventure, yaitu dari Batu Licin ke daerah Loksado Kandangan dengan menembus gunung dan hutan belantara. Kerja sama penjajagan akan dilaksanakan dengan grup pecinta alam.

4) Pengembangan dan Pembinaan Obyek Wisata

Pengembangan, pembinaan dan pengelolaan obyek wisata yang berjumlah 108 buah, sebagian kini ditangani oleh Pemerintah Daerah Tingkat II setempat dan pengusaha swasta. Di samping itu, kami menginventarisasi beberapa obyek wisata

yang benar-benar sangat potensial untuk dikembangkan lebih lanjut dengan pembangunan fisik (sesuai dengan kemampuan dana yang tersedia)²⁷). Beberapa obyek wisata yang sangat mendapat perhatian dan kunjungan para wisatawan diantaranya ialah:

a) *Floating Market* dan *Floating Life*

Terletak di pinggiran kota Banjarmasin yang dapat ditempuh melalui perjalanan sungai/river tour lewat sungai Kuin, sungai Martapura dan Sungai Barito. Pada *Floating Market*, para wisatawan akan dapat melihat aktivitas/transaksi dagang antara pembeli dan penjual yang kesemuanya dilakukan di atas perahu-perahu. Barang dagangan yang diperjualbelikan berupa barang kebutuhan primer dan sekunder, serta di sana akan ditemui pula "Floating Restoran" yang menyajikan makanan dan kue-kue Banjar tradisional. Di samping sungai Kuin, akan terlihat suatu pemandangan unik tentang kehidupan terapung di atas air, misalnya "Floating House", aktivitas ibu-ibu di atas lanting sambil mencuci pakaian, mandi, ngobrol dan menunggu para penjual di atas perahu lewat serta ditambah ramainya anak-anak yang bermain-main di air.

b) Pulau Kembang

Istilah Pulau Kembang ini timbul dari pedagang-pedagang Inggris pada sekitar tahun 1698 yang membuka suatu kantor dagang di Banjarmasin. Hubungan dagang antar Banjarmasin dengan Inggris ini tidak begitu lama berjalan dan ini ditandai dengan hubungan yang tidak begitu baik, hingga timbul hasrat untuk menghancurkan kekuasaan raja Inggris yang berdomisili di daerah itu. Dalam penghancuran itu raja Banjar tidak sendirian, melainkan dibantu atau bergantung kepada tenaga penduduk asli golongan Biaju di daerah Barito.

Pada tahun 1757 malam hari sekitar 3000 orang Biaju turun ke muara Cerucuk. Di sana mereka memulai dengan aksi-

nya melakukan penyerangan terhadap loji-loji serta benteng-benteng Inggris, sedang sisanya bertugas menghancurkan kapal-kapal yang berada di Sungai Barito. Menurut cerita orang tua bahari, bangkai kapal itu lambat-laun tertimbun lumpur Sungai Barito, sehingga menjadi sebuah pulau di tengah-tengah Sungai Barito. Pulau inilah yang kemudian dinamakan orang Pulau Kembang.

Versi lain mengatakan bahwa tanah yang baru muncul di permukaan air itu mengambang atau menguap, sehingga makin lama makin meluas dan akhirnya pulau itu dinamakan pulau kambang atau pulau meluap. Versi lain lagi mengatakan bahwa setelah pulau ini muncul di permukaan air dan ditumbuhi hutan, hutan ini didiami sekelompok monyet. Orang-orang desa sekitarnya menganggap monyet-monyet ini tidak lain adalah orang-orang halus yang memakai sarungan monyet. Sekelompok monyet ini diperkirakan mempunyai seorang pemimpin berupa seekor monyet yang besar sekali. Ia diberi nama si Anggur. Kemunculan pulau yang baru ini bagi masyarakat Banjar, merupakan salah satu keanehan, sehingga mereka selalu beranggapan aneh-aneh saja hingga pulau kembang ini dijadikan mereka tempat bernazar, apabila mereka berkunjung ke sana tak lupa pula selalu membawa sesajen seperti pisang, telur, nasi ketan dan sebagainya. Dan kesemuanya ini selalu disertai mayang pinang dan kembang-kembang, sesajen ini biasanya diberikan kepada sekelompok monyet.

Jadi berdasarkan versi-versi di atas jelaslah, mengapa pulau ini dinamakan Pulau Kembang, karena setiap orang yang berkunjung, berekreasi, atau berhajat ke tempat ini, selalu dibarengi dengan penaburan kembang, sehingga dinamakan Pulau Kembang.

5) Arus Kunjungan Wisata

Jumlah wisatawan asing dan domestik dari tahun ke tahun mempunyai kecenderungan meningkat, ini berdasarkan laporan 16 buah hotel sebagai berikut^{2 8}).

Tahun	Domestik	% tumbuh	Asing	% Tumbuh
1969	4.115	—	1.917	—
1970	5.733	39	2.512	31
1971	5.973	4	2.523	0,4
1972	6.212	4	2.503	0,7
1973	6.235	0,3	3.973	59
1974	7.535	20	4.600	16
1975	13.548	79	3.035	— 34
1976	17.330	51	3.323	9
1977	18.833	8	3.179	— 4
1978	16.873	— 10	3.232	2
1979	19.984	18	2.416	— 14
1980	26.724	34	2.799	16
1981	29.522	10	3.191	14
1982	30.498	3	4.108	29
1983	29.800	— 2	3.198	— 22
1984	37.400	26	3.386	6

Sumber: Sensus dan Statistik 1969—1984.

CATATAN

- 1) M. Idwar Saleh, Banjarmasin (Banjarbaru, Museum Negeri Lambung Mangkurat, 1981–1982) hal. 35
- 2) *ibid*, hal. 37
- 3) H. Ramli Nawawi, Tamny Roeslan (Tim), *Sejarah Sosial Daerah Kalimantan Selatan*, Depdikbud, Jakarta, 1984 hal. 30
- 4) *ibid*, hal. 31
- 5) Sartono Kartodindjo, Struktur Sosial dari Masyarakat Tradisional dan Kolonial, *Lembaran Sejarah No. 4* Yogyakarta, Fak. Sasdaya UGM, 1969, hal. 56
- 6) Abas Alibasjah (Team Ed), *Monografi Daerah Kalsel*, Depdikbud, Jakarta, 1977, hal. 47
- 7) *ibid*, hal. 49
- 8) *ibid*, hal. 50
- 9) *ibid*, hal. 51
- 10) *ibid*, hal. 53
- 11) *Kodam X/LM Membangun*, Kodam X/LM, Banjarmasin, 1962, hal. 20
- 12) M. Idwar Saleh, *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan*, Depdikbud, Jakarta, 1977/1978, hal. 145

- 13) *ibid*, hal. 146
- 14) Kandepe Kotamadya Banjarmasin, 1960
- 15) Kantor Dinas Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Banjarmasin, 1965
- 16) Kandepe Kotamadya Banjarmasin, 1965
- 17) Kandepe Kotamadya Banjarmasin, 1965
- 18) Kandepe Kotamadya Banjarmasin, 1966
- 19) Kandepe Kotamadya Banjarmasin, 1979
- 20) Abas Alibasjah, (Team Gd), *Op Cit*, hal. 45
- 21) Informan Mursidi
- 22) Departemen Sosial, Kodya Banjarmasin, 1950–1979
- 23) Informan Galuh Sari
- 24) Departemen Sosial Kotamadya Banjarmasin, 1960–1979
- 25) BPK Kotamadya Banjarmasin, 1965–1979
- 26) *ibid*
- 27) Bapparda Tingkat I Kalimantan Selatan 1979
- 28) Sensus dan Statistik 1969–1984.

BAB VI PERANAN EKONOMI KOTA

6.1 Peranan Kota Banjarmasin sebagai Pusat Sirkulasi dan Distribusi Barang ke Daerah, ke Luar Daerah, dan ke Luar Negeri

6.1.1 Banjarmasin sebagai Pusat Distribusi ke Luar Daerah (ekspor) Tahun 1950–1965

Kota Banjarmasin merupakan ibu kota Propinsi Kalimantan Selatan. Sebagai ibu kota propinsi maka Banjarmasin merupakan pusat penyelenggaraan pemerintahan, dan sebagai pusat kegiatan perekonomian yang sangat ramai. Hal ini karena para pedagang baik yang berasal dari daerah ini maupun yang datang dari luar daerah banyak datang dan pergi berdagang ke kota Banjarmasin, bahkan ada yang datang dari luar negeri, seperti Jepang, Singapura dan lain-lain¹).

Seperti telah diketahui bahwa mengumpulkan hasil hutan merupakan salah satu mata pencaharian penduduk Kalimantan Selatan di samping menangkap ikan, beternak, dan menyadap karet. Barang hasil kumpulan mereka itu dijual kepada pedagang besar di Banjarmasin atau Kotabaru yang menjualnya ke luar negeri (ekspor) atau mengirimnya ke salah satu pelabuhan di

Jawa, di Sulawesi dan lain-lain daerah di Indonesia (interinsulair) yang jenisnya seperti rota, damar, getah jelutung, lilin lebah, akar lilipan, sarang burung, kulit biawak, kulit ular, kulit buaya, madu lebah dan kulit tenggiling.

Selain hasil hutan yang telah terkumpul, maka hasil perikanan, hasil kerajinan tangan, karet dan kayu juga merupakan komoditi ekspor yang banyak menunjang kehidupan perekonomian Kalimantan Selatan yang pusat perdagangannya di kota Banjarmasin.

Pada tahun 1950 Banjarmasin mulai terkenal dengan ekspor karetnya ke luar negeri melalui pelabuhan Banjarmasin. Karet ini adalah hasil produksi penduduk Kalimantan Selatan. Karet ini adalah karet asap yang berjumlah 46.424 ton dengan persentasinya 62%, sedang jumlah karet keringnya yang diekspor sebesar 75.074 ton dari hasil yang telah diproduksi penduduk. Selanjutnya pada tahun 1951 jumlah karet asap yang diekspor ke luar negeri adalah sebesar 35.473 ton dengan persentasinya 81% dan karet keringnya sebesar 43.511 ton²).

Sejumlah karet yang disebutkan di atas telah dikirim ke luar negeri seperti Singapura, Jepang, Hongkong, Cina dan lain-lain.

Oleh karena pada tahun 1950 terjadi Korea - Boom, akibat perang, karet alam menjadi sangat penting. Ekspor karet Kalimantan Selatan meningkat dengan cepat, peredaran uang pun menanjak. Hidup rakyat desa yang mengerjakan karet mengalami kemakmuran luar biasa. Rakyat kota pun ikut menikmatinya. Orang mudah berusaha karena mata pencaharian mudah. Perdagangannya berkembang sebab daya beli rakyat kuat. Di Banjarmasin ketika itu perdagangan hampir semuanya dimonopoli oleh golongan pribumi. Oleh karena meningkatnya harga karet di pasaran dunia tersebut, maka daerah Kalimantan Selatan semakin banyak mendirikan rumah-rumah asap karet baik itu dengan izin resmi maupun secara lisan.

Tahun 1950 tersebut jumlah rumah asap karet sebanyak 1.725 buah dengan jumlah kapasitasnya 337.006 kg dan pada tahun 1951 jumlah rumah asap 1.854 dengan jumlah kapasitasnya 347.509 kg.

Dalam bidang perkebunan, selain karet sebagai bahan komoditi ekspor pada masa itu, yang tidak kalah pentingnya adalah rotan. Rotan sebagai penghasil penduduk, juga telah banyak berperan dalam meningkatkan kehidupan rakyat di Kalimantan Selatan. Seperti halnya karet maka rotan ini juga telah dikirim ke luar negeri seperti Singapura, Jepang, Hongkong, Filipina, Cina dan lain-lain.

Ekspor karet dan rotan ini ada yang dilaksanakan secara langsung dengan melalui kapal-kapal luar negeri yang pulang dan pergi berdagang ke Banjarmasin dan ada pula yang dilaksanakan dengan cara tidak langsung, dalam arti bahwa barang ekspor tersebut dibawa oleh para pedagang ke pelabuhan di Jawa, yang kemudian dari Jawa dikirim ke luar negeri.

Kemudian selain dari produksi perkebunan seperti karet dan rotan yang cukup penting di daerah Kalimantan Selatan, juga banyak potensi sosial ekonomi lainnya di daerah ini yang dikembangkan pada waktu itu.

Di bidang pertanian, daerah Kalimantan Selatan dapat dikatakan telah berkembang menjadi salah satu lumbung padi Kalimantan yang terkenal. Pada tahun 1950 itu untuk seluruh pulau Kalimantan tercatat 191.369 hektar sawah dan 200.815 hektar ladang dengan lebih kurang 269.113 ton padi³).

Di bidang perikanan, daerah Kalimantan umumnya dan Kalimantan Selatan khususnya, boleh dipandang sebagai daerah yang cukup kaya dengan ikannya, baik ikan laut maupun ikan sungai dan danau. Daerah-daerah sepanjang pesisir pantai pulau Kalimantan umumnya dihuni oleh para nelayan yang sudah turun-temurun dengan profesi tersebut. Di Kalimantan Selatan daerah yang paling terkenal dengan ikannya adalah Kotabaru.

Perikanan laut sangat banyak membawa hasil bagi masyarakat di daerah ini.

Selain bidang-bidang yang tersebut di atas, bidang peternakan tidak kalah pentingnya bagi masyarakat di daerah ini. Di sini orang beternak kerbau, kambing, ayam dan utamanya bebek. Alabio dapat dipandang sebagai suatu sentral pemeliharaan bebek yang terbanyak dan terbaik di daerah Kalimantan Selatan ini.

Dalam bidang pertambangan keadaan di daerah Kalimantan Selatan khususnya, pada masa setelah pengakuan kedaulatan juga memberikan andil. Pertambangan intan di Martapura sejak zaman penjajahan sudah terkenal. Demikian pula dengan tambang-tambang minyak dan batu bara, juga telah banyak memberikan andilnya bagi daerah ini.

Hasil hutan seperti damar, rotan, kayu dan sebagainya kiranya turut pula memberikan andil dalam pelaksanaan ekonomi di Kalimantan Selatan khususnya dan Kalimantan secara keseluruhan pada umumnya.

Di samping itu industri kerajinan tangan telah pula berkembang semenjak pengakuan kedaulatan. Daerah-daerah seperti Margasari Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan merupakan salah satu pusat industri kerajinan tangan anyam-anyaman. Demikian pula dengan Daerah Negara (Kalimantan Selatan), juga dipandang sebagai salah satu pusat kegiatan industri ringan di daerah ini, bahkan dalam masa peperangan. Di daerah ini pernah dibuat senjata-senjata api⁴).

Hasil produksi yang merupakan potensi sosial ekonomi penduduk di daerah Kalimantan Selatan tersebut, disalurkan atau diperdagangkan oleh para pedagang ke daerah-daerah lain, baik dalam kawasan Kalimantan ini maupun ke luar Kalimantan, dengan pusat perdagangannya adalah Kota Banjarmasin. Bahkan dari beberapa jenis bidang produksi yang dihasilkan penduduk tersebut di atas telah ada di ekspor ke luar negeri.

Dalam hal pendistribusian kegiatan perekonomian di daerah Kalimantan Selatan yang pusatnya di Banjarmasin para penduduk selaku produsen yang tinggalnya di daerah pedalaman, menjualnya ke Banjarmasin. Di samping itu di antaranya ada juga melalui para pedagang yang pulang dan pergi berdagang antara Banjarmasin pedalaman. Untuk mengangkut barang-barang dagangan yang telah dibeli dari penduduk pedalaman itu melalui lalu lintas sungai dengan menggunakan perahu bermotor, sedangkan bagi para penduduk pada masa itu sebagian besar masih menggunakan perahu dayung. Barang-barang yang telah diperdagangkan dari daerah pedalaman ini kemudian dibeli lagi oleh para pedagang lain yang ada di kota Banjarmasin, baik itu pedagang Banjarmasin sendiri maupun pedagang lain yang datang dari daerah luar pulau Kalimantan ini⁵).

Selanjutnya dari Banjarmasin ini diedarkan lagi ke beberapa daerah lain seperti Jawa, Makassar, Madura ke Sumatera dan lain-lain, yang dibawa oleh para pedagang yang pulang pergi ke Banjarmasin. Sedangkan di Kalimantan selain dalam kawasan Kalimantan Selatan sendiri, hubungan dagang juga dilakukan ke Sampit, Pangkalanbun, Pontianak, Samarinda, Kutai dan lain-lain.

Demikian Banjarmasin pada tahun 1950 sampai dengan tahun 1951 cukup ramai dalam kegiatan perekonomian, sehingga Banjarmasin merupakan pusat distribusi ke luar daerah.

Sejak tahun 1949 sampai dengan tahun 1955 (sesudah pengakuan kedaulatan) seluruh pulau Kalimantan merupakan satu propinsi. Masyarakat pada masa itu tidak begitu banyak mengalami perubahan dibandingkan dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat pada saat terbentuknya Daerah Tingkat I.

Daerah tingkat I yang telah dibentuk menjadi tiga propinsi itu adalah Propinsi Kalimantan Barat, Propinsi Kalimantan Selatan, dan Propinsi Kalimantan Timur. Pertimbangan-

pertimbangan yang menjadi dasar dibentuknya daerah tingkat I menjadi tiga propinsi tersebut adalah sebagaimana yang telah diutarakan sebelumnya, antara lain disebabkan kesulitan perhubungan lalu lintas, terutama lalu lintas darat. Oleh karena pertimbangan itulah maka dengan Undang-Undang No. 25 tahun 1956 dipecahlah propinsi Kalimantan yang semula menjadi satu Propinsi Kalimantan yang semula menjadi satu propinsi menjadi tiga propinsi seperti yang disebutkan di atas. Propinsi Kalimantan Selatan pada masa itu wilayahnya masih meliputi pula wilayah Propinsi Kalimantan Tengah sekarang.

Dalam situasi percaturan politik seperti tersebut di atas, penyelenggaraan kehidupan sosial ekonomi masyarakat daerah ini, turut pula mendapat pengaruhnya. Perlahan-lahan namun pasti, keadaan ekonomi di daerah ini terus saja bergerak ke suatu perkembangan dengan melewati pasang surutnya. Pertanian dan peternakan masyarakat, sedikit demi sedikit menampakkan perkembangan yang nyata. Demikian pula halnya dengan industri ringan. Semua itu antara lain disebabkan oleh karena timbulnya kesadaran masyarakat sendiri, yang ketika itu mereka sudah mulai mendirikan koperasi-koperasi guna melindungi anggota-anggotanya dan mengembangkan usaha.

Mengenai bidang perkebunan, terutama perkebunan karet, setelah tahun 1951 berakhir, harga karet alam di pasaran dunia mulai merosot. Pada akhir tahun 1951 tersebut banyak rumah-rumah asap yang terpaksa ditutup agar tidak banyak menderita kerugian, karena harga karet terlalu turun. Turunnya harga getah karet itu mengakibatkan turunnya pendapatan petani, yang lambat laun menekan kehidupan sosial masyarakat. Pada tahun ini ekspor karet ke luar negeri mengalami kemacetan, karena harganya di pasaran dunia terlampau murah.

Selanjutnya antara tahun 1951 hingga tahun 1962, keadaan di daerah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah khususnya, boleh dikatakan agak terganggu. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh karena adanya gangguan keamanan oleh

gerombolan pemberontak yang menamakan dirinya Kesatuan Rakyat Yang Tertindas (KRYT) yang dipimpin oleh "Ibnu Hajar"⁶).

Akibat gangguan-gangguan tersebut, maka terhambat pulalah perkembangan sosial ekonomi di daerah tersebut karena desa dibakar, penduduk mengungsi ke kota, utamanya ke Banjarmasin. Pertanian dan kehidupan ekonomi desa rusak dibuatnya. Dan setelah keadaan daerah mulai aman kembali rakyat sudah mulai dapat bekerja dengan aman. Pada tahun 1962 harga karet mulai naik lagi di pasaran dunia, meskipun naiknya harga karet itu secara berangsur-angsur kembali. Pada tahun 1963 masyarakat Kalimantan Selatan sedikit resah akibat jatuhnya nilai mata uang Indonesia yang telah diumumkan oleh Presiden pada saat itu. Tetapi hal ini tidak seberapa lama, dan kemudian masyarakat sesudah itu dapat tenang kembali. Jatuhnya nilai mata uang itu hanya dalam waktu enam bulan saja. Pada tahun 1964 penduduk sudah kembali dapat bekerja dan keadaan sosial ekonominya boleh dikatakan sudah normal seperti biasa. Pada tahun 1965, gangguan akibat G-30-S/PKI tidak begitu nampak pada daerah Kalimantan Selatan terutama di Banjarmasin. Pada tahun 1965 ini di daerah Kabupaten Banjar, Kecamatan Cempaka telah ditemukan sebutir intan besar seharga puluhan juta rupiah. Intan ini menjadi milik negara dan sekarang sudah berada di ibu kota Jakarta.

Demikianlah kiranya uraian mengenai kota Banjarmasin sebagai distribusi ke luar mulai pada tahun 1950-1965 yang dapat penulis deskripsikan pada tulisan ini.

6.1.2. *Banjarmasin sebagai Pusat Distribusi ke Dalam Daerah (impor) Tahun 1950-1965*

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas bahwa Banjarmasin sebagai pusat distribusi ke luar, baik itu ke luar daerah kepulauan (interinsulair) maupun ke luar negeri, mempunyai

peranan yang sangat penting dalam kegiatan sosial ekonomi penduduk di daerah Kalimantan Selatan.

Sebaliknya dari kegiatan distribusi mengekspor ke luar daerah Banjarmasin (Kalimantan Selatan) juga dilakukan kegiatan mengimpor atau memasukkan berbagai jenis barang dari luar. Baik itu barang yang diimpor dari luar negeri maupun barang yang berasal dari daerah pulau-pulau lainnya. Berbagai jenis barang dari luar yang diimpor tersebut seperti mesin-mesin, alat-alat rumah tangga seperti piring, mangkok, gelas dan lain-lain. Selain itu juga impor bahan-bahan pokok keperluan hidup sehari-hari seperti beras, tepung terigu, gula pasir, minyak tanah, garam, kopi, teh, tembakau, bawang dan lain sebagainya. Di samping itu juga memasukkan barang-barang seperti pupuk, semen, kain dan pakaian jadi.

Barang-barang seperti mesin-mesin merupakan barang impor dari luar negeri dari Jepang, Singapura, dan beberapa negara lainnya. Sedangkan barang-barang impor lainnya dari luar negeri pada saat itu adalah seperti beberapa jenis peralatan rumah tangga yakni piring, mangkok, gelas, sendok dan lain-lain peralatan dapur. Untuk jenis bahan-bahan pokok sebagian juga ada yang diimpor dari luar negeri seperti; beras dari Muangthai, tepung terigu dari Amerika, minyak tanah dari beberapa penghasil minyak seperti Iran, Irak, Kuwait dan lain-lain. Sedangkan barang-barang lainnya seperti semen dan kain-kain serta pakaian jadi juga ada yang diimpor dari luar negeri. Namun sebagian di antara barang-barang seperti tersebut di atas di antaranya ada juga didatangkan dari daerah-daerah lain di Indonesia, seperti beras dari Jawa dan Makasar, garam dari Pulau Madura yaitu Kalianget, kopi, teh, tembakau dan bawang sebagian besar didatangkan dari Jawa. Sedangkan barang-barang jenis alat-alat dapur seperti piring, mangkok, gelas, sendok dan lain sebagainya sebagian ada juga yang berasal dari Jawa. Begitu juga pupuk, semen, jenis-jenis kain dan pakaian jadi sebagian

ada juga yang didatangkan dari Jawa, tetapi untuk pupuk merupakan barang yang berasal dari Sumatera.

Dari semua barang-barang yang telah disebutkan di atas oleh para pedagang diteruskan memperdagangkannya ke daerah-daerah pedalaman, dan hasil penjualannya dibelikan lagi kepada hasil hutan atau barang lainnya yang kemudian dijual lagi kepada para pedagang besar di Banjarmasin. Jadi oleh para pedagang barang-barang yang telah dibawanya ke pedalaman itu dari Banjarmasin ditukar lagi dengan barang-barang hasil penduduk setempat yang selanjutnya dijual lagi di kota Banjarmasin.

Dengan demikian maka barang-barang yang telah diperdagangkan baik itu barang yang berasal dari penduduk untuk dijual ke daerah lain maupun barang impor atau yang didatangkan dari daerah luar, semuanya melalui pelabuhan pusat di Banjarmasin.

Jadi dalam periode tahun 1950–1965 itu Banjarmasin di samping mengekspor barang-barang yang berupa hasil bumi ke luar daerah, juga telah mengimpor atau memasukkan barang-barang dari luar, baik itu barang yang berasal dari luar negeri maupun barang-barang yang berasal dari dalam negeri sendiri seperti dari daerah pulau Jawa, Madura, Makasar, Sumatera dan lain-lainnya.

Dalam hal kegiatan mengimpor ini seperti halnya kegiatan mengekspor seperti dikemukakan di atas, tidak lepas dari mengalami pasang surutnya. Hal ini disebabkan pengaruh kegiatan politik di masa itu. Namun demikian Banjarmasin masih tetap ramai dalam kegiatan perekonomian di daerah Kalimantan Selatan ini, karena semua barang, baik yang ke luar maupun yang masuk ke dalam daerah tetap berpusat di kota Banjarmasin, dengan pelabuhan dagangnya yang terkenal pada masa itu terletak di Sungai Martapura.

Selanjutnya perkembangan ekonomi sesudah tahun 1965 cukup banyak menunjukkan kemajuan. Hal ini karena berkembangnya sarana perhubungan serta sarana sosial ekonomi lainnya. Dengan kemajuan ini daerah Kalimantan Selatan pada akhir bulan Mei 1968 sudah terdapat industri-industri ringan seperti tekstil maupun industri kerajinan rakyat.

Dalam tahun 1965 barang-barang yang melalui kota Banjarmasin adalah hasil pertanian, pertambangan dan penggalian, industri, bangunan dan lain-lain, juga termasuk hasil peternakan yang disalurkan melalui kota Banjarmasin. Penyaluran itu dilakukan ke daerah pedalaman kota-kota di Kalimantan Selatan dan juga ke luar Kalimantan antara lain ke Jawa, khususnya Surabaya, Semarang, dan Jakarta. Selain tahun ini penyaluran barang dagangan di samping ke propinsi luar Kalimantan, juga ke luar negeri khususnya ke Malaysia untuk melancarkan perdagangan di tempat-tempat penting seperti Kuching dan Tawao. Selain barang ekspor yang terdapat di atas juga karet, yang merupakan hasil ekspor daerah Kalimantan Selatan yang tidak dapat dipisah-pisahkan dengan sektor perdagangan Kalimantan Selatan. Dari sekian banyak barang yang di ekspor 90% adalah karet dan selebihnya adalah hasil-hasil yang lainnya⁷). Dalam tahun 1966 tidak ada peningkatan. Kemudian pada tahun 1967 realisasi ekspor sebesar U.S.\$ 13.200.321,23; mendekati ekspor yang ditetapkan, sedangkan target ekspor yang ditetapkan adalah sebesar U.S.\$ 13.700.00;

Kalau dilihat jumlah devisa realisasi ekspor tahun 1967, maka jumlah bonus ekspor (B.E.) yang diterima oleh eksportir 75% dari U.S.\$ 13.20.331.23 Berhubung menurunnya harga karet di luar negeri maka ada permintaan agar harga FOB (Free on Board) jangan terlalu tinggi⁸).

Tahun 1968 untuk kegiatan perdagangan di Kalimantan khususnya Banjarmasin sebagai penyalur ke daerah berjalan

seperti biasanya, tetapi untuk barang luar negeri keadaannya sangat menurun mengingat harga karet di luar negeri menurun seperti yang terjadi pada tahun 1967. Karena itu untuk mencapai proyek ekspor diperlukan penyesuaian harga yang layak, dan hal ini diusulkan agar harga fob ditentukan oleh Menteri Perdagangan dengan wewenang sepenuhnya. Karena ternyata di wilayah Kalimantan juga mempunyai potensi produksi seperti tenunan rakyat, anyaman purun, anyaman rotan halus, batu permata dan lain-lain yang dapat diekspor, yang juga dapat menghasilkan devisa termasuk ADO (Alokasi Devisa Otomatis), yang dapat meningkatkan kualitas ekspor, maka ditingkatkanlah mutu barang yang akan diekspor ke luar negeri. Untuk melancarkan penyaluran, selain ke luar negeri juga barang-barang kebutuhan rakyat yang berada di daerah Kalimantan Selatan disalurkan ke daerah-daerah lain yang membutuhkannya. Kalimantan adalah wilayah yang juga menghasilkan bahan baku yang dibutuhkan oleh penganggajian dan pengusaha kecil di lain kepulauan seperti Jawa, Bali dan sebagainya, karena daerah Kalimantan dapat membantu suplai bahan baku tersebut ke wilayah dan daerah lain yang membutuhkannya. Di mana perlu dilakukan tukar-menukar (domestik barter) dengan barang ternak dan lain-lain yang diperlukan oleh wilayah Kalimantan seperti tekstil, tengkawang dan sebagainya.

Tahun 1969, hubungan daerah perdagangan yang terpenting adalah perdagangan antar pulau terutama dengan Surabaya sangat mudah, aman dan lancar. Kalau dilihat dari jumlah perdagangan antar pulau yang melalui pelabuhan Banjarmasin dalam tahun ini cukup meningkat dari tahun sebelumnya. Dapat kita ketahui bongkar berjumlah 101.480 (ton), dan muat (ton) berjumlah 51.751. Jadi hal ini sangat berperan bagi tenaga kerja di pelabuhan. Selain itu perdagangan lokal yaitu perdagangan antara kabupaten, kecamatan, dan desa-desa di daerah Kalimantan Selatan dan sekitarnya dirasakan sangat penting.

PENYALURAN ANTARA TAHUN 1970—1973
(Kegiatan pelabuhan kota Banjarmasin berdasarkan jumlah muatan dalam ton dari tahun 1970 s.d. 1973)

Tahun 1970	bongkar	178.231 ton	muat	117.412
Tahun 1971	bongkar	188.080 ton	muat	130.218
Tahun 1972	bongkar	227.413 ton	muat	165.360
Tahun 1973	bongkar	148.579 ton	muat	143.542

Hubungan perdagangan dengan daerah luar terutama dengan kota Surabaya sangat mudah dan lancar. Selain peranannya terhadap penghasilan maka secara implisit sektor perdagangan ini sangat berperan aktif terhadap penyerapan tenaga kerja daerah. Semakin luas lapangan kerja yang bisa diisi oleh angkatan kerja yang tersedia semakin berkurang, pengangguran yang bertumpuk di sekitar pertanian.

Peranan lainnya sektor perdagangan ialah dalam hal penerimaan atau pendapatan negara atau pendapatan daerah, yaitu dengan adanya pajak-pajak atau distribusi yang dibebankan terhadap perdagangan beberapa produk tertentu. Semakin ramai perdagangan semakin besar penerimaan yang diperoleh.

Adanya suatu sistem perdagangan yang teratur dan lancar, sangat berpengaruh pula terhadap kestabilan harga, yang sangat penting artinya terhadap usaha-usaha pembangunan oleh pemerintah sendiri maupun oleh swasta. Dalam tahapan tahun-tahun ini telah berhasil diusahakan pengaturan pembinaan sektor perdagangan sehingga tingkat inflasi dapat ditekan dan dikuasai. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kelancaran dalam pengadaan barang dan jasa serta penyaluran dalam masyarakat yang manfaatnya sangat terasa sampai ke daerah-daerah propinsi⁹).

Perdagangan antar pulau (interinsulair) yang berarti berlangsung dengan pulau Jawa khususnya dengan kota-kota Surabaya, Semarang, dan Jakarta. Barang-barang yang didatangkan pada umumnya adalah barang-barang konsumsi dan barang bahan bangunan. Sedangkan barang-barang yang dikirim kebanyakan barang-barang dari hasil-hasil pertanian yang dalam arti luas baik bahan-bahan mentah atau setengah jadi, maupun barang-barang hasil-hasil kerajinan rakyat. Pengadaan barang-barang seperti beras, gula, dan tepung terigu dipegang oleh Depot Logistik sebagai instansi yang menanganinya. Barang-barang lain sudah tentu ditangani oleh instansi-instansi seperti Kantor Departemen Perdagangan.

Masalah penyaluran hasil-hasil produksi baik berupa hasil pertanian maupun hasil industri perlu mendapat perhatian. Perdagangan ekspor bagi daerah Kalimantan Selatan berperan terhadap perekonomian masyarakat. Perdagangan ekspor tersebut banyak menampung tenaga kerja baik dalam kegiatan perdagangan itu sendiri maupun dalam kegiatan barang-barang ekspor tersebut. Data perdagangan ekspor Kalimantan Selatan melalui Banjarmasin dari tahun 1969 sampai dengan 1974 mengalami pasang surut.

Pada tahun 1969, ekspor kayu 14,2 juta dollar, kemudian tahun 1970 cenderung turun menjadi 13,6 juta dollar, atau 0,6 juta dollar (4,23%). Angka ini cenderung turun pula tahun 1971 menjadi 10,7 juta dollar, atau sebesar 2,9 juta dollar (2,13%)^{1 0}). Pada tahun 1972 lebih meruncing turunnya angka itu menjadi 8,4 juta dollar, atau turun sebesar 2,3 juta (21,74%). Pada tahun 1973 angka ini naik dengan drastis menjadi 19,1 juta dollar, atau naik 10,7 (127,5%). Kenaikan itu sangat drastis, atau naik 10,7 (127,5%). Kenaikan itu sangat drastis tetapi pada tahun 1974 cenderung turun lagi menjadi 15,4 juta dollar, atau sebesar 3,7 (18,85%).

Untuk ekspor karet cenderung makin tahun makin meningkat dari tahun 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 dan 1974. Kecenderungan itu dalam jutaan dollar dari 1,0, 2,0, 5,8, 8,3, 17,7 dan 36,9. Komoditi lain-lain ekspor dalam jutaan dollar cenderung naik dari tahun 1969 sampai dengan 1974. Kecenderungan itu dari 0,5; 0,5; 0,4; 1,2; 2,7 dan 4,6.

Angka rata-rata kenaikan itu dari tahun 1969 sampai tahun 1974, baik ekspor kayu maupun karet dan komoditi lain-lain, adalah tahun 1969 16,2 juta dollar, pada tahun 1970 menjadi 16,3 juta dollar, berarti naik 0,1 atau 0,62%. Kemudian tahun 1971 naik menjadi 17,0, berarti naiknya sebesar 0,7 atau sebesar 4,29 dan pada tahun 1972 naik menjadi 17,9, berarti naik 0,9 atau sebesar 5,29%. Tahun 1973 kenaikan itu menjadi 22,4 juta dollar, berarti naik sebesar 4,5 juta dollar, atau sebesar 25,14%¹¹). Angka rata-rata pertahunnya dari tahun 1969 sampai dengan 1974 adalah 16,2 juta dollar menjadi 56,9 juta dollar selama 6 tahun sebesar 40,7 juta dollar atau sebesar 250%. Angka rata-rata pertahunnya adalah 6,8 juta atau 41,11% (lihat tabel-tabel berikut.

**Barang-barang ekspor perdagangan melalui
pelabuhan Banjarmasin dalam juta
tahun 1969 – 1974**

Tahun	Kayu	Karet	Lain-lain Komoditi
1969	14,2	1,0	0,5
1970	13,6	2,0	0,5
1971	10,7	5,8	0,4
1972	8,4	8,3	1,2
1973	19,1	17,7	2,7
1974	15,4	36,9	4,6

**PERKEMBANGAN EKSPOR KALIMANTAN SELATAN MELALUI BANJARMASIN
TAHUN 1969 SAMPAI DENGAN 1974**

Tahun	Karet		Kayu		Lain-lain Komoditi		Jumlah	
	Volume (Kg)	Nilai (US \$)	Volume (M3)	Nilai (US \$)	Volume (Kg)	Nilai (US \$)	Volume	Nilai (US \$)
1969	57.254.000	14.238.000	59.690,501	1.053.946,09	5.968.204	511.000	63.222.204 kg 59.690,501 m3	16.252.946,09
1970	41.859.102	15.653.033	109.174,476	2.095.424,70	9.186.300	577.324,88	42.045.402 kg 109.174.476 m3	16.325.782,58
1971	36.783.476	10.767.701,53	311.169,350	5.860.289,61	9.862.543	461.918,02	46.646.019 kg 311.169,350 m3	17.089.909,16
1972	31.798.813	8.339.523,04	457.402,309	8.416.718,60	10.116.136	1.215.729,60	41.914.949 kg 457.402,390 m3	17.971.971,24
1973	39.284,304	19.132,730,76	547.789,800	17.768,129	8.419.478	2.775.203,88	47.703.782 kg 537.798.800 m3	22.465.732,64
1974	23.919.523	15.468.497,82	817.206,450	36.911.715,92	8.656,962	4.614.874,37	32.576.941 kg 817.206,450 m3	56.995.061,11
Jml.	230.899.224	61.619.486,15	2.232.441,967	72.106.223,92	52.209.623	10.156.023,75	283.108.847 kg 2.292.441,967 m3	147.101.402,82

Keterangan: Kayu, sumber: Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Selatan

Karet dan lain-lain komoditi sumber: Perwakilan Perdagangan Kalimantan Selatan

Sampai dengan tahun 1977, ekspor karet di daerah Kalimantan Selatan yang melalui pelabuhan Banjarmasin cenderung turun jumlah kg-nya. Akan tetapi nilainya makin meningkat. Ekspor karet sangat penting di daerah ini karena 90% diusahakan oleh rakyat dan selebihnya oleh perkebunan. Jenis yang kedua, ekspor yang melalui pelabuhan Banjarmasin adalah kayu yang terdiri kayu bulat, kayu gergajian dan plywood. Kayu bulat terdiri dari: meranti, kapur, keruing, ramin dan agathis; kayu gergajian terdiri dari: meranti, ramin, pulai group, dan plywood^{1 2}). Pada tahun 1979 jumlah ekspor kayu menurut volume (m³) nya sebesar 911.160,75 m³, dan menurut nilai devisa (US\$) 52.145.065.94. Jumlah ekspor ini pada tahun 1974 sebesar 2292.441.967 m³. Ini berarti ekspor kayu turun selama 3 tahun sebesar 2381.281.892 m³, dan menurut nilai Devisa (US\$) turun sebesar 19.961.156.98^{1 3}).

Semakin turun lagi ekspor kayu yang melalui pelabuhan Banjarmasin pada tahun 1979, atau selama 2 tahun menjadi 786.775.00 m³. Selisih antara tahun 1977 sampai 1979 sebesar 125.385.75 m³. Atau menurut nilai devisa (US \$) naik sebesar 43.657.983,68 dollar Amerika^{1 4}). Grafik itu menunjukkan volume (M³), tetapi menurut jumlah nilai devisa naik atau harga per m³ naik. Karena itu nilai devisa pun ikut naik.

Pada tahun 1974, ekspor komoditi lainnya mempunyai nilai devisa sebesar 10.156.023.75 dollar Amerika. Komoditi lainnya itu antara lain: rotan, lampit rotan, tikar rotan, jelutung, semambu, manau, damar, kulit gemor, tengkawang dan sarang burung. Kemudian pada tahun 1977 besarnya nilai devisa 2,226.247.21. Berarti angka itu menunjukkan penurunan sebesar 7.829.776.54 dollar Amerika. Akan tetapi ekspor komoditi lain-lain cenderung naik pada tahun 1979^{1 5}). Nilai devisa tahun 1979 sebesar 13.331.896.17 dollar Amerika. Berarti kenaikan ekspor komoditi menurut nilai devisa sebesar 11.105.548.96 dollar Amerika^{1 6}).

Jadi Kotamadya Banjarmasin merupakan penyalur barang-barang ke daerah yang umumnya melalui jalan darat dan sungai, dan juga sebagai tempat mengekspor barang-barang/hasil daerah, maupun mengimpor barang-barang yang dibutuhkan yang umumnya terjadi pada perdagangan antar pulau melalui lautan. Frekuensi perdagangan antar pulau setiap tahunnya semakin meningkat karena di samping barang-barang konsumsi yang didatangkan dari luar juga hasil-hasil produksi daerah terus meningkat volumenya dalam perdagangan antar pulau.

Meningkatnya perdagangan karena meningkatnya jumlah penduduk dan bertambahnya produksi serta konsumsi secara timbal balik.

**JUMLAH DAN NILAI EKSPOR KAYU SERTA HARGA RATA-RATA FOB
DIRINCI UNTUK SETIAP JENIS KAYU TAHUN 1977 MELALUI
PELABUHAN BANJARMASIN**

Jenis kayu	Ekspor kayu		Harga rata-rata FOB (US \$)
	Volume (m3)	Devisa (US\$)	
A. Kayu Bulat			
1. Meranti	736.420.74	41.795.996.98	56.76
2. Kapur	13.236.08	593.455.50	44.84
3. Keruing	10.781.86	502.184.20	46.58
4. Ramin	85.797.56	4.234.496.61	49.35
5. Agathis	38.877.23	2.934.012.50	75.47
B. Kayu Gergajian			
1. Meranti	9.581.38	698.782.92	72.93
2. Ramin	12.882.99	1.069.036.84	82.98
3. Pulai Group	1.946.39	55.097.97	28.31
C. Plywood	1.636.52	262.002.42	160.10
Jumlah	911.160.75	52.145.065.94	-

Sumber: Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Selatan

Perkembangan sektor perdagangan umumnya meliputi impor dan ekspor antar pulau serta kegiatan bongkar muat melalui pelabuhan Banjarmasin.

Adapun hasil daerah seperti karet, rotan, kayu, tikar purn, beras, ikan asin dan lain-lain merupakan komoditi yang lebih menonjol dalam perdagangan antar pulau yang ke luar daerah lewat Pelabuhan Banjarmasin, sedangkan datangnya barang-barang dari luar antara lain terigu, tekstil, sabun cuci, sabun mandi, dan sayur-sayuran seperti kol, wortel, kentang, bawang dan lain-lain, juga pada umumnya melalui Pelabuhan Banjarmasin, khususnya Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin yang merupakan pintu utama penyalur ke daerah dan juga datangnya barang-barang dari luar misalnya Jawa, Jakarta dan lain-lain melalui Pelabuhan Banjarmasin.

**REALISASI EKSPOR HASIL HUTAN IKUTAN DIRINCI SETIAP JENIS
MELALUI PELABUHAN BANJARMASIN TAHUN 1977**

Jenis hasil hutan ikutan	Bantuan standar	Realisasi Ekspor		Harga rata-rata FOB US\$
		Volume	Devisa (US\$)	
1. Rotan	Ton	2.913,5	295.633	101.47
2. Lampit rotan	m2	229.236.02	1.336.189.55	5.83
3. Tikar rotan	m2	37.089.83	263.572,72	7.11
4. Jelutung	ton	175	35.000	200
5. Semambu	btg.	750.050	147.749.75	0.19
6. Manau	btg.	34.600	22.484	0.65
7. Damar	ton	100	11.300	113
8. Kulit Gemor	ton	632	12.950,19	20.49
9. Tengkwang	ton	225	101.250	450
10. Sarang burung	kg	590	118	0.20
Jumlah Devisa US\$		x	2.226.247.21	x

Sumber: Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Selatan.

6.2 Pusat Kegiatan Ekonomi Kota

6.2.1 Pasar, Pusat-pusat Pertokoan dan Pusat Perbelanjaan

Pusat utama kota mulai dari Pasar Lama, memanjang Sungai Martapura, Kantor Gubernur (zaman Pemerintahan Belanda Kantor Gubernemen), Rumah Gubernur, Kantor DPRD Tingkat I, Kodam X Lambung Mangkurat, Balai Wartawan/Perpustakaan Kotamadya, jembatan, Masjid Raya Sabilal Muhtadin dahulunya asrama Tatas, dermaga arah ke hilir sungai Martapura pada bagian Jalan Lambung Mangkurat berdiri bangunan-bangunan PLN, UNLAM, Theater Kamajaya, Bank Dagang, Bank Eksim, Bank Indonesia, Bank Negara 1946, Bank Bumi Daya, Gereja Katholik, Kantor Kotamadya, Kantor Pos, Rumah Sakit Junjung Buih, dan Rumah Pangdam X Lambung Mangkurat. Jika menyusur jalan tepi sungai Martapura arah ke hilir, pada dermaga terdapat depannya Kantor RRI Nusantara III Banjarmasin, yang dahulunya adalah Sociteit de Kapel, terus menembus Bioskop Dewi merupakan perumahan rakyat. Jalan ini disebut Jalan Pos. Depan bioskop Dewi adalah jalan utama jembatan Coen, atau sekarang jembatan A. Yani. Memotong arah ke hilirnya lagi kiri kanan ditemukan toko-toko samping jembatan A. Yani, dahulu dibangun toko pada tepi sungai Martapura, sesudah kebakaran dibongkar. Kemudian menyusul Pasar Samudera yang lebih dikenal pasar Ujung Murung I dan Pasar Besar atau Pasar Ujung Murung II. Kedua pasar ini disebut pasar primer.

Makin ke hilir tepi Sungai Martapura ditemukan jembatan Antasari. Di sebelahnya terdapat Pos Polisi samping kaki jembatan juga tempat menjual alat-alat tulis, memanjang terus merupakan pasar utama yaitu pasar Lima malam dan pasar Lima Siang. Di Ujung jalan Lambung Mangkurat dibangun pusat perbelanjaan Arjuna Plaza dan Banjarmasin Theater. Terus lebih ke hilir dibangun pelabuhan ke daerah pedalaman Kalimantan Tengah dan ditemukan jembatan kecil. Sesudah jembatan,

terletak Kantor Pemda Tk. II Banjarmasin yang biasa disebut Kodamar, karena sebelumnya Markas Angkatan Laut. Kemudian ditemukan pelabuhan Lama. Tentu saja pelabuhan ini zaman Belanda merupakan pelabuhan baru. Pelabuhan ini tempat bertambatnya kapal-kapal besar ke luar negeri dan ke pulau Jawa atau antar pulau.

Kiri-kanan jalan Pasar Lama terdapat toko-toko pedagang kain, ragi, barang pecah belah, perangkat bangunan dan jual makanan dan minuman. Jalan pasar terus ke Belitung, terdapat simpang empat jalan D.I. Panjaitan. Di jalan ini dibangun beberapa kantor KPN, Markas Kepolisian Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kantor PU, Kodam X Lambung Mangkurat, Departemen Agama. Lazimnya jalan ini disebut Jalan Jawa. Sesudah persimpangan ini, pada jalan Perintis Kemerdekaan dijumpai pula Simpang Empat Belitung, yang memotong jalan S. Parman. Kiri kanan jalan S. Parman dibangun rumah orang-orang kaya dan pejabat, dan kantor-kantor, terutama Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, KPN lama, Daerah Kepolisian, Kantor Militer, dan Rumah Sakit Islam. Jalan S. Parman memanjang arah ke utara yang berhenti pada sebuah jembatan di Sungai Miai. Menyeberang jembatan ini telah memasuki jalan Kayu Tangi. Jalan Kayu Tangi merupakan jalan terbaru yang tembus ke Kabupaten Barito Kuala. Bangunan-bangunannya pun baru, terutama Perumnas, Kayu Tangi I dan II, Komplek UNLAM, SMPS, SPK, Rumah Sakit Jiwa, Kantor BKKBN Kotamadya Banjarmasin, dan Taman Budaya Propinsi Kalimantan Selatan.

Pada Jalan Lambung Mangkurat tepatnya di depan Kantor Kodim terdapat simpang tiga. Jalan ini disebut jalan Hasanuddin HM. Di pertengahan jalan Lambung Mangkurat terdapat simpang empat yang dikenal simpang empat Gereja, belok ke kiri jalan Bank Rakyat atau Jalan Pangeran Samudera, belok arah ke kanan jalan Belasung.

Pada jalan Hasanuddin, kiri kanannya terdapat toko-toko besar. Bertemu dengan pertigaan tepatnya di depan bioskop RIA, merupakan pusat-pusat pertokoan Kotamadya Banjarmasin, terus melingkar atau menyeberang bertemu dengan jembatan Antasari dan berputar bertemu dengan Pasar Baru. Pusat pertokoan ini dapat disebut pasar utama, terutama pasar Sudimampir I, II, III dan IV; Pasar Baru I dan II akan diuraikan di bawah ini.¹⁷⁾

Kapasitas penampung pelabuhan lama Banjarmasin sudah tidak memadai lagi untuk kehidupan modern. Karena itu dibangun pelabuhan baru Tri Sakti. Jika melalui sungai dari pelabuhan mudik ke hulu yang kita lihat adalah barisan lanting-lanting dan rumah-rumah sepanjang sungai. Sampai pada muara Kuin terdapat pasar terapung di atas air, dan pasar terapung di Muara Mantuil¹⁸⁾

Di seberang Kantor Gubernur terdapat kampung Cina atau Pacinan. Rumah kebanyakan Cina-Cina yang kaya berbentuk rumah besar yang khas bangunannya dengan bahan kayu ulin dan diplester dengan semen.

Kalau menyeberang jembatan Antasari tepat ujungnya bertemu pada sebelah kanan pasar Gelora pagi dan siang, di sebelah kiri bertemu pasar Antasari dan pasar Kasbah.

Pada saat ini jumlah pasar yang berada di wilayah Kotamadya Banjarmasin sebanyak 33 buah pasar, terdiri atas: pasar utama (8 buah), pasar primer atau pasar kebutuhan pokok (10 buah), dan pasar lingkungan (15 buah). Pasar utama terdiri atas: Pasar Sudimampir I, Pasar Sudimampir II, Pasar Sudimampir III, Pasar Sudimampir IV, Pasar Baru I, Pasar Baru II, Pasar Lima (siang), dan Pasar Lima (malam). Pasar Primer terdiri atas: Pasar Ramai (Lama), Pasar Lama (malam), Pasar Samudera (Ujung Murung), Pasar Besar (Ujung Murung), Pasar Belauran I, Pasar Belauran II, Pasar Gelora Pagi, Pasar Gelora Siang, Pasar Gelora Malam, dan Pasar Telawang. Pasar Lingkungan terdiri

atas: Pasar Kertak Baru, Pasar Teluk Tiram, Pasar Teluk Dalam Pagi (siang), Pasar Teluk Dalam (malam), Pasar Kuripan, Pasar A. Yani Km I, Pasar Kesatrian, Pasar Kampung Gedang, Pasar Veteran, Pasar Pandu, Pasar Pekaumna, Pasar Kelayan (siang), Pasar Kelayan (malam), Pasar Jati, dan Pasar Perairan¹⁹). Pusat perbelanjaan Pasar Baru sekitar tahun 1950 sudah ada. Di sini sudah banyak pedagang-pedagang yang menjual dagangannya.

Kebanyakan pedagang-pedagang di pusat perbelanjaan pasar Baru masih menjual barang-barang berupa bahan-bahan makanan seperti: Beras, ikan yang sudah dikeringkan, sayur-sayuran dan sebagainya dan masih jarang sekali pedagang yang menjual barang-barang berupa pakaian, kain-kain dan sebagainya²⁰).

Baru sekitar tahun 1960-an orang asing seperti Cina ingin berdagang di kota Banjarmasin. Hal ini menjadikan makin berkembangnya pusat-pusat perbelanjaan di sekitar Pasar Baru misalnya: di jalan simpang Sudimampir I dan II. Di sini banyak toko-toko yang menjual barang-barang seperti: kain, dan baju jadi baik untuk wanita, pria dan anak-anak yang beraneka ragam merek dan mode baik untuk anak-anak atau orang dewasa.

Selain itu di sepanjang jalan Hasanuddin terdapat pusat-pusat perbelanjaan yang tak kalah dengan Pasar Baru. Di sini banyak toko-toko atau toko serba ada dan pedagang-pedagang yang menjual dagangannya di sekitar jalan Hasanuddin atau di trotoir seperti pedagang-pedagang buku, majalah-majalah, surat kabar dan lain-lain, walaupun mengganggu orang-orang yang memakai jasa jalan tersebut. Selain Pasar Baru ada juga pusat perbelanjaan di pasar Sudimampir.

Pusat perbelanjaan di Pasar Sudimampir sekitar tahun 1950 sudah mulai berkembang, walaupun tidak terlalu pesat dibandingkan pusat perbelanjaan Pasar Baru. Di Pasar Sudimam-

pir pun banyak pedagang-pedagang yang menjual seperti kain, pakaian jadi dan sepatu. Sekitar tahun 1960-an Pasar Sudimampir makin berkembang pesat dengan banyaknya toko-toko yang dibangun secara berturut-turut di sekitarnya^{2 1}).

Pusat-pusat perbelanjaan di sekitar Pasar Sudimampir kurang lebih tahun 1970 sampai sekarang tidak banyak perkembangan kemajuannya. Hal ini disebabkan banyaknya pedagang-pedagang yang pindah ke sekitar pusat perbelanjaan Pasar Baru^{2 2}).

Orang-orang yang ingin atau berniat membangun toko-toko di sekitar Pasar Sudimampir banyak yang pindah ke tempat-tempat lain, seperti: ke Pasar Baru, sekitar Jalan Hasanuddin dan lain-lain.

Untuk saat sekarang pusat perbelanjaan Sudimampir banyak menjual barang-barang berupa bunga-bunga, daging ayam, buah-buahan dan sebagainya. Selain letaknya yang kurang strategis pusat perbelanjaan Sudimampir kelihatan sangat kotor dan banyak sampahnya. Hal ini mengurangi minat orang-orang yang akan belanja ke pusat perbelanjaan tersebut, sedang pedagang-pedagang yang tidak menyukai tempat ini.

Pusat perbelanjaan pasar Belauran sangatlah pesat. Sekitar tahun 1950-an pusat perbelanjaan ini masih dengan nama Pasar Kujajing. Lokasinya sekitar pusat perbelanjaan Pasar Baru yaitu Jalan Niaga dan sekitarnya (sekarang). Kebanyakan pedagang di pusat perbelanjaan ini orang-orang pribumi yaitu pedagang-pedagang yang bermodal kecil.

Pedagang-pedagang di sini masih menjual barang-barang yang bersifat cepat laku dan murah harganya.

Baru sekitar tahun 1960 perkembangan pusat perdagangan ini semakin meningkat dengan banyaknya pedagang-pedagang pendatang dari luar kota Banjarmasin seperti Barabai, Kandangan, Amuntai dan lain-lain, bahkan dari luar Kalimantan seperti Jawa, Sumatera, Maluku dan sebagainya. Juga masih

orang Indonesia asli dan jarang-jarang pedagang keturunan bangsa asing yang berdagang di sini^{2 3}). Pusat perdagangan ini dari tahun ke tahun makin meningkat dan berkembang. Pedagang-pedagang di sini kebanyakan menjual dagangannya berupa kain-kain, pakaian jadi untuk pria, wanita dan anak-anak. Modenyapun beraneka ragam. Pusat perbelanjaan ini paling ramai atau banyak pengunjungnya pada sekitar pukul 19.00 sampai dengan pukul 20.00 WITA. Jadi pusat perbelanjaan ini beroperasi pada malam hari atau disebut pasar malam. Perkembangan pusat perbelanjaan Antasari sekitar 1950 sudah mulai nampak. Letaknya di jalan Antasari dan strategis sekali, karena pada waktu itu perdagangan masih melalui sungai, sedangkan pasar Antasari terletak di pinggir sungai^{2 4}). Barang-barang yang dijual kebanyakan berupa buah-buahan, sayur-sayuran, ikan-ikan sungai dan sebagainya. Baru sekitar tahun 1960 sampai sekarang ini perdagangan di Pasar Antasari berkembang sangat pesat, tetapi barang-barang dagangannya masih seperti dulu yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan.

Kebijaksanaan Pemerintah dalam bentuk Inpres Pasar dan Inpres Pertokoan yang pada pokoknya membantu pemerintah daerah untuk membangun/memugar pasar-pasar, pusat pertokoan/perbelanjaan/perdagangan agar kebutuhan-kebutuhan tempat berusaha/berjualan bagi para pengusaha dapat diwujudkan dengan harga yang semurah mungkin, selanjutnya dapat menguasai daerah pasar yang strategis untuk dapat berperan aktif dalam mengembangkan usahanya.

Keadaan pasar-pasar di daerah Kalimantan Selatan sebelum adanya program bantuan kredit, kelihatannya belum begitu berkembang, terutama untuk penyediaan fasilitas pasar, yaitu berupa bangunan los-los dan kios-kios yang ada pada pasar-pasar tingkat kotamadya, kabupaten maupun tingkat kecamatan. Hal ini disebabkan karena kekurangmampuan pihak PEMDA Tingkat II dalam penyediaan dana yang cukup besar untuk pembangunan pasar-pasar baru maupun untuk pemba-

ngunan kembali/rehabilitas terhadap pasar yang terkena musibah kebakaran dan pasar-pasar yang cukup tua.

Sebagaimana dimaklumi di lingkungan daerah tingkat II Kalimantan Selatan telah dilaksanakan pembangunan pasar-pasar, dengan memanfaatkan dana Inpres Pasar sehingga dapat menampung sebagian pedagang kecil/golongan ekonomi lemah, seperti dapat dilihat dari perkembangan penyediaan los dan kios dan jumlah pedagang yang tertampung atas pembangunan pasar-pasar Inpres.

Nampak adanya kemajuan dalam kebutuhan sarana perpasaran di wilayah ini yaitu sebagian besar para pedagang yang ditampung adalah pedagang kecil/golongan ekonomi lemah dengan membebaskan tarif sewa untuk masing-masing jenis ruangan ditetapkan semurah mungkin^{2 5}).

PEMBANGUNAN ATAU PEMUGARAN PASAR DI LINGKUNGAN KODYA BANJARMASIN

No.	Nama Pasar	Alamat
1.	Pusat Perbelanjaan Pangeran Antasari	Jl. Pangeran Antasari Banjarmasin
2.	Pertokoan PPKE	Jalan Pangeran Samudera Banjarmasin
3.	Kios dan Dermaga Blok ODI	Jalan Pasar Baru/Tepi Sungai Martapura Banjarmasin.

Pedagang/calon pedagang yang akan ditampung tersebut diprioritaskan kepada pedagang-pedagang lama/pindahan, yaitu pedagang-pedagang yang tadinya tersebar di berbagai pasar di lingkungan Kotamadya Banjarmasin karena fasilitas jenis-jenis ruangan pasar di tempat lama tidak memungkinkan lagi^{2 6}).

Pedagang-pedagang pindahan tersebut adalah: Pasar Harum Manis, Pasar Sudimampir, Pasar Gelora, Pasar Kelayan, Pasar Teluk Tiram, Pasar Sugiono, Pasar Kertak Baru, dan Pasar Kuripan.

Hambatan dalam pembangunan pasar-pasar di wilayah ini adalah sebagai berikut:

- 1) Peranan investor swasta, yang sudah sejak dulu menginvestasikan modal di bidang penyediaan sarana-sarana perpasaran terutama dalam bentuk pusat pertokoan/perbelanjaan/perdagangan.
- 2) Sukar mencari tanah pada lokasi yang strategis, atau kadang-kadang terbentur pada masalah Hak Penguasaan Tanah yang masih belum jelas statusnya.
- 3) Realisasi fisik atas pembangunan/pemugaran pasar-pasar agak terlambat, di mana penunjukan kontraktor/pemborong masih kurang selektif seperti adanya penunjukan kontraktor/pemborong yang kurang bonafide.
- 4) Penempatan/pengisian para pedagang pada masing-masing jenis ruangan kurang teratur atau kurang menurut barang-barang yang diperdagangkan sehingga sifat/pelayanan pasar tersebut tidak sesuai dengan kegiatan perdagangan yang tertampung.

Usaha-usaha selama Repelita II mulai tahun 1974–1979 di Kotamadya Banjarmasin telah dilaksanakan dari tahun 1974–1975 adalah sebagai berikut:

- 1) Pemeliharaan bangunan-bangunan pasar
- 2) Penyelesaian proyek-proyek: Pasar Lima, Pasar Rambai, dan Pasar Permata.

Tahun 1975–1976 adalah sebagai berikut:

- 1) Perbaikan dan pemeliharaan bangunan-bangunan pasar
- 2) Penyelesaian proyek-proyek: Pasar Lima, Pasar Rambai, dan Pasar Permata.

Tahun 1976–1977 adalah sebagai berikut:

- 1) Perbaikan dan pemeliharaan bangunan-bangunan pasar
- 2) Penyelesaian proyek-proyek: Pasar Lima, Pasar Rambai, dan Pasar Permata.

Tahun 1977–1978 adalah sebagai berikut:

- 1) Perbaikan dan pemeliharaan bangunan-bangunan pasar
- 2) Penyelesaian proyek-proyek: Pasar Lima, Pasar Rambai, dan Pasar Permata.
- 3) Pendirian: Pasar Burung dan Pasar Ikan Hias dan Taman Hias.
- 4) Peremajaan Pasar Gelora, Pasar Blok Seng dan Pasar Kelenteng.

Tahun 1978–1979 adalah sebagai berikut:

- 1) Perbaikan dan pemeliharaan bangunan-bangunan pasar
- 2) Peremajaan Pasar Gelora, Pasar Blok Seng dan Pasar Kelenteng
- 3) Pendirian Pasar Induk
- 4) Pembuatan Pasar Terapung Muara Kuin
- 5) Peremajaan pasar-pasar lingkungan.

6.2.2 *Pemukiman Penduduk di Pertokoan dan Kedai-kedai*

Kebanyakan bagi mereka yang berada di pusat kota khususnya para pedagang, mereka menempati toko kios atau warung-warung yang mereka dapati. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya masalah baru, yakni kehidupan sosial mereka, lingkungan yang bersih, keamanan yang terjamin dan lain-lain²⁷).

Dalam masalah ini mereka perlu juga adanya suatu lingkungan masyarakat yang terpadu antara satu sama lain. Hal ini disebabkan oleh karena mereka pada umumnya lain-lain suku bangsa atau keturunan. Umpamanya mereka berasal dari Banjar Kuala dan Banjar Hulu Sungai, orang Jawa serta orang Cina, dari sinilah kehidupan mereka berubah.

Akan tetapi bagi mereka yang berasal dari orang Cina pada umumnya bertempat tinggal pada pusat perbelanjaan, hal ini disebabkan oleh karena modal dalam perdagangan sangat besar dan pelanggan administrasi yang lancar. Misalnya asumsi masyarakat, jika orang Cina meminjam uang di Bank lebih lancar.

Pasar dan pusat pertokoan mempunyai perbedaan yang sangat menyolok antara pemukiman Cina di daerah pertokoan dengan pasar yang dikelilingi oleh kedai yang diselingi oleh rumah tinggal. Keduanya adalah juga pusat kegiatan ekonomi bagi warga kota. Perbedaan ini sebagai proses pengelompokan, di mana kelompok Cina terikat karena mempunyai karakteristik dan kegiatan-kegiatan yang sama, terutama dalam penguasaan perdagangan yang bermukim di pertokoan besar dan jalan-jalan utama di jantung kota. Dalam wilayah-wilayah ini, mereka tetap berkumpul, agar lebih mudah berkomunikasi dan dapat mempertahankan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku, serta juga kepercayaan dan agama yang dianutnya^{2 8}).

Orang-orang Cina di pertokoan dan di perkampungan nampak kesadaran kelompoknya sangat tinggi. Orientasi budaya mereka masih mengarah ke tanah leluhurnya di daratan Tiongkok, meskipun mereka keturunan ketiga atau keempat yang dilahirkan di sini. Mereka tidak bermaksud lagi pulang ke kampung mereka^{2 9}). Tetapi nama-nama Cina tetap dipergunakan. Usaha mereka di bidang perdagangan sangat unggul dibanding dengan masyarakat Banjar. Mereka merasa lebih unggul dari penduduk asli dalam ekonomi^{3 0}). Kesejahteraan mereka yang sangat menyolok dan kebudayaan serta kaidah-kaidah moral yang berlawanan dengan orang Banjar menimbulkan suatu sikap antipati di pihak masyarakat Banjar. Hal ini sering berakibat fatal bagi golongan Cina itu sendiri bila terjadi proses sosial politik.

Hampir 90% kompleks pertokoan yang termasuk kategori besar di Kotamadya Banjarmasin dimiliki dan dihuni oleh orang

Cina. Mereka mempunyai persatuan yang kuat, karena itu perdagangan lebih maju dan menguasai perekonomian Kotamadya Banjarmasin^{3 1}).

Pasar yang dikelilingi kedai-kedai tempat pemukiman pedagang Banjar, jauh berbeda. Di samping kotor dan tidak teratur, lagi pula dalam hal kerja sama kurang diperhatikan di samping modal mereka sangat lemah. Karena itu mereka lambat mencapai kemajuan. Tempat tinggal ini pada emper-emper pasar, semacam gubuk-gubuk dan toko-toko kecil yang tak teratur. Kehidupan mereka dicari sehari habis sehari. Tempat-tempat ini bukan pada pusat utama kota, tetapi pada pasar primer dan pasar lingkungan yang hanya menyediakan kebutuhan sehari-hari. Sesudah ada kredit bagi yang bermodal lemah mereka tampak lebih maju, dan sebagian dapat ikut berjualan di pasar-pasar utama terutama Pasar Lima dan Sudimampir serta Pasar Baru^{3 2}).

Tetapi terbatas pada toko-toko kecil. Tidak seperti warga Cina. Satu-satunya pedagang yang dapat menyaingi pedagang Cina adalah pedang kain, yang rata-rata berasal dari Alabio. Persatuan mereka kuat, tetapi hanya satu jenis kain saja. Mereka mempunyai rumah pada pemukiman yang kaya. Mereka pagi-pagi membuka toko, sore pulang ke rumah.

6.3 *Pedagang Kaki Lima*

Salah satu asal usul atau latar belakang para pedagang kaki lima yang berada di Kotamadya Banjarmasin adalah urbanisasi. Urbanisasi adalah salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pedagang kaki lima. Mereka beranggapan bahwa di kota segalanya akan mudah diperoleh.

Urbanisasi sebagai cara hidup di mana pemusatan penduduk di dalam kota, dianggap sebagai yang menentukan kemungkinan-kemungkinan hidup individu, dan interaksi antar individu. Maka demikian sektor informallah yang paling mudah dimasuki

oleh para pencari kerja tanpa membutuhkan pendidikan/keahlian/ketrampilan tertentu. Asal ada kemauan dan sedikit modal maka jadilah pedagang kaki lima^{3 3}).

Para pedagang kaki lima itu sebelum menjadi pedagang juga para pencari kerja yang datang dari daerah-daerah kabupaten. Namun karena tidak cukup kesempatan dan lapangan kerja seperti yang mereka dambakan semula, di lain pihak keahlian dan keterampilan yang mereka miliki juga minim, maka untuk menambatkan hidup sehari-hari jadilah pedagang kaki lima, yang cukup dengan modal yang kecil saja. Mereka tidak peduli/memperhatikan lingkungan di mana mereka berjualan, asalkan bisa memperoleh keuntungan yang dapat menghidupi diri sendiri maupun keluarga mereka. Bila kita pandang dari sudut ekonomi sebenarnya pedagang kaki lima membantu sektor formal. Seperti kebutuhan primer dapat mudah ditemukan pada pedagang kaki lima. Dapat dikatakan pedagang kaki lima merupakan ujung tombak dalam mata rantai pemasaran barang yang diproduksi oleh sektor formal^{3 4}).

Biasanya mereka ini menjual berbagai makanan kecil serta menjual rokok, yang dapat mudah diperoleh dalam waktu yang singkat. Pedagang kaki lima juga timbul di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh banyak orang yang secara rutin pada setiap harinya, misalnya di muka toko-toko di wilayah Kotamadya Banjarmasin ini. Biasanya mereka menjual barang-barang yang di dalam toko tidak disediakan, dan walaupun disediakan, mereka menjual lebih murah dari harga toko.

Keadaan pedagang kaki lima di sepanjang jalan Antasari sebelum tahun 1979 tentu berbeda dengan sekarang. Mulai dari simpang empat jalan Kolonel Sugiono sampai jembatan Antasari, dahulu belum berpagar. Belum ada jembatan penyeberangan yang terlihat seperti sekarang ini.

Di sekitar kiri kanan jalan ini timbullah pedagang-pedagang kaki lima. Mereka sangat bebas menggunakan tempat ini untuk menjual barang dagangannya. Begitu pula para pembelinya, sangat bebas lalu lalang di jalan ini dengan perasaan seakan-akan tidak ada kendaraan yang lewat di dekat mereka.

Di waktu pagi dan petang hari para pedagang ini hampir menyita separuh jalanan, karena penuh dengan barang-barang dagangan mereka. Seakan-akan mereka ini mengejar para pembeli supaya dagangan mereka lekas habis diborong oleh pembeli. Barang mereka berupa sayur mayur, sedang bila musim buah-buahan tiba, buah-buahan lah yang menghiasi sepanjang jalanan ini^{3 5}). Ada rambutan, durian, limau, langsung dan sebagainya, yang lazim ada di daerah Kalimantan Selatan ini.

Di Blauran yang masih berjalan sampai sekarang ini penulis tidak ingat lagi kapan tempat ini mulai dipakai orang untuk berjualan di waktu malam^{3 6}). Tempat ini sangat ramai dikunjungi orang. Baik orang-orang dari lapisan atas, lapisan tengah maupun orang-orang dari lapisan bawah. Mereka menggunakan tempat ini diwaktu sore hingga malam hari. Barang dagangan mereka sebagian besar berupa pakaian jadi, dari pakaian anak-anak hingga pakaian orang dewasa. Di samping itu ada pula pedagang-pedagang obat, bahkan obat-obatan yang modern pun ada dijual orang di Blauran ini.

Selain apa yang telah disebutkan di atas, dijual orang pula berbagai macam makanan dan minuman yang menambah semaraknya Blauran diwaktu sore atau malam hari. Mereka menjual dagangannya di rombongan-rombong mereka masing-masing^{3 7}). Mungkin tempat ini dapat dilestarikan sebagai tempat berhimpunnya pedagang kaki lima sepanjang mereka mau berjualan dan sepanjang tidak mengganggu ketertiban dan keamanan lingkungan.

Pedagang kaki lima di Pasar Kasbah. Pedagang kaki lima terdapat pula di muka Pegadaian Antasari. Yang dapat anggap

unik di sini adalah barang dagangan mereka yang berupa barang-barang bekas. Dulu di tempat ini masih belum disediakan barak-barak tempat berjualan. Mereka masih menggunakan tenda-tenda sederhana, bahkan banyak yang berjualan tanpa tenda sama sekali. Dagangan mereka barang-barang bekas, mulai pakaian, alat-alat rumah tangga hingga barang-barang elektronik dijual orang di sini. Tempat ini ramai dikunjungi orang karena barang-barang di sini murah.

Pedagang kaki lima di jalan Jenderal Ahmad Yani. Di dalam lingkungan jalan Jenderal Ahmad Yani, sebelum tahun 1979 merupakan lingkungan yang ramai. Di jalan ini, dahulu di kilometer satu, menjadi tempat terminal bus jurusan luar kota. Dengan sendirinya tempat ini menjadi ramai dengan pedagang-pedagang kecil yang memenuhi kebutuhan para penumpang^{3 8}). Yang sering terlihat dijual di sini adalah barang makanan dan minuman ringan, buah-buahan dan sebagainya. Bila musim buah-buahan tiba, maka tempat ini menjadi ramai sebagai pasar buah-buahan.

Bukan hanya buah-buahan yang berasal dari daerah Kalimantan Selatan saja, tetapi juga buah-buahan yang berasal dari daerah luar Kalimantan Selatan. Seperti buah mangga misalnya yang datang dari daerah Jawa dan Madura, juga ikut menghiasi suasana pedagang kaki lima di kota Banjarmasin.

Pedagang kaki lima di Pasar Lima. Membicarakan keadaan Pasar Lima dan pedagang kaki lima yang berada di tepi jalan lingkungan Pasar Lima maka pertama-tama kita membayangkan suatu lokasi bangunan yang besar yakni terdiri dari lima bangunan yang sambung-menyambung, dengan konstruksi bangunan sebagian terdiri dari bangunan beton, pilar-pilar bangunan yang besar yakni mempunyai langit-langit ruangan yang cukup tinggi.

Lokasi dari Pasar Lima terletak di tepi sungai Martapura, yang dengan demikian sekaligus merupakan lalu lintas sungai

dan berfungsi sebagai sarana perdagangan. Hal tersebut ditambah lagi dengan keistimewaannya yakni letak Pasar Lima yang berada di pusat kota Banjarmasin. Pasar Lima dibangun sejak zaman Belanda, dengan disetujui oleh Menteri Dalam Negeri dengan keputusannya No. 48 tahun 1977³⁹).

Pasar Lima dipugar pada tanggal 3 Mei 1977 dan pada tahun 1979 tanggal 3 Mei Pasar Lima selesai di pugar dan dapat menampung pedagang 728 orang, Tapi masalah pedagang kaki lima tidak juga dapat diatasi sepenuhnya karena sebagian saja yang dapat ditampung di toko/kios Pasar Lima. Oleh sebab itu masih ada pedagang kaki lima yang berada di muka-muka toko/kios, di tepi jalan (trottoir) di areal Pasar Lima dan sekitarnya. Ada sekitar 125 orang sekarang ini pedagang kaki lima di areal tersebut. Pedagang kaki lima ini semuanya termasuk pedagang yang tidak memiliki izin usaha. Khusus para pedagang ini diibaratkan seperti jamur di musim hujan. Jumlah mereka beroperasi untuk berjualan tidak menentu, karena tergantung pada musim-musim tertentu. Mereka terutama berjualan menjelang hari Raya Islam, maka mengenai pedagang kaki lima memang sulit diatasi karena selain pedagang mempunyai ekonomi yang lemah juga tempat tertentu atau areal yang dapat mengundang calon konsumen (pembeli) tidak ada⁴⁰).

Tetapi kalau pemerintah dapat menyediakan modal kecil-kecilan (kredit candak kulak), memberikan bimbingan agar dapat meningkatkan kemampuannya yang penuh kreatif, dan dinamis dalam mengelola dagang mereka, dan juga dapat menyediakan areal tertentu yang dapat mengundang para pembeli, kemungkinan besar masalah kaki lima dapat diatasi.



CATATAN

- 1) Team Penyusun Pemda, *Kalimantan Selatan 1963-1968*, Pemda Propinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin, 1968, hal. 1
- 2) *ibid*, hal 2-3
- 3) *ibid*, hal. 5-6
- 4) M. Idwar Saleh (Tim), *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan*, Depdikbud, Jakarta, 1977/1978, hal. 130
- 5) *ibid*, hal. 131
- 6) *ibid*, hal. 133
- 7) Team Penyusun Pemda Kalimantan Selatan, *Op-Cit*, hal. 2
- 8) *ibid*, hal. 3
- 9) *ibid*, hal. 8
- 10) Sensus dan Statistik, *Kalimantan Selatan Dalam Angka*, Kantor Sensus dan Statistik, Banjarmasin, 1974, hal. 140
- 11) *ibid*, hal. 185.
- 12) Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru tahun 1977
- 13) Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru tahun 1974
- 14) Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru tahun 1979

- 15) Kalimantan Selatan Dalam Angka tahun 1980
- 16) *ibid*, hal. 244
- 17) EDI S, *Pembangunan Pasar di Kotamadya Banjarmasin*, (Skripsi) Fakultas Ekonomi Unlam, Banjarmasin, 1981
- 18) Wawancara dengan Bapak Roeslan, pada tanggal 18 Agustus 1985
- 19) EDI S, *Op. Cit*, hal. 20
- 20) Wawancara dengan Bapak Tuhalus pedagang pancarakinan, pada tanggal 25 Oktober 1985
- 21) Pemda Banjarmasin, *Retrebusi Pasar di Kotamadya Banjarmasin*, Pemda Tingkat II Banjarmasin, 1982, hal. 21
- 22) *ibid*, hal. 30
- 23) Laporan Tahunan, *Kanwil Perdagangan Propinsi Kalsel*, Depperdag Banjarmasin, 1977, hal. 38
- 24) Repelita II, *Repelita II Kodya Banjarmasin Tahun 1974–1979*, Pemda Kodya Banjarmasin, 1979, hal. 3
- 25) *ibid*, hal. 50
- 26) *ibid*, hal. 39
- 27) *Monografi Kalimantan Selatan*, Depdikbud, Jakarta, 1977, hal. 58
- 28) Soerjono Soekanto, *Struktur Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta, 1983, hal. 91–92
- 29) H. Ramli Nawawi dan Tamny Roeslan (Tim) *Sejarah Sosial Daerah Kalimantan Selatan*, Depdikbud, Jakarta, 1984, hal. 74
- 30) *Ibid*, hal. 75
- 31) Monografi Kalimantan Selatan, *Op Cit*, hal. 60
- 32) Wawancara dengan Bapak H. Utuh, pedagang kain, pada tanggal 21 November 1985
- 33) Wawancara dengan Bapak Mujali, pedagang eceran kaki lima, pada tanggal 30 Oktober 1985
- 34) *ibid*
- 35) Wawancara dengan Ibu Hadijah, pedagang sayur dan buah-buahan, pada tanggal 10 Desember 1985

- 36) Wawancara dengan Ibu Haji Ramnah, pedagang kain pasar Blauran, pada tanggal 15 November 1985.
- 37) *ibid*
- 38) Wawancara dengan Bapak Mujali, pedagang eceran, pada tanggal 30 Oktober 1985
- 39) Surat Keputusan Mendagri No. 48 Tahun 1977
- 40) Wawancara dengan Bapak Parhani, pedagang Pasar Lima, pada tanggal 29 November 1985.

BAB VII PERHUBUNGAN

7.1 *Jalan Raya di Kotamadya Banjarmasin*

Sebelum tahun 1970 tidak diadministrasikan. Lain halnya setelah tahun 1970, yakni setiap saat selalu dibukukan, sehingga betul-betul terprogram dan terlaksana serta ada pendaatangnya terus-menerus¹).

Perkembangan jalan/pelebaran jalan dan pembuatan jalan baru \pm 4 meter, antara lain ialah:

- 1) Jalan Teluk Tiram Darat
- 2) Jalan Pahlawan
- 3) Jalan Pasar Lama sesudah jembatan arah ke timur antara tahun 1950 – tahun 1970.
- 4) Jalan Simpang Ulin/dekat rumah sakit
- 5) Jalan Saka Permai (tembusan dari Kini Balu ke Belitung dibiayai Kotamadya
- 6) Jalan Pangeran Antasari, tahun 1957 ke atas
- 7) Jalan Komplek Mawar sebelum tahun 1960, sekitar tahun 1955 – 1957
- 8) Jalan Arjuna/Kebun Bunga tahun 1955 sampai tahun 1957
- 9) Jalan Simpang Kuin Selatan

Khusus Pelebaran Jalan, Jalan Pangeran Samudera \pm 6 m menjadi 12 m, namun penambahannya bertahap, yaitu:

- 1) Jalan R. Suprpto
- 2) Jalan S. Parman
- 3) Jalan Perintis Kemerdekaan/Pasar Lama
- 4) Jalan D.I. Panjaitan
- 5) Jalan Jenderal Sudirman

Sebelum tahun 1960 secara bersamaan, sesudah tahun 1960 tidak ada pembuatan, perbaikan dan pelebaran jalan sesuai dengan keadaan pemerintahan pada saat itu²).

Sebelum tahun 1960, secara bersamaan dibangun jalan-jalan sebagai berikut:

- 1) Jalan Mayjen Sutoyo S
- 2) Jalan Kamboja
- 3) Jalan Nagasari
- 4) Jalan Belitung
- 5) Jalan Kolonel Sugiyono
- 6) Jalan K.S. Tubun
- 7) Jalan Jenderal Akhmad Yani
- 8) Jalan R.E. Martadinata
- 9) Jalan Pelabuhan Timur
- 10) Jalan Pasar Baru
- 11) Jalan Sudimampir
- 12) Jalan Antasan Kecil Barat
- 13) Jalan Gerilya sebelum tahun 1960
- 14) Jalan Rantauan Barat tahun 1950–1960

Sebelum tahun 1975 sesuai dengan data yang ada, adalah sebagai berikut:

- 1) Jalan beraspal baik jalan utama (U)
- 2) Jalan Penghubung (P), jalan lingkungan (L), panjangnya adalah sepanjang 38.706 meter

- 3) Jalan pengerasan/pengerasan jalan; tembokan krikil/pasir baik jalan utama (U), jalan penghubung (P), jalan lingkungan (L), dan jalan antar lingkungan (AL) adalah sepanjang 51.902 meter
- 4) Jalan tembokan tanah baik jalan utama (U), jalan penghubung (P), jalan lingkungan (L), dan jalan antar lingkungan (AL) adalah sepanjang 18.275 meter.

Jika diprosentasikan dari tiga tingkatan penggolongan, maka akan nampak gambaran yang cukup jelas sebagai berikut:

Jumlah seluruh panjang jalan baik yang beraspal maupun yang tembokan kerikil/pasir (jalan pengerasan) dan jalan tembokan tanah adalah 38.706 meter + 51.902 meter + 18.275 meter = 108.883 meter.

Data yang tertulis berdasarkan perhitungan angka prosentasi adalah bahwa: jalan (I) pengerasan adalah yang terpanjang yaitu lebih kurang 48%, kemudian jalan beraspal yang ke dua (II) lebih kurang 36% dan jalan tembokan adalah menempati urutan ke tiga (III) yaitu kurang lebih 17%. (lihat lampiran).

Sejalan dengan roda pembangunan, ketika pembangunan perkotaan berjalan dengan benar dan serasi, untuk mewujudkan kota yang nyaman, demi tercapainya masyarakat yang adil dan makmur, untuk itu dibangunlah berbagai macam sarana dan prasarana, salah satu di antaranya adalah pembangunan jalan, dan jalan memegang peranan dalam rangka tercapainya hubungan yang baik dan harmonis antara sesama anggota masyarakat. Tanpa jalan yang baik maka otomatis hubungan tidak akan berjalan dengan baik³). Karena itu kemudian pemerintah Kotamadya Banjarmasin dalam hal ini Departemen Pekerjaan Umum Cq. Bagian Pembangunan jalan raya selalu berusaha dalam membina demi terciptanya suatu jalan raya yang baik, yang memberikan kenyamanan bagi pemakainya itu sendiri.

Dalam pembangunan jalan raya, yang sedikit demi sedikit diselesaikan dan dalam Pelita ke-2 sudah tercapai 40% selesai,

dan memang diakui juga banyak hal yang belum terselesaikan untuk menciptakan jalan raya yang baik dan teratur seperti masalah rambu-rambu lalu lintas yang belum terpasang dengan baik, sarana parkir yang belum memenuhi persyaratan, dan terminal yang masih semraut, yang masih dipikirkan penyelesaiannya. Dalam awal Pelita III akan diresmikan dan difungsikan penggunaan jembatan Dewi yang membentang di sungai Martapura, yang diharapkan dapat memperlancar arus lalu lintas⁴).

Awal tahun 60-an terminal yang dipakai adalah di daerah jalan Antasari, dan ini cukup mengganggu ketertiban lalu lintas, karena daerah jalan Pangeran Antasari ini cukup padat ditambah lagi di daerah ini tidak ada pagar dan tembok yang membagi arus lalu lintas, serta jembatan penyebarangan. Di samping terminal yang digunakan di jalan Pangeran Antasari juga di terminal di kilometer 1 masih dipakai, yang juga mengganggu arus lalu lintas.

Masalah lain adalah sempitnya jalan-jalan raya, serta daerah-daerah yang padat seperti jalan Hasanuddin HM masih menggunakan dwifungsi jalan, artinya satu jalan dengan dua arah. Hal semacam ini mengakibatkan jalan itu cepat rusak. Dalam usaha mengatasinya direncanakan pengaturan jalan yang baik dan benar, dan setelah jembatan Dewi beroperasi maka pengaturan jalan yang baik segera terealisasi. Inipun belum berjalan dengan baik.

Di samping mengatur ketertiban berlalu lintas juga dilakukan perbaikan jalan-jalan yang dianggap penting dan strategis seperti jalan Mayjen Sutoyo S. yang menuju ke pelabuhan Tri Sakti, dan tempat pelelangan Ikan, Jalan Kinibalu dan Mularman yang merupakan kompleks sekolah/pendidikan, jalan Jenderal Sudirman, dan jalan Pasar Lama Laut yang menuju ke arah Kantor Gubernur dan kompleks perbelanjaan, dan jalan-jalan yang lainnya yang dianggap penting. Hal ini me-

nunjukkan bahwa pemerintah Kotamadya Banjarmasin sudah berusaha untuk membangun sarana komunikasi yang baik⁵).

Di antara prioritas pemerintah Kotamadya Banjarmasin dalam pembangunan dan menertibkan jalan raya adalah sebagai berikut:

- 1) Perbaikan dan rehabilitasi jalan-jalan raya
- 2) Pemasangan rambu-rambu lalu lintas
- 3) Pemasangan dan pemungisian lampu-lampu lalu lintas di persimpangan jalan.
- 4) Pengadaan terminal yang baik dan strategi.
- 5) Pembangunan jalan-jalan yang dianggap penting
- 6) Pembangunan trotoar untuk pejalan kaki⁶).

Program yang sudah digariskan pemerintah itu sebagian sudah terialisasi dengan baik, dan sekarang kita merasakan akan manfaat dari pembangunan jalan yang baik sekarang tinggal bagi kita pemakai jalan.

7.2 *Jembatan*

Sungai Barito dan Sungai Martapura juga merupakan pemandangan pesisir kota Banjarmasin terutama bagi orang yang melewati jalan sungai. Tahun lima puluhan sesudah kita merdeka jalan sungai merupakan jalur perdagangan bagi masyarakat Banjar. Di ujung Murung, Pasar Sudimampir, dan Pasar Lima terdapat taksi kapal untuk pergi ke Anjir, Kapuas, Marabahan, Tamban, bahkan ke Hulu Sungai untuk membawa barang dagangan karena sedikitnya jalan lintas melalui darat.

Waktu dulu orang menyeberang saja naik perahu, oleh karena itu pemerintah berusaha membangun jembatan, untuk mempermudah hubungan antara masyarakat yang satu dengan yang lain dan dilintasi oleh kendaraan baik roda dua mapun kendaraan roda empat serta orang yang berjalan kaki.

Mulai Pelita I sampai sekarang Pemerintah Daerah Kotamadya Banjarmasin berusaha terus untuk membangun dan me-

DAFTAR: NAMA-NAMA JALAN DI ALAM KOTAMADYA BANJARMASIN

Nama Jalan	Beraspal		Pengerasan		Tembokan krikil/pasir		Tembokan tanah		Panjang seluruhnya	Jenis jalan menurut	Kapasi-tas/kelas jalan fungsi	Ket.	
	Pnj.	Lb.	Pnj.	Lb.	Pnj.	Lb.	Pnj.	Lb.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ang grek								230	4	230	AL	V	
Alalak Utara						2.000	4	3.500	4	2.500	L	IV	
Alalak Selatan						2.000	4			2.000	L	IV	sekarang sudah di-
A w a n g													
Antasan Raden							4	1.000	3	1.000	AL	V	
Andalas		450	9					700	4	500	L	V	sudah diaspal
Antasan Kecil Barat						600	5			450	P	III	ada kakilima
Antasan Kecil Timur						700	3			500	L	IV	skg. sudah diaspal
Anambas						100	4			700	L	V	skg. sudah diaspal
Am bon										100	AL	IV	
A.E.S. Nasution		700	6					110	3	110	AL	V	
Arjuna						250	5			700	P	III	
Ant. Lingk. Bagian I						576	4			250	AL	III A	skg. sudah diaspal
Ant. Lingk. Bagian II						672	4			576	AL	IV	
Ant. Lingk. Bagian III						462	4			672	AL	IV	
Ant. Lingk. Bagian IV						375	4			462	AL	IV	
Ant. Lingk. Bagian V						356	4			375	AL	IV	
Ant. Lingk. Bagian VI						335	5			356	AL	IV	
Belitung		2500	8							335	AL	IV	
Bartio		900	6							2.500	U	III	
Bawean		113	8							900	U	III A	
Bank Rakyat		120	6							113	P	III	
Batu Benawa						220	8			340	P	III A	ada kakilima
Batu Tiban						500	4			500	L	IV	skg. sudah diaspal
Batu Pirin						120	4			320	L	IV	skg. sudah diaspal
Bukit Raya						500	4			500	L	IV	skg. sudah diaspal
Bonus Anyar								120	3	120	AL	V	
Jalan Bali						1.000	4	1.000	4	2.000	L	IV	
						220	5			520	P	IV	skg. sudah diaspal

Kacapiring IV					190	5				190	AL	IV	
Kacapiring V					210	3				210	AL	IV	
Kacapiring VI					100	3				100	AL	IV	
Kacapiring VII					100	3				100	AL	IV	
Kelayan A					114	5				614	L	IIIA	skg. sudah diaspal
Kelayan B	740	5			1.151	6,5				991	L	IIIA	
Kol. Sugiono	750	8								50	P	III	
Karimata					10	5				00	AL	V	
Kerama					1.000	6				1.000	L	IV	skg. sdh. diaspal
Keramaian	100	5								00	P	IIIA	
Kebun Bunga					0	4				00	AL	IV	
Kenanga					0	3				300	AL	IV	
Lamb. Mangkurat	770	17								70	U	III	ada kakilima
Laks. Yos Soodardjo	300	8								300	U	III	
Letjen S. Parman	1.355	8								1.355	U	III	ada kakilima
Letjen Suprpto	620	6								620	P	III	sda.
Letjen Haryono MT	960	8								960	P	III	sda.
Laks. Martadinata	700	10								700	U	III	
Meratus					40	4				400	AL	IV	skg. sdh. diaspal
Mawa	350	0								350	L	IIIA	
Mantuil										2.300	L	V	
Mejid	985	6					100	2		985	L	IV	
D.I. Panaitan	735	6								735	P	III	
Muslimin							100	2		100	AL	V	skg. sudah diaspal
Melati							250	3		250	AL	IV	
Mangga					700	5				700	L	IV	skg. sdh. diaspal
Mulawarman	320	0								320	L	IIIA	sda.
Mayjen Sutoyo S	2.350	8			800	6				3.150	U	III	sda.
Muhajirin					700	5				200	L	IV	
Nagasari	900	8								900	L	IIIA	
Niaga	190	13,5								190	P	III	ada kakilima
Niaga Utara	85	9								85	P	III	sda.
Niaga Timur	215	7,5								215	P	III	sda.
Pang. Samudera	1.700	12								1.700	U	III	sda.
Pasar Baru	702	8								702	U	III	sda.
Pulau Laut					350	5				350	L	IV	skg. sdh. diaspal
Pekapuran A							400	3		400	L	I	sda.

Simp. Sei Baru	--	--	--	300	4	--	--	300	AL	V	
Simp. Teluk Tiram	--	--	--	100	3	--	--	100	AL	V	
Saka Bingkam	--	--	--	600	4	--	--	600	AL	IV	skg. sdh. diaspal
Tarakan	150	6	--	--	--	--	--	150	P	IIIA	
Taman Merdeka	250	6	--	--	--	--	--	250	P	IIIA	
Taman Sari	300	6	--	--	--	--	--	300	P	III	
Teluk Tiram Darat	--	--	--	1.250	6	--	--	1.250	U	IIIA	skg. sdh. diaspal
Teluk Tiram Laut	--	--	--	--	--	500	3	1.500	U	V	
Ternate	--	--	--	--	--	150	2	150	L	V	
	1.403	6/8	--	2.093	--	--	--	3.436	P	IIIA	3.436
Ujung Murung	400	9	--	--	--	--	--	400	P	III	
Pulau Laut	--	--	--	--	--	500	4	2.000	P	V	
Kacapiring VI	--	--	--	100	3	--	--	100	AL	IV	
Kacapiring VII	--	--	--	100	3	--	--	100	AL	IV	
Jumlah	38.706 M	--	--	51.902 M	--	18.175	--	108.883 M			

KETERANGAN :

**	Jalan Negara	: 5.360 M'		
+	Jalan Propinsi	: 5.000 M'	Jalan Klas III	: 28.723 M'
U	Jalan Utama	: 28.095 M'	Jalan Klas IIIA	: 17.186 M'
P	Jalan Penghubung	: 21.534 M'	Jalan Klas IV	: 43.289 M'
L	Jalan Lingkungan	: 45.726 M'	Jalan Klas V	: 12.755 M'
AL	Jalan Antar Lingkungan	: 13.528 M'	Jalan Kotamadya	: 98.523 M'

Dikoreksi 4 Desember 1985

Banjarmasin, 15 Oktober 1985
Untuk daftar tersebut di atas
Kepala Dinas Pekerjaan Umum,

M. SABIRIN
NIP. 54000088

nambah pembuatan jembatan baik di kota-kota maupun di desa-desa, bahkan sampai ke pelosok desa pun pemerintah berusaha meningkatkan dan membangun jembatan dan menyediakan biayanya.

Pada tahun 60-an Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan pada umumnya dan Banjarmasin pada khususnya sudah membangun beberapa buah jembatan, antara lain: jembatan putih di Kuin, jembatan merah di Kelayan, jembatan merah di jalan Jati, jembatan Sungai Miai, jembatan Pasar Lama, jembatan bungkuk di Antasari, jembatan Pasar Antasari, jembatan 2 Pekapuran dan sebagainya. Banyak lagi jembatan yang kecil-kecil yang dibangun. Selain pemerintah yang membangun juga masyarakat berusaha keras⁷).

Jembatan terbesar dan terpanjang yang terdapat di Kalimantan Selatan khusus kota Banjarmasin yakni *Jembatan Dewi* atau Jembatan Ahmad Yani. Sebelumnya jembatan ini adalah peninggalan jaman Belanda waktu mereka menjajah Banjarmasin dinamai Jembatan Coen. Nama tersebut berasal dari nama pemimpin Belanda yang bernama John Coen.

Sebelum Belanda meninggalkan Banjarmasin jembatan Coen diledakkannya karena orang Jepang mengambil alih kekuasaan mereka. Dalam waktu yang singkat Jembatan Coen dapat berdiri tegak kembali dibangun oleh orang Jepang dan diganti namanya dengan *Yamato Bashi* atau Jembatan Yamato.

Datang lagi orang Belanda ke Banjarmasin. Jembatan Coen diambil alih oleh orang Belanda dari tangan Jepang, dan namanya dikembalikan lagi jadi Jembatan Coen, kemudian diperbaiki dan diperlebar sedikit. Setelah Belanda meninggalkan Banjarmasin jembatan tersebut merupakan peninggalan orang Belanda dan perlu dilestarikan dan diperbaiki, baik jembatan Belanda yang memberi nama bioskop, pusat perbelanjaan dan jalan-jalan juga kantor pemerintahan dan sebagainya. Sekarang namanya lebih populer dengan nama Jembatan *Akhmad Yani* atau Jembatan *Dewi*⁸).

Pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan Banjarmasin di Ujung Murung dan Pasar Lima dengan Jembatan Akhmad Yani sebagai penghubung kedua pinggir sungai Martapura.

Dengan dibuatnya jembatan di beberapa daerah baik jembatan kecil dan besar sangat mempermudah hubungan masyarakat dan juga sebagai menghubungkan jalan. Kalau tidak ada jembatan sulit untuk membawa hasil bumi atau perdagangan dibanding dengan angkutan bermotor. Maka digunakan melalui jalan sungai kalau membawa barang misalnya semen, gula, dan tepung. Biasanya kalau melalui sungai menggunakan ketotok, dengan banyaknya ketotok lewat jadi bersembur air masuk ke dalam, walaupun pakai tutup dengan plastik, dan mengakibatkan barang-barang tersebut akan basah. Kalau semen dan tepung tentu akan jadi satu atau beku sehingga akan mengakibatkan kerugian bagi yang punya barang tersebut. Tetapi kalau mengangkutnya dengan mobil melalui jembatan akan mempermudah pedagang-pedagang membawa barang dagangannya.

Di dalam Kota Banjarmasin di tahun 50-an itu alat-alat angkutan yang digunakan hanyalah beca, sepeda, sedang mobil khusus untuk umum seperti sekarang tidak ada. Kalau ada mungkin sedikit sekali dan itupun biasanya dimiliki oleh pembesar-pembesar Belanda dan orang-orang bumi putera yang taraf ekonominya cukup mampu.

Mula-mula letak terminal untuk angkutan baik barang maupun orang terletak di muka bioskop Royal yang sekarang bernama Presiden Theater. Di sana dibuat tempat yang sangat sederhana. Penumpang berjalan di muka dan di belakang, alat pengangkutan tersebut yang dikenal dengan nama Bus. Waktu itu letak muka bus dipertemukan atau saling berhadapan. Kalau hari sudah malam maka bus-bus yang tidak beroperasi ini ditambat pada tiang-tiang yang letaknya persis di depan jembatan *Akhmad Yani*. Di sana dijaga oleh seorang opas dan dia diberi imbalan jasa oleh penitip bus-bus masing-masing⁹).

Pada waktu itu jumlah kendaraan untuk angkutan baik orang atau barang sangat sedikit, karena dulu tarap perekonomian masyarakat masih rendah. Jadi orang-orang yang mampu membeli termasuk orang yang kaya menurut keadaan saat itu.

Terminal bus di samping bioskop Royal (Presiden) sekarang diperkirakan sekitar tahun 1950, dan kemudian dipindah ke Pal satu (Km 1) pada tahun 1957 tepatnya di depan *Hotel Madiyati*.

Sedangkan di daerah-daerah yang dituju terminalnya terletak di sembarang tempat atau bebas sambil menunggu tumpangan, bahkan kadang-kadang makelar atau sopir langsung yang menawarkan jasa angkutan ke rumah-rumah penduduk.

Pada waktu itu untuk pergi ke luar kota tidak ada tarif pulang pergi seperti sekarang. Jadi hanya menempuh satu arah saja. Kalau perjalanan memakan waktu malam hari, maka biasanya sopir Bus (taksi) berhenti untuk bermalam seperti; di langgar atau musholla, di rumah-rumah keluarga atau di dalam bus itu juga. Perjalanan di malam hari tidak dilakukan, karena jalan yang dilalui sepi, dan kekuatiran terhadap makhluk-makhluk halus yang ditakutkan.

Di dalam melaksanakan kegiatan perhubungan melalui jalan darat, maka jalan-jalan dan jenis-jenis alat angkutan yang digunakan antara lain mobil sedang dan oplet.

Jenis mobil sedan di antaranya seprolet, doust, yang mulai dipakai pada tahun 45, 46, 47, 51, 52. Juga jenis sedan lain yang bernama Raimut dan Power. Jenis seprolet ini di antaranya seprolet pesek, dokop. Sedang jenis Power di antaranya Power Gabin, Power Wagon dan lain-lain. Jenis power wagon ini merupakan mobil bekas peninggalan dari perang dunia II.

Daya tampung untuk seprolet hanya 6 orang, sedang untuk doust dan bus bisa membuat orang sebanyak 40 orang plus barang dengan tujuan ke Barabai, Amuntai, Rantau dan lain-lain.

Selain sedan, juga dipakai oplet, biasanya dari Banjarmasin ke Gambut atau sebaliknya. Daya tampung oplet biasanya 10 orang atau lebih di samping juga dimuati barang. Bentuk oplet ini rodanya seperti gerobak dan tempat tampung di perbesar dengan ditambah bentuk dari kayu papan. Oplet ini ramai dipakai setelah para petani selesai menuai padi di sawah, terutama daerah pertanian Gambut.

Untuk angkutan barang dipakai trak dengan nama Pargo, Pargogi, Pargoha (dalam bahasa Banjar), bus bola dunia, seprolet pesek. Mulai dipakai sekitar tahun 40-an. Lainnya juga port dan dust keluaran tahun 1948–1950-an ke atas, sedang jenis Pord ini masih dipakai sampai sekarang. Jenis dust tahun 45, dan 46 ini masih ada sampai sekarang terletak di Hotel Maramin¹⁰).

Alat angkutan dalam kota kebanyakan memakai perahu dayung dan kapal sebagai sarana lalu lintas air, baik untuk barang maupun orang. Dengan demikian keadaan perekonomian kota Banjarmasin juga dapat berjalan dengan baik, hanya laju gerak perekonomian yang lamban, sehingga perhubungan dengan luar daerah turut pula lamban. Apalagi taraf hidup rakyat yang masih di bawah cukup, sebagai akibat dari pemerasan kaum penjajah.

Kegiatan angkutan yang menggunakan alat-alat bertenaga mesin ini mempunyai arah di antaranya jurusan:

- 1) Banjarmasin – Pal Tujuh
- 2) Banjarmasin – Gambut
- 3) Banjarmasin – Martapura
- 4) Banjarmasin – Amuntai, batas terjauh yang ditempuh saat itu daerah Plehari.

Sedang untuk pergi ke daerah yang lebih jauh seperti Marabahan, Nagara, Kotabaru dan lain-lain menggunakan kapal sungai.

Alat angkutan yang digunakan di dalam kota kebanyakan melalui sungai seperti jukung dan perahu **tambangan**. Untuk angkutan perahu kecil (jukung) ini tempat terminalnya dulu sungai sekarang di seberang Mesjid Sabilal Muhtadin dan di Teluk Kelayan serta Telawang. Alat angkutan air ini terkenal dengan sebutan *Getek*. Jenis lain yang juga dipakai angkutan adalah Perahu Tambangan. Perahu Tambangan ini sejenis perahu kecil (jukung) namun berbeda dengan jukung, karena pada haluan dan buritan mempunyai sampung berukir dan mempunyai Atap (alat pelindung). Perahu tambangan biasanya terdapat di sekitar Ujung Murung sampai ke Pasar Kupu-kupu. Perahu tambangan ini biasanya mengangkut bahan sandang dan barang-barang pangan lainnya.

Untuk ke daerah pedalaman yang lebih jauh bisa digunakan bus, juga hanya separo jalan, sisanya dilanjutkan dengan kapal sungai.

Tarif atau biaya angkut saat itu dibanding dengan sekarang jauh berbeda, disebabkan nilai rupiah yang tidak sama. Dulu untuk pergi dari Banjarmasin ke Martapura sebanyak Rp 20,—. Dari Banjarmasin ke Kandangan sebanyak Rp 35,—. Sedang sekarang dari Banjarmasin ke Martapura sebesar Rp 1.000,— dan dari Banjarmasin ke Kandangan mungkin sebesar Rp 2.000,— juga dari Gambut ke Banjarmasin sekarang sekitar Rp 750,—¹).

7.3 Terminal Kota sebagai Urat Nadi Lahu-lintas Darat di Kota dan di Luar Kota

Di tahun 1950 ini keadaan Kota Banjarmasin tidak banyak mengalami perubahan kecuali statusnya sebagai ibu kota, yaitu sebagai kota praja menjadi daerah otonom. Beberapa tahun kemudian secara berangsur-angsur diadakan perubahan terutama pada penamaan jalan-jalan dan nama-nama kantor, baik nama-nama dari bahasa Belanda dan bahasa Jepang. Seperti antara lain pengubahan nama jalan dari bahasa Belanda menjadi bahasa Indonesia.

Perubahan nama-nama jalan itu seperti:

- 1) Acteron diganti menjadi jalan Bank Rakyat
- 2) Heren Gracht diganti menjadi jalan Jawa
- 3) Militaire Weg diganti menjadi jalan Kalimantan
- 4) Simpang Water Leiding diganti menjadi jalan Kuripan.

Di dalam kota Banjarmasin segala kegiatan sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintah kota diatur oleh Kotapraja, yang sekarang dikenal dengan sebutan Kotamadya^{1 2}).

Kegiatan lalu lintas di tahun 50-an ini tidak banyak mendapat perhatian dari petugas pemerintah Kotamadya, baik berupa angkutan di darat maupun di laut. Terutama sekali lalu lintas kota. Saat itu orang mendapat kebebasan dalam memakai jalanan seperti boleh memarkir bus untuk tumpangan di mana saja karena saat itu jumlah penduduk yang masih sedikit dan perhatian masyarakat terhadap kendaraan bertenaga mesin ini tidak sepenuhnya diperlukan, mengingat keadaan perekonomian yang masih sederhana.

Saat itu peraturan yang ada sehubungan kegiatan lalu lintas hanyalah para sopir angkutan dikenakan bayar Perhoning (bahasa Banjar) yang sekarang dikenal dengan STNK. Jangka waktu dari Vergunning, bahwa berlakunya Perhoning ini selama 5 tahun. Sesudah lima tahun maka perhoning ini diganti dengan yang baru. Kalau hal ini tidak diindahkan oleh sopir juga tidak ada sanksi atau hukuman terhadap pelanggaran peraturan itu.

Terminal di Km 1 dipindahkan ke Km 6, karena terletak di tengah kota yang cukup mengganggu keamanan kota. Para pengemudi atau sopir mengangkut penumpang berlebih-lebihan sekehendak hati karena tidak diatur secara efektif, akhirnya dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pengemudi yang lain. Akibatnya dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Mengingat hal tersebut maka pemerintah mencari tempat yang lebih sesuai dan dapat menjamin keamanan kota tersebut yaitu di KM. 6. Terminal yang berada di KM.6 letaknya

memang cukup baik untuk hal itu karena: lokasinya cukup luas, arus lalu lintas dapat terjamin, dapat mengurangi polusi udara, memudahkan penumpang untuk bepergian, dan letaknya yang strategis dan dapat memberikan kesempatan pengangkutan bagi taksi-taksi kota dan taksi-taksi lainnya untuk memperoleh pendapatan atau hasil yang cukup.

Sebab-sebab dipindahkannya terminal:

- 1) Karena dulu di jalan umum sehingga mengganggu arus lalu lintas.
- 2) Tidak ada lokasi tertentu yang dapat mengatur pemberangkatan penumpang.
- 3) Sering terjadi kecelakaan.

Khusus untuk jenis sedan tetap berada di KM 1. Karena itu sedan dapat bebas mengantar penumpang ke tempat tujuan. Untuk jenis mobil Colt semuanya harus berpusat di terminal KM 6 dan tidak diperkenankan memasuki kota kecuali mendapat ijin dari yang berwenang. Tarifnya untuk satu buah mobil Colt memasuki kota Rp 1.000,00, sebagai bea ijin masuk¹³).

Adapun jumlah pemberangkatan mobil/kendaraan setiap hari sesuai jurusannya dapat dilihat pada tabel berikut¹⁴).

Jurusan	Pagi (buah)	Sore (buah)
Banjarmasin – Martapura	125	75
Banjarmasin – Rantau	15	9
Banjarmasin – Kandangan	18	13
Banjarmasin – Barabai	10	15
Banjarmasin – Amuntai	12	8
Banjarmasin – Tanjung	9	5
Banjarmasin – Pelaihari	29	20
Banjarmasin – Asam-Asam	5	2
Banjarmasin – Ampah	3	1
Banjarmasin – Pagatan	3	0
Banjarmasin – Pagatan	3	0
Banjarmasin – Penajam	3	1

7.4 *Dermaga Merupakan Urat Nadi Lalu-lintas Sungai di Kota Banjarmasin*

Secara geografis Kota Banjarmasin terletak di Muara Sungai Barito. Tentu saja kota Banjarmasin selain merupakan ibu kota Propinsi Kalimantan Selatan, sekaligus juga sebagai kota pelabuhan dan pintu gerbang lalu lintas barang ke daerah-daerah pedalaman di Kalimantan Selatan dan daerah Kalimantan Tengah yang terletak di tepi Sungai Barito. Dari muara sungai ini dapat dilayari oleh berbagai macam alat angkutan sejauh lebih kurang 800 kilometer hingga Tumbang Kunyi di hulu pedalaman^{1 5)}

Di sepanjang tepian Sungai Barito terdapat empat wilayah kabupaten, yaitu: Kabupaten Barito Kuala ibukotanya Marabahan, Kabupaten Barito Selatan ibukotanya Buntok, Kabupaten Barito Utara ibukotanya Muara Teweh, dan Kabupaten Administratif Murung Raya ibukotanya Puruk Cahu. Karena itu sungai ini mempunyai peranan yang penting sebagai urat nadi lalu-lintas pelayaran terhadap kelancaran perhubungan dan kelancaran arus lalu lintas barang serta untuk meningkatkan tarap hidup penduduk wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah.

Bila memperhatikan pengangkutan sungai di daerah sepanjang sungai Barito ini dengan banyaknya jenis angkutan sungai untuk mengangkut dari berbagai macam jenis barang adalah merupakan jalan utama dan merupakan pula substitusi mutlak terhadap angkutan jalan raya sebagai satu-satunya pengangkutan untuk daerah tersebut dan sekitarnya. Oleh karena itu sungai sangat menunjang untuk mempermudah arus pelayaran yang cukup murah dibanding dengan angkutan darat^{1 6)}.

Menurut catatan yang terdapat di kantor LLASDP (Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan) Banjarmasin untuk tahun 1972 sampai tahun 1974 jumlah kapal mo-

tor dan klotok yang hilir mudik di sungai Barito berjumlah sebanyak 3.331 buah sampai dengan tahun 1978 kapal dan lain-lain berjumlah 3.883^{1 7}).

Dari Seksi Pembinaan Pelayaran dan Terminal LLASDP Banjarmasin yang penulis peroleh umumnya selain rakit-rakit dan perahu dayung yang dipergunakan oleh masyarakat dan penduduk di sekitar sungai Barito sebagai sungai utama dan sungai-sungai kecil sebagai anak cabang yang dipergunakan untuk lalu lintas pelayaran sungai terdapat banyak jenis alat-alat angkutan yang dikenal masyarakat dengan sebutan: kapal api atau kapal uap, kapal motor dalam, klotok, motor tempel, tongkang, dan perahu tiung. Oleh pemiliknya semua jenis alat angkutan tersebut di atas harus didaftarkan kepada Inspeksi II LLASDP, karena para pemilik atau para perusahaan angkutan sungai harus memberitahukan banyaknya jenis angkutan yang dimiliki. Inspeksi II LLASDP sebagai aparat pemerintah sungai dengan tugas pokoknya perlu kita ketahui adalah hak dan tugasnya melakukan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang perhubungan sungai ini.

Adapun tugas-tugas ini meliputi perencanaan, koordinasi, pengendalian dan pengawasan lalu lintas pelayaran serta angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang ditujukan untuk melayani kepentingan ekonomi, perdagangan, sosial budaya dalam rangka pembangunan Nasional bangsa Indonesia.

Dengan banyaknya alat transpor atau angkutan sungai yang teratur dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta kepentingan masyarakat tentu dapat menunjang kelancaran arus lalu lintas barang, penumpang serta dapat meningkatkan taraf hidup penduduk kita yang sebagian bertempat tinggal di desa-desa. Karena banyaknya alat transpor sungai tersebut maka pemerintah telah membuat/membangun terminal point atau suatu tempat tambatan untuk kegiatan bongkar muat barang kapal-kapal yang datang dari pedalaman atau kapal-kapal

sungai-itu. Lazimnya tempat tambatan ini disebut pelabuhan atau dermaga.

Tempat tambatan yang dikenal dengan beberapa istilah antara lain: pelabuhan, bandar, jembatan, bom atau dermaga. Kita harus kembali kepada kegiatan arus lalu lintas pelayaran sungai kepada/guna mengimbangi alat-alat angkutan sungai sebab perlu memberikan fasilitas bagi kapal-kapal tersebut dengan jalan membangun dermaga atau merehabilitasi dermaga-dermaga yang sudah ada.

Dermaga merupakan urat nadi lalu lintas sungai yang ditutamakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Untuk berlabuh atau bertambat
- 2) untuk bongkar muat barang
- 3) untuk turun atau naik penumpang
- 4) untuk penyediaan, penambahan bahan bakar
- 5) untuk kepentingan lain-lainnya.

Walaupun di antara dermaga-dermaga yang ada dan terdapat di sepanjang sungai Barito hingga sekarang ini masih bisa dimanfaatkan sebagaimana fungsinya, untuk memberikan pelayanan yang layak kepada alat transport tersebut dianggap perlu melakukan penyempurnaan dan penambahan.

Banyaknya jumlah alat angkutan sungai untuk menyelenggarakan pengangkutan barang-barang, orang atau penumpang antar kota dan desa, masih belum bisa menjamin kelancaran penyaluran barang-barang yang selalu masyarakat hajatkan dan dipakai setiap hari tanpa mempunyai tempat yang aman, tenang dan praktis bagi alat-alat angkutan tadi untuk bertambat dalam melakukan kegiatan bongkar atau muatnya^{1 8}).

Dari sekian banyak dermaga yang telah dibangun oleh Inspeksi II LLASDP Kalimantan Selatan dan Tengah terdapat pula dermaga-dermaga pemerintah daerah setempat yang pada umumnya sudah lebih dahulu dibangun. Bagaimana pun tam-

paknya masih belum dapat menampung seluruh kegiatan dari jumlah angkutan sungai atau kapal-kapal yang ada.

Inspeksi II LLASDP telah mengambil kebijaksanaan membuat dermaga-dermaga apung yang terdiri dari ponton. Dermaga ponton ini fungsi pokoknya juga bersifat sebagai fase percobaan untuk mengetahui kepadatan kegiatan pada daerah tempat dermaga ponton itu dibangun, yang kemudian dipertimbangkan dibangunnya dermaga permanen. Dari Inspeksi II LLASDP yang penulis peroleh, beberapa dermaga tempat bertambat yang terdapat di daerah sepanjang perairan sungai Barito dan dalam daerah khusus Kotamadya Banjarmasin termasuk dermaga-dermaga yang dibangun oleh pemerintah daerah setempat adalah sebagai berikut di bawah ini:

- 1) Kotamadya Banjarmasin
 - a) Dermaga Telawang (milik Pemda)
 - b) Dermaga Ponton antasari (milik LLASDP)
 - c) Dermaga Ponton pasar gelora (milik LLASDP)
 - d) Dermaga ponton Queen (milik LLASDP)
 - e) Dermaga Banjarmasin, samping Gedung Unlam Unit II (milik Dirjen Perhubungan Darat)^{1 9}).
- 2) Kabupaten Barito Kuala
 - a) Dermaga Anjir Muara (milik Pemda)
 - b) Dermaga Marabahan (milik Dirjen Hubdar)
 - c) Dermaga Ujung Panti (milik Pemda)
- 3) Kabupaten Barito Selatan

Dermaga Jenamas (milik Dirjen Perhubungan Darat)
- 4) Kabupaten Barito Utara

Dermaga Muara Teweh (milik Pemerintah Daerah).

Beberapa dermaga yang tersebut di atas merupakan urat nadi lalu lintas pelayaran, guna kepentingan bertambat, bongkar atau muat barang, turun naik penumpang dan guna kepentingan lainnya^{2 0}).

Dibangunnya dermaga-dermaga tersebut mengingat akan kebutuhan dan kepentingan pengangkutan secara teratur serta terkoordinasi kepada barang-barang penumpang dan pemilik alat-alat pelayaran itu.

CATATAN

- 1) Departemen Pekerjaan Umum Kodya Banjarmasin, 1970.
- 2) *ibid.*, hal. 21.
- 3) Repelita II, *Rencana Pembangunan Lima Tahun Kodya Banjarmasin*. Pemda Tingkat II Kodya Banjarmasin, 1974. hal. 56.
- 4) *ibid.*, hal. 98.
- 5) *Monografi Kodya Banjarmasin*. Pemda Tingkat II Kodya Banjarmasin, 1974. hal. 35.
- 6) *ibid.*, hal. 40.
- 7) Sensus dan Statistik, *Kal-Sel Dalam Angka 1980*. Kantor Sensus dan Statistik, Banjarmasin, 1980. hal. 105.
- 8) M. Idwar Saleh, *Banjarmasin*. Museum Lambung Mangkurat, Banjarbaru, 1982. hal. 31.
- 9) Wawancara dengan Bapak Darham, pada tanggal 15 November 1985.
- 10) Wawancara dengan Bapak Abidin, pada tanggal 15 November 1985.
- 11) *ibid.*
- 12) Wawancara dengan Bapak Darham, pada tanggal 15 November 1985.

- 13) Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan, *Pendapatan Regional Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 1969–1974*. Pemda Tingkat I Kal-Sel, Banjarmasin, 1979, hal. 119.
- 14) Dinas Angkutan Jalan Raya Kodya Banjarmasin.
- 15) Halim Ahmad, *et.al*, *Geografi Budaya Wilayah Pembangunan Kalimantan Selatan*. Depdikbud, Jakarta, 1980, hal. 12.
- 16) Inspeksi II LLASDP Kalimantan Selatan Tahun 1974.
- 17) Inspeksi II LLASDP Kalimantan Selatan Tahun 1979.
- 18) Pemda Tingkat I Kalimantan Selatan, *Perincian Repelita II Kalimantan Selatan*, Pemda Tingkat I, Banjarmasin, 1974, hal. 65.
- 19) Wawancara dengan Petugas LLASDP Banjarmasin, tanggal 25 Oktober 1985.
- 20) *Monografi Kotamadya Banjarmasin*, Pemerintah Daerah Tingkat II Banjarmasin, 1979, hal. 58.

BAB VIII PENUTUP

Sumber perubahan kependudukan adalah migrasi internal, sebagai akibatnya sulit mengadakan pengendalian sosial, artinya bagi masyarakat Banjar terjadi ancaman terhadap keserasian terhadap organisme sosial secara menyeluruh. Biasanya para pendatang baru dari Hulu Sungai membuat gubuk atau rumah seenaknya tanpa aturan seperti di daerah Kelayan, dan daerah buruh pabrik di Banjar Raya. Bagi mereka yang sukses juga tidak tanggung-tanggung membuat rumah mewah seperti di Jalan Gatot Subroto dan Jalan Mawar. Tentu saja kesuksesan itu didukung oleh pengalaman dan keuletan lama bekerja sebagai pedagang atau pengusaha.

Kotamadya Banjarmasin sebagai titik pusatnya adalah dari Pasar Lama ke hilir sungai Martapura sampai pelabuhan lama sekarang. Pada titik pusat kota terdapat pasar, pusat pertokoan, pusat perbelanjaan, hotel-hotel, kantor-kantor dan rumah gedongan, teater, dan Balai Kotapraja, termasuk terminal-terminal kota yang menjurus ke semua arah.

Wilayah di sekitarnya merupakan daerah yang memanjang menurut jalur jalan raya atau jalan kota. Pada daerah pemukim-

an di tepi jalan raya rumah mereka permanen dan sebagian rumah gedongan. Pada belakang pemukiman jalur jalan raya atau jalan kota, terdapat daerah yang mengalami disorganisasi sosial yang menarik bagi warga masyarakat secara sosial ekonomis. Daerah ini berisikan masyarakat pluralistik. Di sekitar titik pusat kota bermukim masyarakat yang kegiatannya industri kecil, pedagang kecil, kampung, dan buruh-buruh serta pengangguran. Karena itu di daerah ini sering terjadi kejahatan, pelacuran, dan seringnya kebakaran.

Pada ujung jalan raya Teluk Dalam daerah pinggiran kota tepi sungai Barito didirikan pabrik-pabrik kayu (sawmill), perusahaan ikan dan dok-dok kapal.

Di sekitar ini pula bermukim buruh-buruh yang tinggal pada rumah-rumah kecil. Terakhir wilayah pemukiman pemerintah seperti perumahan BTN Km 5 dan 6, Jalan Kayu Tangi dan Kompleks DPR. Umumnya yang menempati adalah Pegawai Negeri, Pegawai Perusahaan dan pengusaha-pengusaha.

Masyarakat Banjar tampaknya bersifat terbuka, suka menerima masyarakat luar hidup secara berdampingan, tetapi yang prinsip bagi mereka asal jangan menyinggung masalah agama Islam. Di kota Banjarmasin penduduk asli berada pada pinggiran kota kecuali Kampung Melayu, seperti Kuin, Mantuil, dan Pangambangan. Yang lainnya masyarakat urban dari Hulu Sungai yang terbesar dan dari berbagai suku bangsa di wilayah Indonesia.

Penduduk kota tinggal terpecah pada lokasi masing-masing, bahkan tempat bekerja pun cukup jauh, tetapi dengan adanya jasa-jasa dari transportasi masyarakat kota mendapat kemudahan-kemudahan. Mereka tidak perlu lagi dekat dengan pusat perbelanjaan, atau pusat penyediaan kebutuhan dasar, atau terminal. Jaringan rute kendaraan umum yang luas, juga menghilangkan penghalang untuk meluaskan lingkungan pemukiman di kota. Kendaraan air fungsinya juga sama dengan kendaraan di darat sebagai alat angkut penumpang dan barang.

Seluruh organisasi sosial di kota Banjarmasin, tampaknya menyesuaikan diri dengan perubahan atau perkembangan, tetapi penyesuaian itu tidak selalu berjalan lancar, oleh karena hal itu menyangkut keserasian antara segi material dengan spiritual.

DAFTAR BACAAN

- Arthum Artha, Banjarmasin, Museum Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 1970
- Amir Hasan Kiai Bondan, Suluh Sejarah Kalimantan, Percetakan Fajar, Banjarmasin, tanpa tahun
- A.A. Bijuri, "Dinasti Surianata – Lambung Mangkurat", Harian Utama, Banjarmasin 30 Agustus 1972
- Arsip Nasional R.I. *Surat-Surat Perjanjian antara Kesultanan Banjarmasin dengan Pemerintah V.O.C. Bataavtse Republiek, Ingeris dan Hindia Belanda, 1835–1870*, Jakarta, 1965
- Broersma, R, *Handal in Bedrijf in Zuid en Oost Borneo*, Dinas Angkutan Jalan Raya Kotamadya Banjarmasin, 1977
- Departemen Pekerjaan Umum Kotamadya Banjarmasin, 1970
- Dieter Evers, Hans, *Sosiologi Perkotaan*, LP3ES, Jakarta 1982
- Dijk Van, LCD, *Neerlands Vroegste Betrekkingen Met Borneo, dan Solo Archipel, Cambodia, Siam en*
- Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru 1977
- Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru 1974

- Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru 1979
- Encyclopaedie Van Nederlandscht Indie, 1917
- Edi S, *Pembangunan Pasar di Kotamadya Banjarmasin* (skripsi). Fakultas Ekonomi Unlam, Banjarmasin, 1981
- Eisenberger, "Algemeene Memorie Betreffende de order Afdeeling Banjarmasin-Marabahan in of Afdeeling Banjarmasin der Residentil Zuider en Ooster Afdeeling Van Borneo", *Arsip Nasional R.I.* Jakarta, 15 Juni 1936
- Halim Ahmad, (Tim), *Geografi Budaya Wilayah Pembangunan Kalimantan Selatan*, Depdikbud, Jakarta, 1980
- Haryanto, *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*. Liberty, Yogyakarta, 1984
- H. Ramli Nawawi dan Tamny Roeslan (Tim) *Peta Sejarah Kalimantan Selatan*, Depdikbud, Banjarmasin, 1984
- H. Ramli Nawawi dan Tamny Roeslan (Tim), *Sejarah Sosial Daerah Kalimantan Selatan*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek IDSN, Jakarta, 1984
- Inspeksi II LLASDP Kalimantan Selatan Tahun 1974
- Inspeksi II LLASDP Kalimantan Selatan Tahun 1979
- Kalimantan Selatan Dalam Angka 1974, Kantor Sensus dan Statistik Propinsi Kalsel Banjarmasin, 1974
- Kalimantan Selatan Dalam Angka 1978, Kantor Sensus dan Statistik Propinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin, 1978
- Kalimantan Selatan Dalam Angka, 1980, Kantor Sensus dan Statistik Propinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin, 1980
- Kemmerling, GLL, "Topografische en Geologische Beschrijving van het Gebied van de Barito," *Tijdschrift Nederlands Indie*, E.J. Brill, Leiden, 1915
- Laporan Tahunan Kanwil Perdagangan Propinsi Kalimantan Selatan, Departemen Perdagangan Banjarmasin, 1977
- Monografi Kalimantan Selatan 1977, Depdikbud, Jakarta 1977
- M. Idwar Saleh (Tim), *Sejarah Kalimantan Selatan*, Depdikbud, Jakarta, 1977/1978

- Monografi Kota Banjarmasin*, BAPPEDA Kodya Daerah Tingkat II, Banjarmasin, 1975
- Monografi Propinsi Kalimantan Selatan*, BKKBN Propinsi Maftuchan Yusuf, *Pengaruh Timbal Balik Antara Kependudukan Dengan Berbagai Aspek Kehidupan Manusia*, Fak. Pasca Sarjana IKIP Jakarta bekerja sama BKKBN, Jakarta, 1985
- Muh. Nur Baso (TIM), *Sejarah Kota Besar Makassar/Kotamadya Ujung Pandang (1950-1979)* Depdikbud, Jakarta, 1984/1985
- M. Idwar Saleh, *Banjarmasin*, Depdikbud Museum Lambung Mangkurat Propinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, 1982
- M. Idwar Saleh, *Banjarmasin Balai Pendidikan Guru*, Bandung, 1958
- Masthoff EB, *Aanteekeningen omtrent de onder Afdeeling Tabalong en Kloewa van Zuid en Ooster afdeeling van Borneo*, *Indische Gids I (1818)*
- Mengenal Kota Banjarmasin* Kantor Deppen Kodya Banjarmasin, Banjarmasin, tanpa tahun
- Nugroho Notosusanto (Tim), *Sejarah Nasional Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Jakarta, 1983
- Perincian Repelita II Kalimantan Selatan, Pemda Tk. I, Banjarmasin, 1974
- Pendapatan Regional Propinsi Kalimantan Selatan*, Tahun 1969-1974, Pemda Tk. I Kalimantan Selatan, Banjarmasin, 1974
- Pudjiwati Sajogyo, *Sosiologi Pembangunan*, Fak. Pasca Sarjana IKIP Jakarta, Jakarta, 1985
- Retrebusi Pasar di Kotamadya Banjarmasin*, Pemda Tk. II Banjarmasin, 1972
- Registrasi Penduduk Kalimantan Selatan Tahun 1978*, Kantor Sensus dan Statistik, Banjarmasin, 1978
- Ras, J.J., *Hikayat Banjar, A Study in Malay Historiography's* - Gravenhage: N.V. De Nederlandsche Boek - on steedrikkerij, v/h H.L. Smits, 1968

- Rencana Pembangunan Lima Tahun Kotamadya Banjarmasin* (1974–1978) Pemda Kodya Banjarmasin, Banjarmasin, 1974
- Surat Keputusan Mendagri No. 48 Tahun 1977
- Soerjono Soekanto, *Struktur Masyarakat*, CV. Rajawali Jakarta, 1983
- Surat Keputusan DPRD Tingkat II Kotamadya Banjarmasin, tanggal 17 Agustus 1973, No. 9/DPRD - RPTS/73
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi*, U.I., Jakarta, 1970
- Soeri Soeroto, "Pergerakan Sosial dan Perang Banjarmasin", *Seminar Sejarah Nasional II*, Yogyakarta, 26–29 Agustus 1970
- Schrieke, B, *Indonesia Sociological Study*, part one Van Hoeve Ltd, The Hagne Bandung, 1955
- Soeri Soeroto, "Berdirinya Kerajaan Banjarmasin Suatu Tinjauan Sosial Kultural", dalam *Lembaran Sejarah No. 6* Fak. Sasdaya, UGM, Yogyakarta, 1978
- Team Penyusun, *Kalimantan Selatan 1963–1968*, Pemda Kalimantan Selatan, Banjarmasin, 1968.
- Tijdschrift voor Nederlandsch Indie I.2 1838
- Tamny Roeslan, *Gerakan Muning: Sebuah Gerakan Sosial di dalam Perang Banjar* (Thesis) Fak Sasdaya UGM, Yogyakarta, 1981
- Urusan Angkutan Jalan Raya Terminal Km 6 Kotamadya Banjarmasin 1979/1980
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1957
- Undang-Undang No. 18 Tahun 1965
- Yustan Aziddin (Tim), *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Kalimantan Selatan*, Depdikbud, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek IDSN, Jakarta, 1983/1984

Hasil Wawancara :

- Abidin , 15 November 1985
As'ari , 25 Oktober 1985
Abdurahman , Staf Kotamadya Banjarmasin, 19 Agustus
1985
Darham , 15 November 1985
M. Utuh , Pedagang Kain, 21 November 1985
H. Ramnah , Pedagang Kain, 15 November 1985
Hadidjah , Pedagang buah-buahan, 10 Desember 1985
Mujali , Pedagang Kaki Lima, 30 Oktober 1985
Parhani , 10 Agustus 1985
Ruslan , 18 Agustus 1985
Riduan Iman , Ex. Walikota, 8 Agustus 1985
Tuhalus , 25 Oktober 1985

DAFTAR KEADAAN SDN/SWA TASUBSIDI DARI TAHUN 1950 S/D 1965

No.	Nama Kecamatan	Jenis Status	T a h u n																	Jumlah
			1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965		
1.	B. Barat	SD. Negeri	12	-	4	-	1	1	4	-	4	1	1	-	-	-	-	28		
		Subsidi	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
		Swasta	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	4		
2.	B. Timur	SD. Negeri	8	-	-	1	5	5	1	2	-	-	2	-	-	-	-	25		
		Subsidi	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
		Swasta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2		
3.	B. Selatan	SD. Negeri	-	-	-	-	4	-	1	1	-	-	-	1	1	1	-	2		
		Subsidi	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
		Swasta	11	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3		
4.	B. Utara	SD. Negeri	7	1	-	2	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	13		
		Subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Swasta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
J U M L A H			33	1	4	3	11	6	7	4	4	2	6	-	1	1	2	3	88	
Kesimpulan:																				
1. SD. Negeri = 74 buah			27	1	4	3	11	6	7	3	4	1	4	-	1	-	1	1	74	
2. Subsidi = 5 buah			5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
3. Swasta = 9 buah			1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	1	2	9		

DATA DIAMBIL DARI DINAS P DAN K
CABANG KODYA BANJARMASIN 20 November 1985

**DAFTAR KEADAAN SMTP – SMTA NEGERI MULAI TAHUN AJARAN
1950–1965 (TIDAK TERMASUK SMEP)
WILAYAH KANDEP DIKBUD KODYA BANJARMASIN**

Lampiran II

No.	TINGKAT	T A H U N															
		1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965
1.	SMP. NEGERI	1	1	1	1	1	2	3	3	3	3	4	6	6	6	6	7
2.	SMP. SWASTA	2	2	3	4	4		5	5	5	6	6	6	6	6	6	8
	JUMLAH	3	3	4	5	5		8	8	8	9	10	12	12	12	12	15
3.	SMTA NEGERI	1	1	1	1	3	2	4	5	5	5	5	5	5	6	7	8
4.	SMTA SWASTA							1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
	JUMLAH	1	1	1	1	3	2	5	6	6	7	7	7	7	8	9	10

DATA DIAMBIL DARI KANDEP PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KOTAMADYA BANJARMASIN

**DAFTAR KEADAAN S.D – SMP – SMTA NEGERI MULAI TAHUN AJARAN 1965 S.D. 1979
WILAYAH KANDEP DIKBUD KODYA BANJARMASIN**

Lampiran III

No.	TINGKAT	T A H U N														
		1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	S.D															
2	S.M.T.P	15	15	17	18	19	19	19	19	20	21	21	24	27	27	38
3	S.M.T.A	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	14	16	18	23
4	JUMLAH	25	25	27	28	30	30	30	30	32	33	33	38	43	45	61

Banjarmasin, 2 Januari 1986
Kandep Dikbud Kotamadya Banjarmasin

ttd
Siahaan

Lampiran: IV

**Kebakaran Yang Terjadi Di Banjarmasin
Dari Tahun 1965 Sampai Tahun 1979**

Tahun	Alamat Kebakaran	Kecamatan
1965	Jl. Martadinata Jl. Kelayan Jl. A. Yani Km I Jl. Sudimampir Pasar Lima Pasar Sudimampir	Banjar. Barat Banjar. Selatan Banjar. Timur Banjar. Barat Banjar. Barat Banjar. Barat
1966	Jl. P. Antasari Jl. Sudimampir Telawang	Banjar. Timur Banjar. Barat Banjar. Barat
1967	Jl. Kelayan, (Gg. Antasari) Pasar Lima	Banjar. Selatan Banjar. Barat
1968	Jl. P. Antasari Jl. Kuin Selatan	Banjar. Timur Banjar. Utara
1969	Kp. Sungai Jingah	Banjar. Utara
1970	Jl. P. Antasari/Pekapuran	Banjar. Timur
1971	Pasar Ujung Murung Jl. Sudimampir	Banjar. Barat Banjar. Barat

Sumber: BPK Kotamadya Banjarmasin

Lampiran: V

Tahun	Alamat Kebakaran	Kecamatan
1972	Pasar Lima Jl. A. Yani Km I Jl. Kelayan Jl. Mulawarman Jl. Belitung Darat Pasar Baru	Banjar. Barat Banjar. Timur Banjar. Selatan Banjar. Barat Banjar. Barat Banjar. Barat
1973	Jl. Batu Benawa R.K. Ilir Jl. P. Antasari Jl. S. Parman	Banjar. Barat Banjar. Selatan Banjar. Timur Banjar. Barat
1974	Jl. P. Antasari Jl. Sudimampir Jl. Kelayan B Pasar Sudimampir Jl. Kelayan	Banjar. Timur Banjar. Barat Banjar. Selatan Banjar. Barat Banjar. Selatan
1975	Jl. Belitung Jl. Sudimampir	Banjar. Barat Banjar. Barat
1976	Jl. A. Yani Km I Jl. Hasanuddin HM	Banjar. Timur Banjar. Barat
1977	Kp. Gadang Pasar Lima Pasar Sudimampir Banjar Raya	Banjar. Timur Banjar. Barat Banjar. Barat Banjar. Barat

Tahun	Alamat Kebakaran	Kecamatan
1977	Jl. P. Antasari Jl. Sudimampir Jl. A. Yani Jl. Pasar Baru Jl. Kelayan Pasar Sudimampir Jl. Alalak Jl. Let.Jen. Soeprapto Jl. S. Parman Jl. Teluk Kelayan Jl. Martadinata Pasar Baru Jl. Mawar Pasar Lima Kayu Tangi Jl. Dewi Sinta Jl. Niaga Timur	Banjar. Timur Banjar. Barat Banjar. Timur Banjar. Barat Banjar. Selatan Banjar. Barat Banjar. Utara Banjar. Barat Banjar. Barat Banjar. Selatan Banjar. Barat Banjar. Barat Banjar. Barat Banjar. Barat Banjar. Utara Banjar. Timur Banjar. Barat
1978	Jl. Simp. Sudimampir Jl. Pekapuran B Jl. Sutoyo S (Es Terang) Jl. Aes. Nsution Pasar Kujajing Jl. P. Antasari Jl. Kelayan Pasar Lima Jl. KP. Tendea Jl. Cempaka III	Banjar. Barat Banjar. Timur Banjar. Barat Banjar. Timur Banjar. Barat Banjar. Timur Banjar. Selatan Banjar. Barat Banjar. Timur Banjar. Barat

Sumber: BPK Kotamadya, Banjarmasin 1972-1977

Lampiran: VI

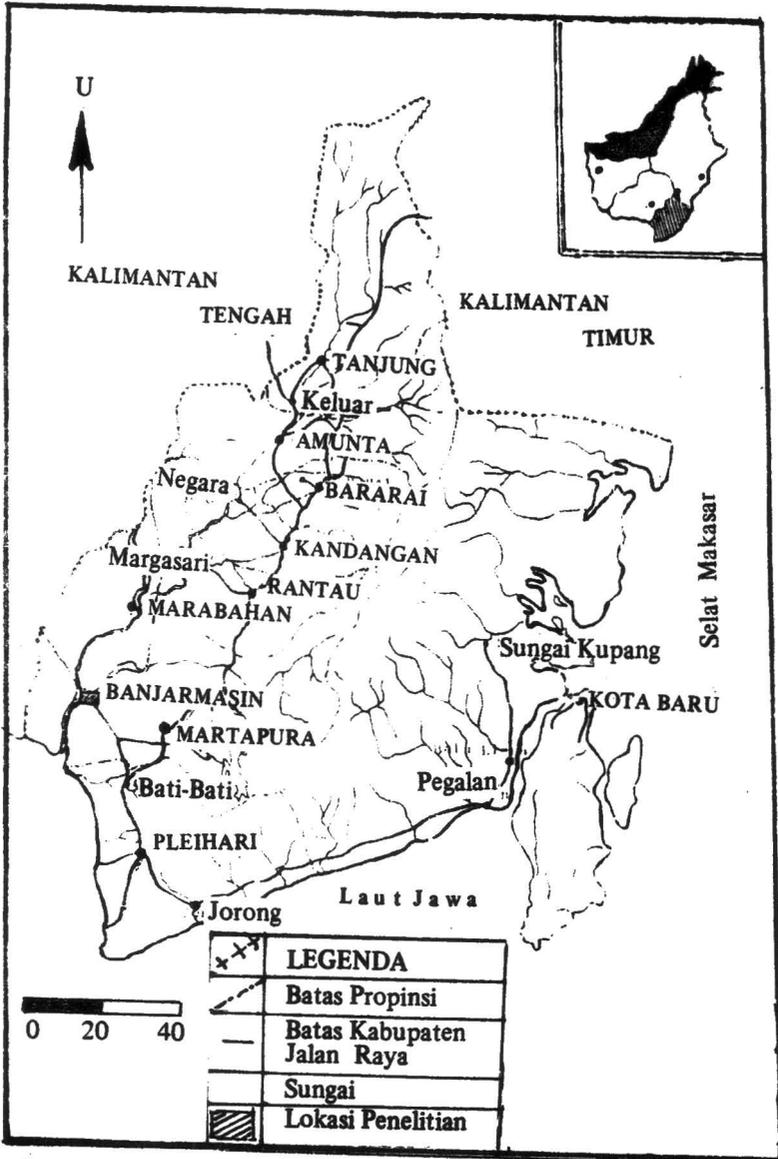
Tahun	Alamat Kebakaran	Kecamatan
1979	Jl. Seberang Mesjid (Kp. Kelab) Jl. Kelayan B Pasar Rambai Kp. Melayu Darat Jl. A. Yani Jl. Sudimampir Jl. KP. Tendean Jl. Dahlia Jl. Mawar Jl. Sulawesi Alalak Selatan Jl. Arjuna Jl. Gatot Subroto Jl. R. Antasari Pasar Lima Jl. S. Parman Jl. Sutoyo S. Pelabuhan Tri Sakti Jl. Dewi Sinta Kayu Tangi	Banjar. Timur Banjar. Selatan Banjar. Barat Banjar. Timur Banjar. Timur Banjar. Barat Banjar. Timur Banjar. Barat Banjar. Barat Banjar. Barat Banjar. Barat Banjar. Utara Banjar. Timur Banjar. Timur Banjar. Barat Banjar. Barat Banjar. Barat Banjar. Barat Banjar. Timur Banjar. Utara

Sumber: BPK Kotamadya Banjarmasin 1979

Lampiran: VII.

**Kebakaran tiap bulan dari tahun 1977–1979
di Banjarmasin**

Tahun/Bulan	1977	1978	1979
Januari	1 X	–	3 X
Februari	1 X	–	5 X
Maret	1 X	3 X	4 X
April	6 X	–	5 X
Mei	5 X	2 X	6 X
Juni	4 X	–	4 X
Juli	2 X	4 X	10 X
Agustus	3 X	9 X	10 X
September	18 X	4 X	11 X
Oktober	9 X	8 X	9 X
Nopember	9 X	5 X	1 X
Desember	3 X	5 X	5 X
Jumlah	62 X	40 X	73 X



Peta 1 : Peta Propinsi Kalimantan Selatan
 Sumber : Diolah oleh Tim dari Peta Pemerintah Daerah TK. 1 Kalimantan Selatan

